KURIKULUM 2013

EDISI REVISI 2017

Sejarah Indonesia



SMA/MA/
SMK/MAK

KELAS

XI

Semester 2

Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan "dokumen hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sejarah Indonesia / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.--
Edisi Revisi Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
VIII, 232 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2
ISBN 978-602-427-122-0 (jilid lengkap)
ISBN 978-602-427-125-1 (jilid 2b)

1. Indonesia -- Sejarah -- Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

959.8

Penulis : Sardiman AM, dan Amurwani Dwi Lestariningsih.
Penelaah : Baha Uddin, Hariyono, Mumuh Muhsin Z, Mohammad Iskandar.
Pereview : Abdul Rojak
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan ke-1, 2014 ISBN 978-602-282-110-6 (jilid 2b)
Cetakan ke-2, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Frutiger, 11 pt

KATA PENGANTAR

Dalam Kurikulum 2013 mata pelajaran Sejarah Indonesia adalah satu di antara mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua peserta didik. Sebagai pelajaran wajib yang harus diikuti oleh semua peserta didik, buku ini disusun dengan pendekatan regresif yang lebih populer. Dalam buku ini peserta didik diajak untuk melihat sejarah dalam kehidupan sehari-hari, melalui pengamatan terhadap kondisi sosial-budaya dan sejumlah tinggalan-tinggalan sejarah yang dapat diamati oleh peserta didik di lingkungan sekitarnya. Dari pengamatan inilah peserta didik diajak untuk melihat fenomena yang ada di sekitarnya dengan menghubungkannya pada suatu peristiwa masa lalu. Dengan harapan peserta didik dapat berpikir pluri-kausal, yang melihat penyebab suatu peristiwa itu karena banyak hal, tidak mono-kausal terhadap suatu peristiwa yang saat ini sedang terjadi.

Pembahasan dalam buku ini meliputi masa VOC hingga masa revolusi. Buku ini menyajikan contoh-contoh suatu peristiwa kekinian yang dapat dihubungkan dengan peristiwa masa lampau. Penyajian dalam buku ini merupakan usaha minimal yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Peserta didik diajak untuk lebih berani mengeksplorasi sumber-sumber belajar lain yang dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan yang tersedia di sekitarnya. Untuk itulah perlu peranan guru dalam memotivasi dan meningkatkan keterlibatan peserta didik untuk berperan aktif dalam tugas belajar-mengajar.

Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada penelaah buku Prof.Dr. Hariyono, Baha Uddin, M.Hum, Mumuh Muhsin Z, M.Hum, dan Dr. Mohammad Iskandar yang telah membantu memperkaya dan memberikan masukan-masukannya hingga buku ini sampai kepada para pembaca. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Drs. M.AP yang telah memberikan fasilitas dan dukungan hingga terselesaikannya buku ini.

Akhirnya kepada para pembaca kami terbuka untuk menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan buku ini. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan dunia pendidikan dan menumbuhkan kesadaran sejarah bagi generasi muda.

Jakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 5
Tirani Matahari Terbit

Kedatangan "saudara tua" sebagaimana Jepang menyebut dirinya, mula-mula disambut dengan penuh harapan, tetapi kemudian mengecewakan rakyat. Meskipun demikian, pendudukan Jepang membuka sejarah baru bagi Indonesia

Amrin Imran, "Perang Pasifik, dan Jatuhnya Rezim Kolonial Belanda" dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lapian (ed), 2012

Kamu tentu mengenal macam-macam merek kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Apa yang kamu bayangkan jika mendengar merek itu disebut? Dari mana mayoritas asal produk-produk tersebut? Ya, tentu kamu tidak asing dengan negara asal produk-produk tersebut, yakni Jepang, atau terkenal dengan nama Negeri Matahari Terbit. Produk-produk itu cukup menguasai pasar kendaraan bermotor di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Bahkan penjualan produk sepeda motor merek tertentu mengalami peningkatan jumlah penjualan yang signifikan setiap tahunnya. Gambaran fakta ini menunjukkan secara ekonomis begitu besar pengaruh dan dominasi Jepang di Indonesia. Dominasi produk-produk Jepang di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, terutama sejak Orde Baru. Bahkan pernah mendapat protes dari para mahasiswa tahun 1974, sehingga memunculkan peristiwa "Malari". Apa kamu tahu istilah "Malari"? cari jawabnya!

Berbicara mengenai dominasi ekonomi Jepang di Indonesia, sebenarnya secara historis kita sudah memiliki pengalaman pahit pada saat negeri kita diduduki Jepang tahun 1942 - 1945. Secara ekonomis kekayaan negeri kita dikuras untuk kepentingan Jepang demi memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pengalaman sejarah semestinya dapat menjadi pelajaran dalam menyikapi perkembangan pengaruh ekonomi Jepang sekarang ini.

Kamu bisa menunjukkan beberapa peninggalan penjajahan Jepang yang sampai sekarang masih dapat kita saksikan? Contoh peninggalan zaman penjajahan Jepang yang masih bisa disaksikan antara lain Gua Jepang.

Pernahkah kamu mendengar cerita atau bahkan mengunjungi dan melihat Gua Jepang? Ya, Gua Jepang atau sering juga disebut dengan Lubang Jepang, di beberapa daerah di Indonesia hampir dapat dijumpai gua peninggalan masa pendudukan Jepang itu. Misalnya, di Bukittinggi, Sulawesi Utara, Papua, Bali, dan tempat-tempat lain. Di Bukittinggi, Gua Jepang saat ini digunakan sebagai tempat wisata sejarah.



Sumber: Kemdikbud, 2014.
Gambar 5.1 Gua Jepang di Bukittinggi.

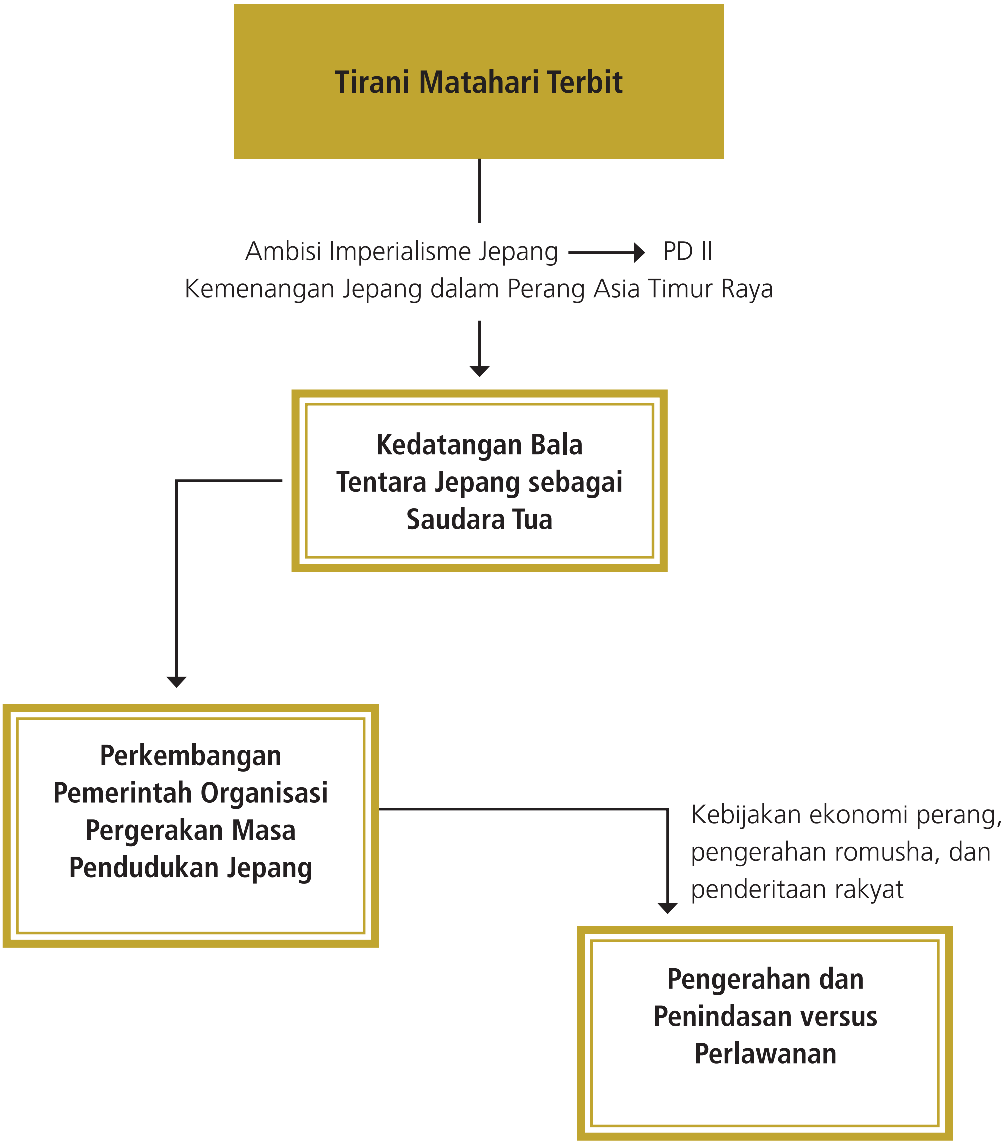
Pada masa pendudukan Jepang, Gua Jepang digunakan sebagai benteng perlindungan tentara Jepang dari serangan musuh. Gua itu dibangun dengan mengerahkan tenaga kerja murah, yang kemudian dikenal dengan istilah kerja paksa, atau Romusa.

Meskipun masa pendudukan Jepang hanya berlangsung relatif singkat, tetapi memberi dampak yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Propaganda Jepang mengenai tata pemerintahan baru, keberpihakan sebagai sesama bangsa Asia, dan janji akan kemerdekaan, memberi harapan bagi rakyat Indonesia. Kendati sempat dirusak oleh pemerintah Jepang yang represif, terutama dengan adanya program romusa, dorongan dan gerakan untuk mencapai kemerdekaan tetap digencarkan oleh kaum pergerakan baik secara terang-terangan maupun gerakan "bawah tanah" (Taufik Abdullah dan A.B. Lapian, (ed) 2012).

Nah, bagaimana kisah pendudukan Jepang selama sekitar 3,5 tahun di Indonesia? Pada uraian berikut akan dibahas mengenai kedatangan Jepang, perkembangan organisasi pergerakan, dan reaksi rakyat Indonesia terhadap kekejaman Jepang. Uraian tersebut akan dibahas melalui bab "Tirani Matahari Terbit". Istilah 'tirani' digunakan untuk menggambarkan tindakan otoriter dan kekejaman Jepang, sedangkan istilah 'matahari terbit' digunakan untuk penamaan bagi tentara Jepang. Sebab, posisi negara Jepang jika dilihat dari Indonesia, terletak di arah timur atau sama dengan arah saat matahari terbit, sehingga Negara Jepang disebut Negara Matahari Terbit.

PETA KONSEP


Tirani Matahari Terbit
Ambisi Imperialisme Jepang
PD II
Kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya
Kedatangan Bala Tentara Jepang sebagai Saudara Tua
Perkembangan Pemerintah Organisasi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang
Kebijakan ekonomi perang, pengerahan romusha, dan penderitaan rakyat
Pengerahan dan Penindasan versus Perlawanan

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari uraian ini, diharapkan kamu dapat:

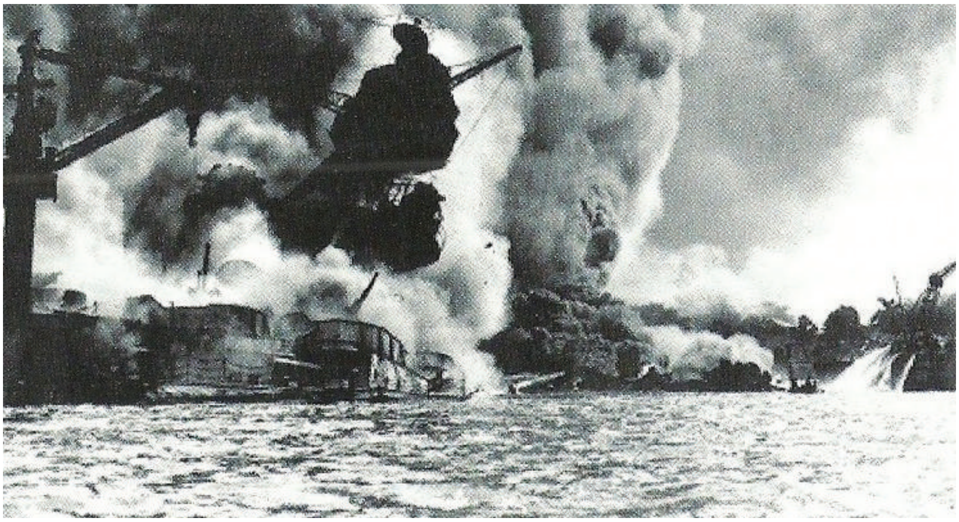
1. *Menganalisis kedatangan Jepang ke Indonesia.*
2. *Mengevaluasi perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia.*
3. *Menganalisis gerakan perlawanan rakyat terhadap kekejaman Jepang.*
4. *Menghargai dan meneladani semangat juang para tokoh dalam melawan Jepang.*
5. *Menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan YME atas kekuatan yang diberikan kepada rakyat Indonesia yang masih bertahan untuk melawan setiap pendudukan dan kekejaman bangsa asing.*

ARTI PENTING

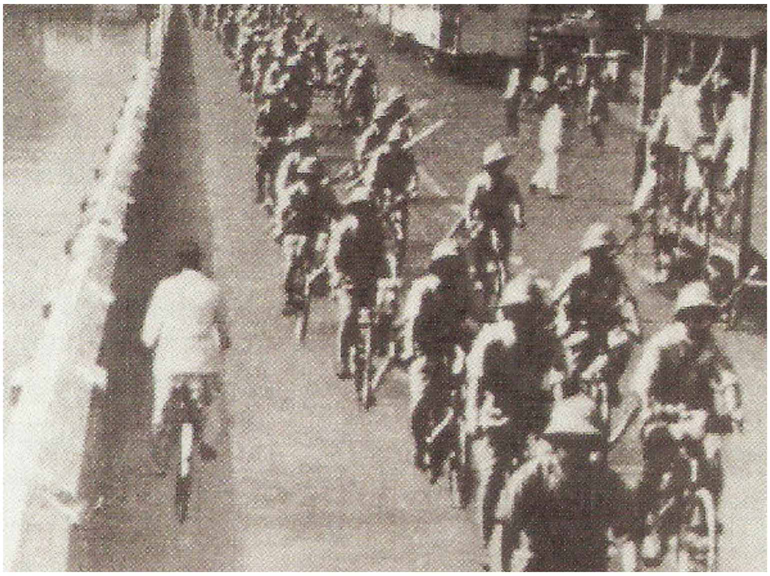
Belajar sejarah Indonesia masa pendudukan Jepang ini sangat penting karena di samping mendapatkan pemahaman tentang berbagai perubahan seperti dalam tata pemerintahan dan kemiliteran, tetapi juga mendapatkan pelajaran tentang nilai-nilai keuletan dan kerja keras dari para pejuang, pengorbanan, dan keteguhan untuk mempertahankan kebenaran dan hak asasi manusia.

A. Kedatangan Jepang ke Indonesia

Mengamati Lingkungan



Sumber: Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 6 (Perang dan Revolusi), 2012.
Gambar 5.2 Pengeboman Pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbour oleh tentara Jepang



Sumber: Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, 2011.
Gambar 5.3 Kedatangan Tentara Jepang ke Indonesia

» *Coba perhatikan baik-baik gambar 5.2 dan 5.3 di halaman sebelumnya.*

1. *Coba ajukan beberapa pertanyaan, terkait dengan gambar-gambar tersebut di atas!*
2. *Gambar tersebut terkait dengan peristiwa apa?*
3. *Mengapa peristiwa itu terjadi?*
4. *Apa dampak dari peristiwa itu?*
5. *Mengapa keadaan itu terjadi?*

Gambar 5.2 terkait dengan peristiwa pengeboman Pearl Harbour yang menunjukkan kemenangan Jepang terhadap Sekutu pada PD II dalam peristiwa Perang Pasifik. Peristiwa itu telah membuka jalan bagi Jepang untuk memasuki negara di Asia, termasuk Indonesia. Sementara gambar 5.3 berkaitan dengan gambaran mengenai cara tentara Jepang memasuki kota-kota penting di Indonesia.

Perlu dipahami bahwa "rentetan kemenangan yang dicapai tentara Jepang sejak melancarkan Perang Pasifik membuka pintu bagi mereka untuk menduduki tanah Hindia Belanda". Kedatangan "saudara tua", sebagaimana Jepang menyebut dirinya, mula-mula disambut dengan penuh harapan, tetapi kemudian mengecewakan rakyat. Walaupun demikian, pendudukan Jepang membuka sejarah baru bagi Indonesia".

Nah, sejarah baru yang bagaimana? Sebelum memahami sejarah baru yang dimaksud kamu perlu memahami terlebih dulu mengenai bagaimana tentara Jepang itu datang dan kemudian menguasai Indonesia. Ikutilah uraian penjelasan tersebut melalui subbab "Kedatangan Saudara Tua".

Memahami Teks

1. Masuknya Jepang ke Indonesia

Sejak pengeboman Pearl Harbour oleh angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan terhadap angkatan laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu seolah-olah tak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina. Kemudian serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab, persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik.

Perlu dipahami bahwa pada saat Jepang ini memasuki Indonesia sudah membawa kultur dan ideologi fasisme. Jepang sudah menjadi negara fasis. Fasis—fasisme adalah paham atau ideologi. Fasisme dapat dimaknai sebagai sistem (sistem pemerintahan), di mana semua kekuasaan berada pada satu tangan seorang yang diktator dan otoriter. Dalam mengembangkan kehidupan berbangsa menjadi sangat nasionalistik (chauvinistik), elitis, dan rasialis. Penataan kehidupan sosial dan ekonomi sangat ketat, sentralistik dalam sebuah korporasi pemerintah yang otoriter di bawah pemimpin yang diktator. Fasisme ini mula pertama berkembang di Italia pada tahun 1922 dengan tokohnya Benito Mussolini. Kemudian pada tahun 1933 berkembang di Jerman, yang selanjutnya berkembang juga di Jepang.

Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meskipun pasukan KNIL (*Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger*) dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan (12 Januari 1942). Jepang kemudian menyerang Sumatra setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu Jepang melakukan serangan ke Jawa (Februari 1942).

Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda.

Untuk menghadapi gerak invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut ABDACOM *(American British Dutch Australian Command)* yang bermarkas di Lembang. Letnan Jenderal Ter Poorten diangkat sebagai Panglima ABDACOM. Namun kekuatan ABDACOM tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Carda (Tjarda) pada Februari 1942 telah mengungsi ke Bandung.

Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos terus melarikan diri menuju Australia. Sementara itu, Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu dilaksanakan di tiga tempat, yakni di Banten dipimpin oleh Jenderal Imamura sendiri. Kemudian pendaratan di Eretan Wetan-Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tonishori, dan pendaratan di sekitar Bojonegoro dikoordinasi oleh Mayjen Tsuchihashi. Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda jika ternyata digunakan pendaratan tentara Jepang. Sementara itu Jepang tidak menyerang Jakarta, karena pada saat itu Jakarta disiapkan oleh Belanda sebagai kota terbuka.

Untuk menghadapi pasukan Jepang, sebenarnya Sekutu sudah mempersiapkan diri, yaitu antara lain berupa tentara gabungan ABDACOM, ditambah satu kompi Kadet dari Akademi Militer Kerajaan dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Jawa Barat. Di Jawa Tengah, telah disiapkan empat batalion infanteri, sedangkan di Jawa Timur terdiri tiga batalion pasukan bantuan Indonesia dan satu batalion marinir, serta ditambah dengan satuan-satuan dari Inggris dan Amerika. Meskipun demikian, tentara Jepang mendarat di Jawa dengan jumlah yang sangat besar, berhasil merebut tiap daerah hampir tanpa perlawanan.

Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942 Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenzorg (Bogor). Dengan mudah kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Jenderal Ter Poorten atas nama komandan pasukan Belanda/Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada Jepang

kemudian dikenal dengan Kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Gubernur Jenderal Tjarda ditawan. Namun, Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian *(exile government)* di Australia di bawah pimpinan H.J. Van Mook.

» *Coba perhatikan secara cermat kedatangan Jepang atau yang dikenal dengan "Saudara Tua" ke Indonesia yang begitu cepat dan merata di berbagai daerah di Indonesia. Tampaknya tentara Jepang itu sudah paham tentang Indonesia. Coba lakukan pelacakan kira-kira apa yang telah diperbuat Jepang sebelum tentara Jepang itu datang ke Indonesia!*

Menyimak dari gerakan tentara Jepang untuk menguasai Indonesia berlangsung begitu cepat itu memang menarik. Hal ini ada kaitannya dengan perkembangan sebelumnya. Sejak Jepang atau Negeri Sakura atau Negeri Matahari Terbit berkembang menjadi negara industri dan tampil sebagai imperialis, Jepang mulai membutuhkan daerah-daerah baru. Salah satu daerah baru yang dimaksud adalah Indonesia. Keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri Jepang. Jepang dengan slogan *Hakko Ichiu* yang diperkenalkan oleh Kaisar Jimmu adalah doktrin untuk menguasai dunia dan satu-satunya kekaisaran. Doktrin *Hakko Ichiu* ini kemudian dimodifikasi sebagai alat propaganda dan alat politik untuk mencapai tujuan pemerintah Jepang. Slogan ini juga diilhami oleh ajaran *Shintoisme* yang menerima dan memadukan semua tradisi termasuk kehidupan spiritual yang masuk ke Jepang, tanpa menghilangkah tradisi aslinya. *Hakko ichiu* telah menjadi slogan dan ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Ajaran ini diterjemahkan bahwa Jepang sebagai negara maju bertanggung jawab untuk membentuk kesatuan keluarga umat manusia dengan memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Ajaran *Hakko ichiu* diperkuat oleh keterangan antropolog yang menyatakan bahwa bangsa Jepang dan Indonesia serumpun. Untuk merealisasikan keinginannya itu, maka sebelum gerakan tentara Jepang itu datang ke Indonesia, Jepang sudah mengirim para *spionase* untuk datang ke Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Sambutan Rakyat Indonesia

Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielu-elukan sebagai "Saudara Tua" yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya.

Di mana-mana terdengar ucapan "*banzai-banzai*" (selamat datang-selamat datang). Sementara itu, pihak tentara Jepang terus melakukan propaganda-propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan Lagu Indonesia Raya, di samping Lagu Kimigayo. Bendera yang berwarna Merah Putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan Bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio, juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya.

Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Di samping itu, diperkuat pula dengan berkembangnya kepercayaan tentang Ramalan Jayabaya.

» *Tahukah kamu tentang isi Ramalan Jayabaya? Coba cari tahu jawabannya!*

Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Melalui program Pan-Asia Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah "saudara tua", jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan progandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama "Gerakan Tiga A".

» *Coba apa isi semboyan Tiga A itu? Apa kira-kira tujuan Jepang membentuk perkumpulan itu? Siapa yang dijadikan ketua Gerakan Tiga A itu?*

3. Pembentukan Pemerintahan Militer

Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari Markas Besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semimiliter). Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer.

a. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua Puluh Lima (*Tomi Shudan)* untuk Sumatra. Pusatnya di Bukittinggi.
b. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Keenam Belas (*Asamu Shudan*) untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut (*Dai Ni Nankenkantai*).
c. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu (Armada Selatan Kedua) untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar.

Pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan *Osamu Seirei* (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut.

a. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.
b. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.
c. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.

Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut.

a. *Gunshirekan* (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan *Seiko Shikikan* (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura.

b. *Gunseikan* (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut *Gunseikanbu*. Di lingkungan *Gunseikanbu* ini terdapat empat *bu* (semacam departemen) dan ditambah satu *bu* lagi, sehingga menjadi lima *bu.* Adapun kelima *bu* itu adalah sebagai berikut.
   1) *Somobu* (Departemen Dalam Negeri)
   2) *Zaimubu* (Departemen Keuangan)
   3) *Sangyobu* (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan) atau urusan Perekonomian
   4) *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas)
   5) *Shihobu* (Departemen Kehakiman)
c. *Gunseibu* (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur) yang meliputi:
   1) Jawa Barat : pusatnya di Bandung.
   2) Jawa Tengah : pusatnya di Semarang.
   3) Jawa Timur : pusatnya di Surabaya.

   Ditambah dua daerah istimewa *(Kochi)* yakni Yogyakarta dan Surakarta.

Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan *Kempetai* (Polisi Militer). Di samping susunan pemerintahan tersebut, juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah *Kimigayo.* Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, Lagu *Indonesia Raya* sering diperdengarkan di radio Tokyo.

» *Apa kira-kira tujuan Jepang membentuk Kempetai? Siapa yang dijadikan pimpinan Kempetai pada waktu itu?*

Pada awal pendudukan ini, secara kultural Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus digunakan tarikh *Sumera* (tarikh Jepang), menggantikan tarikh Masehi*.* Waktu itu tarikh Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 *Sumera.* Setiap tahun (mulai tahun 1942) rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya *Tencosetsu* (hari raya lahirnya Kaisar Hirohito). Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang.

4. Pemerintahan Sipil

Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang pemerintahan *shu* serta *tokubetsushi.* Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut UU No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah ***shu*** (karesidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali *Kochi* Yogyakarta dan *Kochi* Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah *shu* (karesidenan), *shi* (kotapraja), *ken* (kabupaten), *gun* (kawedanan), *son* (kecamatan), dan *ku* (desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 *shu.*

» *Coba lakukan identifikasi di mana saja letak ke-17 daerah shu tersebut!*

Pemerintahan *shu* itu dipimpin oleh seorang *shucokan. Shucokan* memiliki kekuasaan seperti gubenur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan *shucokan* dibantu oleh *Cokan Kanbo* (Majelis Permusyawaratan *Shu).* Setiap *Cokan Kanbo* ini memiliki tiga ***bu*** (bagian), yakni Naiseibu (bagian pemerintahan umum), *Kaisaibu* (bagian ekonomi), dan *Keisatsubu* (bagian kepolisian). Pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra (otonomi). Daerah ini disebut *tokubetsushi* (kota istimewa), yang posisi dan kewenangannya seperti ***shu*** yang berada langsung di bawah pengawasan *gunseikan.* Sebagai contoh adalah Kota Batavia, sebagai Batavia *Tokubetsushi* di bawah pimpinan *Tokubetu shico.*

Pemerintah Jepang juga membentuk *tonarigumi,* yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan Rukun Tetangga (RT). *Tanorigumi* ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang.

» *Coba lakukan diskusi dengan anggota kelompok, alasan Jepang membentuk pemerintahan militer yang dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Kemudian, mengapa daerah itu dibagi-bagi sampai tingkat desa?*

KESIMPULAN

1. *Setelah berhasil melakukan pengeboman Pearl Harbour tahun 1941, gerakan Jepang menuju Asia, termasuk ke Indonesia tidak bisa terbendung.*

2. *Jepang berhasil menguasai Kepulauan Indonesia dengan cepat dan merata.*

3. *Masuk dan kedatangan tentara Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dipandang sebagai kekuatan pembebas.*

4. *Jepang kemudian membentuk pemerintahan militer yang diperkuat dengan pemerintahan sipil.*

LATIH UJI KOMPETENSI

1. Jelaskan mengapa kedatangan Jepang ke Indonesia itu berjalan cepat dan merata ke berbagai wilayah Indonesia!

2. Mengapa pada mulanya rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang?

3. Mengapa Jepang membentuk pemerintahan militer di tiga kawasan: Sumatra, Jawa-Madura, dan kawasan Indonesia Timur?

4. Mengapa pemerintah pendudukan Jepang akhirnya hanya boleh memperdengarkan lagu kebangsaan Kimigayo, sedangkan lagu Indonesia Raya mulai dilarang?

5. Pelajaran apa yang kamu peroleh setelah mempelajari sejarah kedatangan dan awal pemerintahan Jepang di Indonesia?

Tugas

Buatlah peta jalur gerakan masuknya tentara Jepang dari Asia Tenggara kemudian memasuki Kepulauan Indonesia! Kamu dapat mempelajari buku-buku sejarah yang ada di perpustakaan sekolah.

B. Organisasi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang

Mengamati Lingkungan



Sumber: Album Pahlawan Bangsa, 2004.
Gambar 5.4 Tokoh Empat Serangkai.

» *Coba amati baik-baik gambar di atas!*
Gambar tersebut adalah gambar Empat Serangkai, yakni Sukarno, Ki Hajar Dewantoro, Moh. Hatta, dan K.H. Mas Mansyur. Mereka adalah tokoh dalam organisasi Putera.
Apa yang dimaksud dengan organisasi Putera?
Putera adalah salah satu organisasi yang dibentuk pada zaman pendudukan Jepang.

Banyak organisasi yang dibentuk pada zaman Jepang. Sama seperti organisasi-organisasi pada umumnya, yaitu organisasi yang bersifat semimiliter dan militer. Zaman Belanda tidak ada organisasi pergerakan yang bersifat semi militer. Berikut ini akan dipaparkan tentang perkembangan organisasi pergerakan di zaman pendudukan Jepang.

Memahami Teks

Ada satu perkembangan yang berbeda apabila kita memahami perkembangan organisasi pergerakan antara zaman kolonial Belanda dengan era pendudukan Jepang. Pada masa kolonial Belanda umumnya organisasi pergerakan yang muncul dan berkembang diprakarsai oleh para pejuang rakyat Indonesia, tetapi pada zaman Jepang banyak organisasi atau perkumpulan yang berdiri diprakarsai oleh Jepang, sementara para tokoh Indonesia mencoba memanfaatkan organisasi itu untuk kepentingan perjuangan. Hal ini juga tampak berhubungan dengan perkembangan pandangan sikap para tokoh Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang. Banyak di antara para tokoh Indonesia yang mencoba memanfaatkan masa pendudukan Jepang untuk melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan. Mereka mengambil sikap dan strategi bekerja sama dengan Jepang.

Sebagai contoh, pada masa pendudukan Jepang Sukarno bersedia bekerja sama dengan Jepang. Faktor penyebabnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Sehingga Sukarno merupakan salah seorang tokoh pergerakan kebangsaan yang terkesan pada kehebatan Jepang, dan percaya bahwa Jepang akan memenangkan perang. Sementara, Moh. Hatta dan Syahrir yang dikenal antifasisme, semestinya menentang Jepang. Namun, keduanya menyusun strategi yang saling melengkapi. Moh. Hatta mengambil sikap kooperatif dengan Jepang, sementara Syahrir akan menyusun "gerakan bawah tanah" (gerakan rahasia).

Syahrir bergerak di "bawah tanah" dan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh lain, seperti Cipto Mangunkusumo dan mantan anggota PNI Baru, Amir Syarifudin. Amir Syarifudin dikenal sebagai sosok yang bersikap anti-Jepang. Bahkan Amir Syarifudin dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyusun gerakan perlawanan terhadap Jepang. Untuk ini Amir Syarifudin telah menerima sejumlah uang dari seorang pejabat Belanda (Van der Plas), sebagai imbalan. Amir Syarifudin sebagai anggota PKI terikat dengan kebijakan *Commintern* yang menjalankan doktrin Dimitrov yakni bekerja sama dengan kapitalis untuk menghambat Fasisme karena itu Amir mau bekerja sama dengan Belanda (Kapitalis).

Sedangkan terhadap umat Islam, Jepang berusaha sekuat tenaga untuk mendekatinya. Sebab, umat Islam dinilai secara mayoritas anti peradaban Barat, sehingga diharapkan menjadi kekuatan besar dan mau membantu Jepang dalam menghadapi Sekutu. Sukarno dan Moh. Hatta bergabung dalam mengambil sikap kooperatif dengan Jepang. Langkah tersebut diambil semata-mata demi tujuan yang lebih penting, yakni kemerdekaan. Bahkan kedua tokoh ini juga mengusulkan agar segera dibentuk organisasi politik, karena setelah Jepang berkuasa di Indonesia, semua organisasi politik yang pernah berkembang di zaman Hindia Belanda dibubarkan.

» *Organisasi-organisasi pada zaman pendudukan Jepang ada yang bersifat kemasyarakatan dan ada pula organisasi yang bersifat militer atau semimiliter. Organisasi atau perkumpulan apa saja yang berkembang di zaman pendudukan Jepang itu?*

1. Organisasi yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan

a. Gerakan Tiga A

Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan Tiga A (3A). Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki tiga semboyan, yaitu *Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia*, dan *Nippon Pemimpin Asia.* Sebagai pimpinan Gerakan Tiga A, bagian propaganda Jepang (*Sedenbu*) telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti K. Sutan Pamuncak dan Moh. Saleh.

Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam Gerakan Tiga A juga dibentuk subseksi Islam yang disebut "Persiapan Persatuan Umat Islam". Subseksi Islam dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso.

Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya, Gerakan Tiga A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif. Bulan Desember 1942 Gerakan Tiga A dinyatakan gagal. Mengapa "Gerakan Tiga A" ini dinyatakan gagal oleh Jepang, kira-kira apa alasannya?

b. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

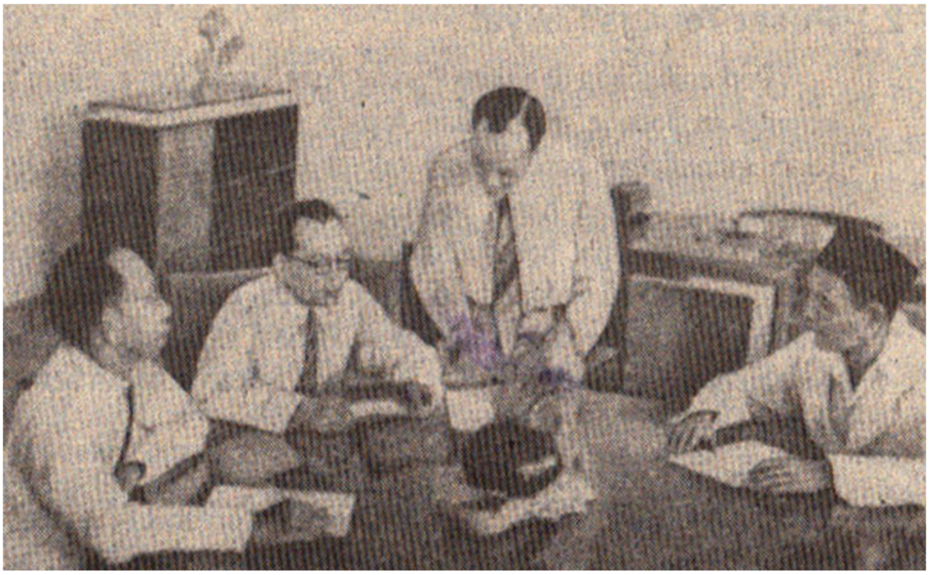
"Gerakan Tiga A" dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerja sama. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda, Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukardjo Wiryopranoto. Organisasi itu juga tidak mendapat sambutan rakyat. Jepang kemudian membubarkan organisasi itu.

Pemimpin Indonesia seperti Sukarno , Hatta, K.H. Mas Mansyur, Ki Hajar Dewantara, Sutardjo Kartohadikusumo, Abikusno Cokrosuyoso, dan Prof. Dr. Supomo, ikut dalam komisi untuk menyelidiki adat istiadat Indonesia.

Dukungan rakyat terhadap Jepang memang tidak seperti awal kedatangannya. Hal ini terjadi karena sikap dan tindakan Jepang yang berubah. Seperti telah disinggung di depan, Jepang mulai melarang pengibaran bendera Merah Putih dan yang boleh dikibarkan hanya bendera Hinomaru serta mengganti Lagu Indonesia Raya dengan lagu Kimigayo. Jepang mulai membiasakan mengganti kata-kata *banzai* (selamat datang) dengan *bakero* (bodoh). Masyarakat mulai tidak simpati terhadap Jepang. "Saudara tua" tidak seperti yang mereka janjikan.

Sementara perkembangan Perang Asia Timur Raya mulai memojokkan Jepang. Kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran telah menimbulkan rasa tidak percaya dari rakyat. Oleh karena itu, Jepang harus segera memulihkan keadaan. Jepang harus dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka, antara lain Sukarno dan Moh. Hatta. Karena Sukarno masih ditahan di Padang oleh pemerintah Hindia Belanda, maka segera dibebaskan oleh Jepang. Pada tanggal 9 Juli 1942 Sukarno sudah berada di Jakarta dan bergabung dengan Moh. Hatta.

Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat. Bulan Desember 1942 dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian Sukarno, Hatta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dibentuk tanggal 16 April 1943. Mereka kemudian disebut sebagai empat serangkai. Sebagai ketua panitia adalah Sukarno. Tujuan Putera adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putera bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, Putera juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi.



Sumber: Sejarah Nasional Indonesia VI, 1984.

Gambar 5.5 Pimpinan Putera: Empat Serangkai.

Menurut struktur organisasinya, Putera memiliki pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan pusat dikenal sebagai Empat Serangkai. Kemudian pimpinan daerah dibagi, sesuai dengan tingkat daerah, yakni tingkat *syu, ken*, dan *gun.* Putera juga mempunyai beberapa penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, G. Taniguci, Iciro Yamasaki, dan Akiyama.

Pada awal berdirinya Putera, cepat mendapatkan sambutan dari organisasi massa yang ada. Misalnya dari Persatuan Guru Indonesia; Perkumpulan Pegawai Pos Menengah; Pegawai Pos Telegraf Telepon dan Radio; serta Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Maria Ulfah Santoso. Dari kalangan pemuda terdapat sambutan dari organisasi Barisan Banteng dan dari kelompok pelajar terdapat sambutan dari organisasi Badan Perantaraan Pelajar Indonesia serta Ikatan Sport Indonesia. Mereka semua bergabung ke dalam Putera.

Putera pun berkembang dan bertambah kuat. Sekalipun di tingkat daerah tidak berkembang baik, namun Putera telah berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia. Melalui rapat-rapat dan media massa, pengaruh Putera semakin meluas. Perkembangan Putera akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang. Oleh karena itu, Putera telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan, tidak digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang. Ternyata sikap dan tindakan para pemimpin nasionalis ini tercium juga oleh penguasa Jepang, maka pada tahun 1944 Putera dinyatakan bubar oleh Jepang. Melalui badan propaganda Jepang ini Bahasa Indonesia mulai tersebar di kalangan masyarakat Indonesia sekaligus pula membuat nasionalisme Indonesia semakin kuat.

c. Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan Majelis Syura Muslimin (Masyumi)

Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan Sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintah kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada tanggal 4 September 1942 MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang.

Dengan diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. MIAI menjadi tempat bersilaturakhim, menjadi wadah tempat berdialog, dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan

umat, dan tentu saja bersinggungan dengan perjuangan. MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Semboyan yang terkenal adalah "*berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah".* Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang, MIAI berkembang baik. Kantor pusatnya semula di Surabaya kemudian pindah ke Jakarta.

Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah sebagai berikut.

1) Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia.
2) Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman.
3) Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, MIAI membuat program yang lebih menitikberatkan pada program-program yang bersifat *sosio-religius.* Secara khusus program-program itu akan diwujudkan melalui rencana sebagai berikut:

1) pembangunan masjid Agung di Jakarta,
2) mendirikan universitas, dan
3) membentuk *baitulmal.*

Dari ketiga program ini yang mendapatkan lampu hijau dari Jepang hanya program yang ketiga.

» *Coba perhatikan! Mengapa Jepang tidak memberi "restu" MIAI membangun masjid agung dan universitas? Coba cari jawabnya!*

MIAI terus mengembangkan diri di tengah-tengah ketidakcocokan dengan kebijakan dasar Jepang. MIAI menjadi tempat pertukaran pikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan Jepang yang semata-mata untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Ir. Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjanah. Bahkan dalam mengembangkan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut "Suara MIAI".

Keberhasilan program *baitulmal,* semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana yang terkumpul dari program tersebut semata-mata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membantu Jepang.

Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberi konstribusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan perang Asia Timur Raya.

Ketua Masyumi ini adalah Hasyim Asy'ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam organisasi ini adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. Masyumi sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama. Dengan kata lain, para ulama dilibatkan dalam kegiatan pergerakan politik.

Masyumi cepat berkembang, di setiap karesidenan ada cabang Masyumi. Oleh karena itu, Masyumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Dalam perkembangannya, tampil tokoh-tokoh muda di dalam Masyumi antara lain Moh. Natsir, Harsono Cokroaminoto, dan Prawoto Mangunsasmito. Perkembangan ini telah membawa Masyumi semakin maju dan warna politiknya semakin jelas. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro rakyat, sehingga menentang keras adanya romusa. Masyumi menolak perintah Jepang dalam pembentukannya sebagai penggerak romusa. Dengan demikian Masyumi telah menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat.

Sikap tegas dan berani di kalangan tokoh-tokoh Islam itu akhirnya dihargai Jepang. Sebagai contoh, pada suatu pertemuan di Bandung, ketika pembesar Jepang memasuki ruangan, kemudian diadakan acara *seikerei* (sikap menghormati Tenno Heika dengan membungkukkan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo) ternyata ada tokoh yang tidak mau melakukan *seikerei,* yakni Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka). Akibatnya, muncul ketegangan dalam acara itu. Namun, setelah tokoh Islam itu menyatakan bahwa *seikerei* bertentangan dengan Islam, sebab sikapnya seperti orang Islam rukuk waktu sholat. Menurut orang Islam rukuk hanya semata-mata kepada Tuhan dan menghadap ke kiblat. Dari alasan itu, akhirnya orang-orang Islam diberi kebebasan untuk tidak melakukan *seikerei.*

d. Jawa Hokokai

Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik, tentara Sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumaikici Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama *Jawa Hokokai* (Himpunan Kebaktian Jawa)*.* Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan darma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat tiga hal:

1) mengorbankan diri,
2) mempertebal persaudaraan, dan
3) melaksanakan suatu tindakan dengan bukti.

Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokokai berbeda dengan Putera. Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokokai sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh *Gunseikan*, sedangkan penasihatnya adalah Ir. Sukarno dan Hasyim Asy'ari. Di tingkat daerah (*syu/shu*) dipimpin oleh *Syucokan/Shucokan* dan seterusnya sampai daerah *ku* (desa*)* oleh *Kuco* (kepala desa/lurah), bahkan sampai *gumi* di bawah pimpinan *Gumico.* Dengan demikian, Jawa Hokokai memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa, dukuh, bahkan sampai tingkat rukun tetangga *(Gumi* atau *Tonarigumi). Tonarigumi* dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 10-20 keluarga. Para kepala desa dan kepala dukuh serta ketua RT bertanggung jawab atas kelompok masing-masing.

Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai sebagai berikut:

1) melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang
2) memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan, dan
3) memperkokoh pembelaan tanah air

Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam *hokokai* (himpunan kebaktian) sesuai dengan bidang profesinya. Misalnya *Kyoiku Hokokai* (kebaktian para pendidik guru-guru) dan *Isi Hokokai* (wadah kebaktian para dokter). Jawa Hokokai juga mempunyai anggota istimewa, seperti *Fujinkai* (organisasi wanita), dan *Keimin Bunka*

Shidosho (Pusat Kebudayaan). Di dalam membantu memenangkan perang, Jawa Hokokai telah berusaha antara lain dengan pengerahan tenaga dan memobilisasi potensi sosial ekonomi, misalnya dengan penarikan hasil bumi sesuai dengan target yang di tentukan.

Organisasi Jawa Hokokai ini tidak berkembang di luar Jawa, sehingga Golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Penguasa di luar Jawa seperti di Sumatra berpendapat bahwa di Sumatra terdapat banyak suku, bahasa, dan adat istiadat, sehingga sulit dibentuk organisasi yang besar dan memusat, kalau ada hanya lokal di tingkat daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokokai ini juga dapat berkembang sesuai yang diinginkan Jepang.

2. Organisasi Semimiliter

Sesuai dengan sifat pemerintahan militer, Jepang berusaha mengembangkan organisasi militer. Namun, untuk memperkuat pemerintahannya Jepang juga mengembangkan organisasi-organisasi semimiliter dan pengerahan para pemuda yang kuat fisiknya.

a. Pengerahan Tenaga Pemuda

Kelompok pemuda memegang peranan penting di Indonesia, apalagi melihat jumlahnya yang cukup besar. Menurut penilaian Jepang, para pemuda apalagi yang tinggal di daerah perdesaan, belum terpengaruh oleh alam pikiran Barat. Mereka secara fisik cukup kuat, semangat, dan pemberani. Oleh karena itu, perlu dikerahkan untuk membantu memperkuat posisi Jepang dalam menghadapi perang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka para pemuda dijadikan sasaran utama bagi propaganda Jepang. Dengan"Gerakan Tiga A" serta semboyan "Jepang, Indonesia sama saja, Jepang saudara tua", tampaknya cukup menarik bagi kalangan pemuda. Pernyataan Jepang tentang persamaan, dinilai sebagai suatu perubahan baru dari keadaan di masa Belanda yang begitu diskriminatif.

Sebelum secara resmi Jepang membentuk organisasi-organisasi semimiliter, Jepang telah melatih para pemuda untuk menjadi pemuda yang disiplin, memiliki semangat juang tinggi (*seishin*) dan berjiwa ksatria *(bushido)* yang tinggi. Sesuai dengan sifat pemuda yang energik, maka yang ditekankan kepada para pemuda adalah *seishin* (semangat) dan *bushido* (jiwa satria). Selain itu, juga dikembangkan jiwa disiplin dan menghilangkan rasa rendah diri. Salah satu cara untuk menanamkan nilat-nilai tersebut kepada kaum muda adalah dengan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Pendidikan umum, seperti sekolah rakyat (sekolah dasar) dan sekolah menengah. Sedangkan pendidikan khusus adalah latihan-latihan yang diadakan oleh Jepang. Latihan-latihan yang diadakan Jepang, antara lain BPAR (Barisan Pemuda Asia Raya). Wadah ini digunakan untuk menanamkan semangat Jepang. BPAR diadakan dari tingkat pusat di Jakarta. Kemudian di daerah-daerah dibentuk Komite Penginsafan Pemuda, yang anggota-anggotanya terdiri atas unsur kepanduan. Bentuk komite seperti ini sifatnya lokal dan disesuaikan dengan situasi daerah masing-masing.

Barisan Pemuda Asia Raya tingkat pusat diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. Sebenarnya, BPAR bagian dari Gerakan Tiga A. Program latihan di BPAR diadakan dalam jangka waktu tiga bulan dan jumlah peserta tidak dibatasi. Semua pemuda boleh masuk mengikuti latihan. Di dalam latihan-latihan tersebut ditekankan pentingnya semangat dan keyakinan, mengingat mereka akan menjadi pimpinan para pemuda.

Selain BPAR, Jepang juga membentuk wadah latihan yang disebut *San A Seinen Kutensho* di bawah Gerakan Tiga A, yang diprakarsai oleh H. Shimuzu dan Wakabayashi. Di dalam *San A Seinen Kutensho* latihan diadakan selama satu setengah bulan. Latihan-latihannya bersifat khusus, yakni ditujukan kepada para pemuda yang sudah pernah aktif di dalam organisasi, misalnya kepanduan. Di samping latihan-latihan yang berkaitan dengan kedisiplinan dan semangat, pemuda juga diajari mengenai pengetahuan-pengetahuan praktis seperti memasak, merawat rumah, serta berkebun. Selain itu, pemuda juga diajari bahasa Jepang. Pada tahap pertama pelatihan, telah dilatih sebanyak 250 orang.

Meskipun telah dibentuk *San A Seinen Kutensho*, perkumpulan kepanduan juga masih diadakan, misalnya "Perkemahan Kepanduan Indonesia" (Perkindo) yang diadakan di Jakarta. Gerakan kepanduan merupakan wadah

yang cukup baik untuk membina kader yang penuh semangat dan disiplin. Perkumpulan ini pernah dikunjungi oleh *Gunseikan* dan tokoh Empat Serangkai dari Putera.

b. Organisasi Seinendan

Seinendan (Korps Pemuda) adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Pada awalnya, anggota Seinendan 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan dibentuknya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Bagi Jepang, untuk mendapatkan tenaga cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam perang Asia Timur Raya, perlu diadakannya pengerahan kekuatan pemuda. Oleh karena itu, Jepang melatih para pemuda atau para remaja melalui organisasi Seinendan. Dalam hal ini Seinendan difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang.

Pengkoordinasian kegiatan Seinendan ini diserahkan kepada penguasa setempat. Misalnya di daerah tingkat *syu*, ketuanya *syucokan* sendiri. Begitu juga di daerah *ken*, ketuanya *kenco* sendiri dan seterusnya. Untuk memperbanyak jumlah Seinendan, Jepang juga menggerakkan Seinendan



Sumber: Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 6 (Perang dan Revolusi), 2012.
Gambar 5.6 Latihan Seinendan.

bagian putri yang disebut *Josyi* Seinendan*. S*ampai pada masa akhir pendudukan Jepang, jumlah Seinendan itu mencapai sekitar 500.000 pemuda. Tokoh-tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Seinendan antara lain, Sukarni dan Latief Hendraningrat.



Sumber: PETA: Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa dan Sumatera 1942-1945, 1996.
Gambar 5.7 Chudancho Latief Hendraningrat sedang memberikan pelajaran.

c. Keibodan

Organisasi *Keibodan* (Korps Kewaspadaan) merupakan organisasi semimiliter yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25-35 tahun. Ketentuan utama untuk dapat masuk Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Apabila dilihat dari usianya, para anggota Keibodan sudah lebih matang dan siap untuk membantu Jepang dalam keamanan dan ketertiban. Pembentukan Keibodan ini memang dimaksudkan untuk membantu tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Untuk itu anggota Keibodan juga dilatih kemiliteran. Pembina keibodan adalah Departemen Kepolisian *(Keimubu)* dan di daerah *syu (shu)* dibina oleh Bagian Kepolisian *(Keisatsubu).* Di kalangan orang-orang Cina juga dibentuk Keibodan yang dinamakan *Kakyo Keibotai.*

Untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan keibodan maka Jepang mengadakan program latihan khusus untuk para kader. Latihan khusus tersebut diselenggarakan di sekolah Kepolisian di Sukabumi. Jangka waktu latihan tersebut selama satu bulan. Mereka dibina secara khusus dan diawasi secara langsung oleh para polisi Jepang. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh kaum nasionalis.

Organisasi Seinendan dan Keibodan dibentuk di daerah-daerah seluruh Indonesia, meskipun namanya berbeda-beda. Misalnya di Sumatra disebut *Bogodan* dan di Kalimantan disebut *Borneo Konan Kokokudan.* Jumlah anggota Seinendan diperkirakan mencapai dua juta orang dan keibodan mencapai sekitar satu juta anggota.

Selain Seinendan dan Keibodan, pada bulan Agustus 1943 juga dibentuk *Fujinkai* (Perkumpulan Wanita). Anggotanya minimal harus berusia 15 tahun. *Fujinkai* bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Ketika situasi perang semakin memanas, Fujinkai ini juga diberi latihan militer sederhana, bahkan pada tahun 1944 dibentuk "Pasukan Srikandi". Organisasi sejenis juga dibentuk untuk usia murid SD yang disebut *Seinentai* (barisan murid sekolah dasar), kemudian dibentuk *Gakukotai* (barisan murid sekolah lanjutan).

d. Barisan Pelopor

Pada pertengahan tahun 1944, diadakan rapat *Chuo-Sangi-In* (Dewan Pertimbangan Pusat). Salah satu keputusan rapat tersebut adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan keinsyafan dan kesadaran yang mendalam di kalangan rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan untuk seluruh rakyat dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh. Sebagai wujud konkret dari kesimpulan rapat itu maka pada tanggal 1 November 1944, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan "Barisan Pelopor". Melalui organisasi ini diharapkan adanya kesadaran rakyat untuk berkembang, sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia.Organisasi semimiliter "Barisan Pelopor" ini tergolong unik karena pemimpinnya adalah seorang nasionalis, yakni Ir. Sukarno, yang dibantu oleh R.P. Suroso, Otto Iskandardinata, dan Buntaran Martoatmojo.

Organisasi "Barisan Pelopor" berkembang di daerah perkotaan. Organisasi ini mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda, meskipun hanya menggunakan peralatan yang sederhana, seperti senapan kayu dan bambu runcing. Di samping itu, mereka juga dilatih bagaimana menggerakkan massa, memperkuat pertahanan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Keanggotaan dari Barisan Pelopor ini mencakup seluruh pemuda, baik yang terpelajar maupun yang berpendidikan rendah, atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Keanggotaan yang heterogen ini justru diharapkan menimbulkan semangat solidaritas yang tinggi, sehingga timbul ikatan emosional dan semangat kebangsaan yang tinggi.

Barisan Pelopor ini berada di bawah naungan Jawa Hokokai. Anggotanya mencapai 60.000 orang. Di dalam Barisan Pelopor ini, dibentuk Barisan Pelopor Istimewa yang anggotanya dipilih dari asrama-asrama pemuda yang terkenal. Anggota Barisan Pelopor Istimewa berjumlah 100 orang, di antaranya ada Supeno, D.N. Aidit, Johar Nur, dan Asmara Hadi. Ketua Barisan Pelopor Istimewa adalah Sudiro. Barisan Pelopor Istimewa berada di bawah kepemimpinan para nasionalis. Oleh karena itu, organisasi Barisan Pelopor ini berkembang pesat. Dengan adanya organisasi ini, semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan di lingkungan rakyat Indonesia menjadi berkobar.

e. Hizbullah

Pada tanggal 7 September 1944, PM Jepang, *Kaiso* mengeluarkan janji tentang kemerdekaan untuk Indonesia. Sementara keadaan di medan perang, Jepang mengalami berbagai kekalahan. Jepang mulai merasakan berbagai kesulitan. Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan yang telah ada. Jepang merencanakan untuk membentuk pasukan cadangan khusus dan pemuda-pemuda Islam sebanyak 40.000 orang.

Rencana Jepang untuk membentuk pasukan khusus Islam tersebut, cepat tersebar di tengah masyarakat. Rencana ini segera mendapat sambutan positif dari tokoh-tokoh Masyumi, sekalipun motivasinya berbeda. Begitu pula para pemuda Islam lainnya, mereka menyambut dengan penuh antusias. Bagi Jepang, pasukan khusus Islam itu digunakan untuk membantu memenangkan perang, tetapi bagi Masyumi pasukan itu digunakan untuk

persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Berkaitan dengan hal itu maka para pemimpin Masyumi mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk pasukan sukarelawan yang khusus terdiri atas pemuda-pemuda Islam. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember 1944 berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan *Hizbullah* (Tentara Allah) yang dalam istilah Jepangnya disebut *Kaikyo Seinen Teishinti.*

Tugas pokok Hizbullah adalah sebagai berikut:

1) Sebagai tentara cadangan dengan tugas:
    a) melatih diri jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya,
    b) membantu tentara *Dai Nippon,*
    c) menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, dan
    d) menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang.
2) Sebagai pemuda Islam, dengan tugas:
    a) menyiarkan agama Islam,
    b) memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama, dan
    c) membela agama dan umat Islam Indonesia.

Untuk mengoordinasikan program dan kegiatan Hizbullah, maka dibentuk pengurus pusat Hizbullah. Ketua pengurus pusat Hizbullah adalah KH. Zainul Arifin, dan wakilnya adalah Moh. Roem. Anggota pengurusnya antara lain, Prawoto Mangunsasmito, Kiai Zarkasi, dan Anwar Cokroaminoto.

Setelah itu, dibuka pendaftaran untuk anggota Hizbullah. Pada tahap pertama pendaftaran melalui *Syumubu* (kantor Agama). Setiap keresidenan diminta mengirim 25 orang pemuda Islam, rata-rata mereka para pemuda berusia 17-25 tahun. Berdasarkan usaha tersebut, terkumpul 500 orang pemuda. Para anggota Hizbullah ini kemudian dilatih secara kemiliteran dan dipusatkan di Cibarusa, Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 28 Februari 1945, latihan secara resmi dibuka oleh pimpinan tentara Jepang. Pembukaan latihan ini dihadiri oleh pengurus Masyumi, seperti K.H. Hasyim Asyari, K.H. Wahid Hasyim, dan Moh. Natsir. Dalam pidato pembukaannya, pimpinan tentara Jepang menegaskan bahwa para pemuda Islam dilatih agar menjadi kader dan pemimpin barisan Hizbullah. Tujuannya adalah agar para pemuda dapat mengatasi kesukaran perang dengan hati tabah dan iman yang teguh. Para pelatihnya berasal dari komandan-komandan Peta dan di bawah pengawasan perwira Jepang, Kapten *Yanagawa Moichiro* (pemeluk Islam, yang kemudian menikah dengan seorang putri dari Tasik).

Latihan dilakukan di Cibarusa selama tiga setengah bulan. Program latihannya di samping keterampilan fisik kemiliteran, juga dalam bidang mental rohaniah. Keterampilan fisik kemiliteran dilatih oleh para komandan Peta, sedangkan bidang mental kerohanian dilatih oleh K.H. Mustafa Kamil (bidang kekebalan), K.H. Mawardi (bidang tauhid), K.H. Abdul Halim (bidang politik), dan Kiai Tohir Basuki (bidang sejarah). Sementara itu, sebagai ketua asrama adalah K.H. Zainul Arifin.

Latihan di Cibarusa berhasil membina kader-kader pejuang yang militan. Pelatihan itu juga menumbuhkan semangat nasionalisme para kader Hizbullah. Setelah selesai pelatihan, mereka kembali ke daerah masing-masing untuk membentuk cabang-cabang Hizbullah beserta program pelatihannya. Dengan demikian, berkembanglah kekuatan Hizbullah di berbagai daerah

Para anggota Hizbullah menyadari bahwa tanah Jawa adalah pusat pemerintahan tanah air Indonesia maka harus dipertahankan. Apabila Jawa yang merupakan garis terdepan diserang musuh, Hizbullah akan mempertahankan dengan penuh semangat. Semangat ini tentu pada hakikatnya bukan karena untuk membantu Jepang, tetapi demi tanah air Indonesia. Jika Barisan Pelopor disebut sebagai organisasi semimiliter di bawah naungan Jawa Hokokai, maka Hizbullah merupakan organisasi semimiliter berada di bawah naungan Masyumi.

» *Mengapa Jepang memilih untuk membentuk pasukan cadangan yang begitu besar dari umat Islam? Apa alasannya? Coba lakukan telaah tentang hal itu!*

3. Organisasi Militer

a. Heiho

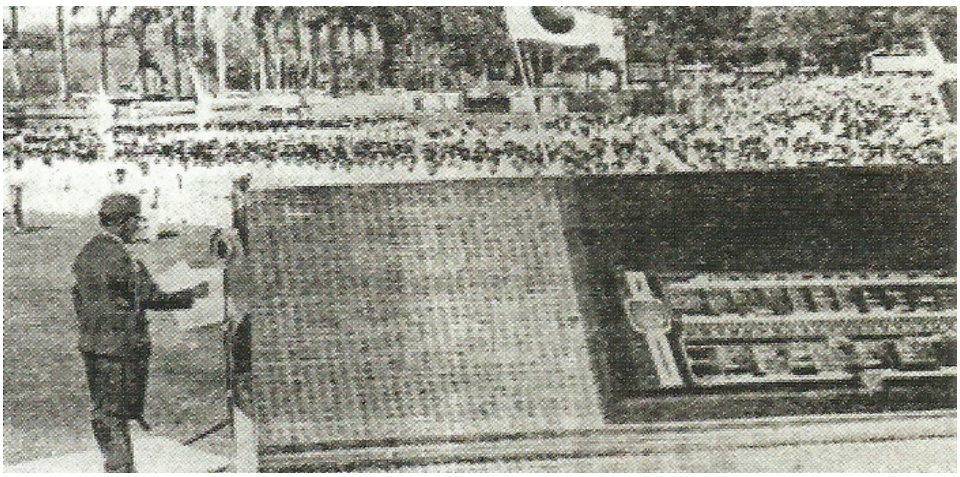
Heiho (Pasukan Pembantu) adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain:

1) umur 18-25 tahun
2) berbadan sehat
3) berkelakuan baik, dan
4) berpendidikan minimal sekolah dasar.

Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain, membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Sebagai contoh, banyak anggota Heiho yang ikut perang melawan tentara Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, bahkan ada yang sampai ke Birma.

Organisasi Heiho lebih terlatih di dalam bidang militer dibanding dengan organisasi-organisasi lain. Kesatuan Heiho merupakan bagian integral dari pasukan Jepang. Mereka sudah dibagi-bagi menurut kompi dan dimasukkan ke kesatuan Heiho menurut daerahnya, di Jawa menjadi bagian Tentara ke-16 dan di Sumatera menjadi bagian Tentara ke-25. Selain itu, juga sudah terbagai menjadi Heiho bagian angkatan darat, angkatan laut, dan juga bagian *Kempeitei* (kepolisian). Dalam Heiho, telah ada pembagian tugas, misalnya bagian pemegang senjata antipesawat, tank, artileri, dan pengemudi.

Sejak berdiri sampai akhir pendudukan Jepang, diperkirakan jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42.000 orang dan sebagian besar sekitar 25.000 berasal dari Jawa. Namun,dari sekian banyak anggota Heiho tidak seorang pun yang berpangkat perwira, karena pangkat perwira hanya untuk orang Jepang.



Sumber: Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 6 (Perang dan Revolusi), 2012.
Gambar 5.8 Latihan militer dalam Heiho.

b. Peta

Sekalipun tidak dapat dilepaskan dari rasa ketakutan akan adanya serangan Sekutu, Jepang berusaha agar Indonesia dapat dipertahankan dari serangan Sekutu. Heiho sebagai pasukan yang terintegrasi dengan pasukan Jepang masih dipandang belum memadai. Jepang masih berusaha agar ada pasukan yang secara konkret mempertahankan Indonesia. Oleh karena itu, Jepang berencana membentuk pasukan untuk mempertahankan tanah air Indonesia yang disebut Pasukan Pembela Tanah Air (Peta). Jepang berupaya mempertahankan Indonesia dari serangan Sekutu secara sungguh-sungguh. Hal ini bisa saja didasari oleh rasa was-was yang makin meningkat karena situasi di medan perang yang bertambah sulit sehingga di samping Heiho, Jepang juga membentuk organisasi Peta.

Peta adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula yang ditugasi untuk melatih anggota Peta adalah seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut *Tokubetsu Han.* Bahkan sebelum ada perintah pembentukan Peta, bagian *Tokuhetsu Han* sudah melatih para pemuda Indonesia untuk tugas intelijen. Latihan tugas intelijen dipimpin oleh Yanagawa.

Latihan Peta itu kemudian berkembang secara sistematis dan terprogram. Penyelenggaraannya berada di dalam *Seinen Dojo* (Panti Latihan Pemuda) yang terletak di Tangerang. Mula-mula anggota yang dilatih hanya 40 orang dari seluruh Jawa.

Pada akhir latihan angkatan ke-2 di *Seinen Dojo,* keluar perintah dari Panglima tentara Jepang Letnan Jenderal Kumaikici Harada untuk membentuk Tentara "Pembela Tanah Air"(Peta). Berkaitan dengan itu, Gatot Mangkuprojo diminta untuk mengajukan rencana pembentukan organisasi Tentara Pembela Tanah Air. Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober 1943 secara resmi berdirilah Peta. Berdirinya Peta ini berdasarkan peraturan dari pemerintah Jepang yang disebut *Osamu* Seinendan, nomor 44. Berdirinya Peta ternyata mendapat sambutan hangat di kalangan pemuda. Banyak di antara para pemuda yang tergabung dalam Seinendan mendaftarkan diri menjadi anggota Peta. Anggota Peta yang bergabung berasal dari berbagai golongan di dalam masyarakat.

Peta sudah mengenal adanya jenjang kepangkatan dalam organisasi, misalnya *daidanco* (komandan batalion), *cudanco* (komandan kompi), *shodanco* (komandan peleton), *bundanco* (komandan regu), dan *giyuhei* (prajurit sukarela). Pada umumnya, para perwira yang menjadi komandan batalion atau *daidanco* dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang terkemuka, misalnya pegawai pemerintah, pemimpin agama, politikus, dan penegak hukum. Untuk *cudanco* dipilih dari mereka yang sudah bekerja, tetapi pangkatnya masih rendah, misalnya guru-guru sekolah. *Shodanco* dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan. Adapun *budanco* dan *giyuhei* dipilih dari para pemuda tingkat sekolah dasar.

Untuk mencapai tingkat perwira Peta, para anggota harus mengikuti pendidikan khusus. Pertama kali pendidikan itu dilaksanakan di Bogor dalam lembaga pelatihan yang diberi nama Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa (*Jawa Boei Giyugun Kanbu Kyoikutai*). Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka ditempatkan di berbagai *daidan* (batalion) yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali.



Sumber: Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 6 (Perang dan Revolusi), 2012.
Gambar 5.9 Seleksi penerimaan calon tentara Peta.

Menurut struktur organisasi kemiliteran, Peta tidak secara resmi ditempatkan

pada struktur organisasi tentara Jepang. Hal ini memang berbeda dengan Heiho. Peta dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari pihak musuh. Jelasnya, Peta bertugas membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan Sekutu. Dalam kedudukannya di struktur organisasi militer Jepang, Peta memiliki kedudukan yang lebih bebas atau fleksibel dan dalam hal kepangkatan ada orang Indonesia yang sampai mencapai perwira. Oleh karena itu, banyak di antara berbagai lapisan masyarakat yang tertarik untuk menjadi anggota Peta. Sampai akhir pendudukan Jepang, anggota Peta ada sekitar 37.000 orang di Jawa dan sekitar 20.000 orang di Sumatra. Di Sumatra namanya lebih terkenal dengan *Giyugun* (prajurit-prajurit sukarela). Orang-orang Peta inilah yang akan banyak berperan di bidang ketentaraan di masa-masa berikutnya. Beberapa tokoh terkenal di dalam Peta, antara lain Supriyadi dan Sudirman.

Memahami uraian tentang pendudukan Jepang seperti diterangkan di depan, menunjukkan bahwa Jepang sebenarnya memerintah dengan otoriter, bersifat tirani. Semua organisasi yang dibentuk diarahkan untuk kepentingan perang. Oleh karena itu, program pendidikan bersifat militer.

KESIMPULAN

1. *Organisasi pergerakan di zaman pendudukan Jepang berdiri karena prakarsa Jepang.*

2. *Ada organisasi yang kooperatif, tetapi ada gerakan bawah tanah.*

3. *Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan misalnya Gerakan Tiga A, Putera, dan Jawa Hokokai.*

4. *Organisasi bersifat militer dan semimiliter antara lain: Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, Heiho, dan Peta.*

5. *Sifat pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia cenderung otoriter dan bersifat tirani.*

6. *Meskipun zaman pendudukan Jepang disebut sebagai zaman edan oleh orang-orang Jawa (lihat Ben Anderson,* Java in a Time at Revolution, *bab I), namun mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi pertumbuhan nasionalisme Indonesia, khususnya dalam penyebarluasan bahasa Indonesia. Selain itu, peran pemuda makin meningkat serta keyakinan bahwa bangsa Indonesia pun bisa maju seperti Jepang jika mau belajar.*

LATIH UJI KOMPETENSI

1. Bagaimana penilaianmu tentang organisasi pergerakan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang? Terdapat dua model strategi, ada yang bersifat kooperatif dengan Jepang, tetapi ada nonkooperatif atau gerakan bawah tanah. Jelaskan secara kritis!

2. Dalam pelaksanaan pemerintahan, wilayah Indonesia dibagi-bagi dari tingkat karesidenan sampai desa. Mengapa dan apa alasan Jepang?

3. Bagaimana penilaianmu berhasilkah taktik Jepang untuk menguasai Indonesia dengan berbagai propaganda, "Jepang saudara tua", Pan-Asia dengan "Gerakan Tiga A"?

4. Mengapa Jepang begitu semangat untuk membentuk organisasi-organisasi militer dan semimiliter di Indonesia?

5. Bagaimana sifat pendudukan Jepang di Indonesia?

6. Bagaimana pandangan dan penilaianmu tentang sikap tokoh-tokoh Indonesia yang mau duduk sebagai pengurus dan anggota dari berbagai organisasi pergerakan yang dibentuk Jepang? Apakah luntur semangat nasionalismenya? Jelaskan!

Tugas

Buatlah karya tulis tentang kisah sejarah dengan Tema: Jepang "Saudara Tua".

1. Kamu dapat mencari koran, majalah, atau buku-buku yang mendukung untuk membuat karya tulis tersebut.

2. Dapat juga kamu mencari seorang narasumber, yang mengalami hidup pada masa pendudukan Jepang di daerah sekitar tempat tinggalmu untuk diwawancarai.

3. Sebelum melakukan wawancara:

    a. Buatlah daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan!

    b. Bawalah buku catatan atau alat perekam untuk merekam informasi saat berlangsungnya wawancara!

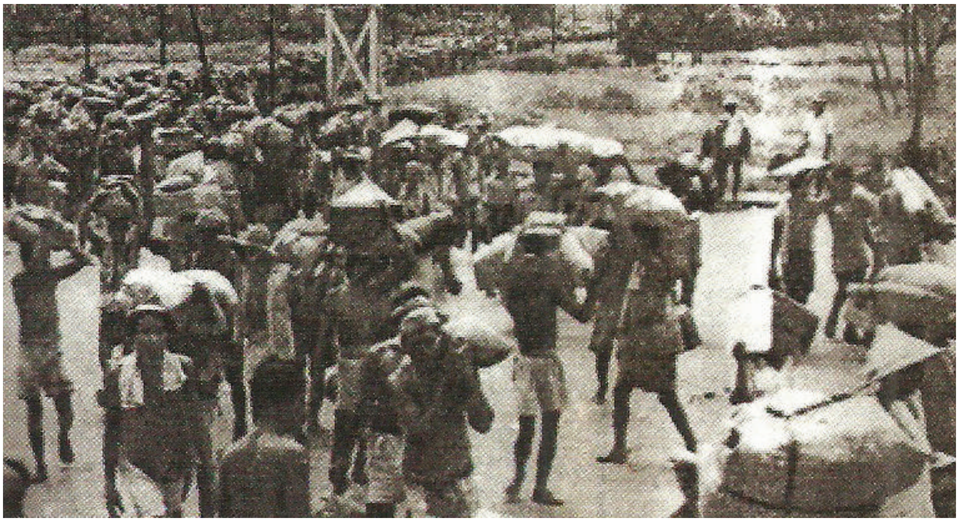
    c. Jangan lupa membawa kamera untuk melakukan pendokumentasian yang sekiranya kamu anggap penting!

    d. Setelah wawancara, buatlah transkrip hasil wawancaramu!

    e. Kemudian, buatlah laporan dalam bentuk esai sekitar 10 halaman!

C. Pengerahan dan Penindasan Versus Perlawanan

Mengamati Lingkungan



Sumber: Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 6 (Perang dan Revolusi), 2012.
Gambar 5.10 Pengerahan romusa yang sedang bekerja.

» *Coba amati baik-baik gambar atau ilustrasi di atas!*

1. *Gambar apakah kira-kira?*
2. *Mengapa peristiwa seperti pada gambar itu terjadi?*
3. *Ya, gambar di atas menunjukkan sebuah fakta tentang romusa yang harus bekerja rodi di bawah kekejaman Jepang. Bagaimana penilaianmu tentang kenyataan itu bila kita lihat dari hakikat dan martabat sebagai manusia Indonesia?*

Di balik senyum manis dan propaganda yang menjanjikan, ternyata Jepang bertindak kejam. Jepang telah mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada untuk menopang perang yang sedang mereka hadapi untuk melawan Sekutu. Jepang juga menguras aset kekayaan yang dimiliki Indonesia untuk memenangkan perang dan melanjutkan industri di negerinya.

Nah, uraian berikut akan membahas mengenai kebijakan dan tindakan Jepang dalam mengerahkan semua kekuatan yang ada di Indonesia dan juga kekejaman Jepang dalam berbagai bentuk kerja paksa, serta kebijakan-kebijakan lain yang menyakitkan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika kemudian muncul berbagai perlawanan.

Memahami Teks

1. Ekonomi Perang

Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep "Ekonomi perang". Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Perlu dipahami bahwa sebelum memasuki PD II, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang. Sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industrinya. Meletusnya PD II pada hakikatnya merupakan wujud konkret dari ambisi dan semangat imperialisme masing-masing negara untuk memperluas daerah kekuasaannya. Oleh karena itu, pada saat berkobarnya PD II, Indonesia benar-benar menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan Jepang. Bahkan, Indonesia kemudian menjadi salah satu benteng pertahanan Jepang untuk membendung gerak laju kekuatan tentara Serikat dan melawan kekuatan Belanda.

Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut *self help.* Hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Kebijakan Jepang itu juga sering disebut dengan Ekonomi Perang. Untuk lebih jelasnya perlu dilihat bagaimana tindakan-tindakan Jepang dalam bidang ekonomi di Indonesia. Ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintahan Belanda tidak lagi populer.

Pada waktu Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, ternyata tentara Hindia Belanda telah membumihanguskan objek-objek vital yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Jepang mengalami kesulitan dalam upaya menguasai Indonesia. Akibat dari pembumihangusan itu, keadaan perekonomian di Indonesia menjadi lumpuh pada awal pendudukan Jepang. Sehubungan dengan keadaan tersebut, langkah pertama yang diambil Jepang adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi. Beberapa prasarana seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki. Kemudian beberapa peraturan yang mendukung program pengawasan kegiatan ekonomi dikeluarkan termasuk ditetapkannya peraturan pengendalian kenaikan harga. Bagi mereka yang melanggar, akan dijatuhi hukuman berat.

» *Apa yang dimaksud dengan Ekonomi Perang itu? Coba jelaskan!*

Sementara itu, bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa (yang merupakan pusat perdagangan dunia). Karena tidak perlu memperdagangkan hasil perkebunan yang laku di pasaran dunia, seperti tebu (gula), tembakau, teh, dan kopi, maka Jepang tidak lagi mengembangkan jenis tanaman tersebut. Bahkan tanah-tanah perkebunan diganti menjadi tanah pertanian sesuai dengan kebutuhan Jepang. Tanah-tanah itu diganti dengan tanaman padi untuk menghasilkan bahan makanan dan bahan-bahan lain yang sangat dibutuhkan, misalnya jarak. Tanaman jarak waktu itu sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai minyak pelumas mesin-mesin, termasuk mesin pesawat terbang. Tanaman kina juga sangat dibutuhkan, yaitu untuk membuat obat antimalaria, sebab penyakit malaria sangat mengganggu dan melemahkan kemampuan tempur para prajurit. Pabrik obat yang sudah ada di Bandung sejak zaman Belanda terus dihidupkan. Tanaman tebu di Jawa juga mulai dikurangi. Pabrik-pabrik gula sebagian besar mulai ditutup. Penderesan getah karet di Sumatera mulai dihentikan. Tanaman-tanaman tembakau, teh, dan kopi di berbagai tempat dikurangi. Oleh karena itu, pada masa Jepang ini, hasil-hasil perkebunan sangat menurun. Produksi karet juga turun menjadi seperlimanya produksi tahun 1941. Pada tahun 1943 produksi teh turun menjadi sepertiganya dari zaman Hindia Belanda. Beberapa pabrik tekstil juga mulai ditutup karena pengadaan kapas dan benang begitu sulit. Dalam bidang transportasi, Jepang merasakan kekurangan kapal-kapal. Oleh karena itu, Jepang terpaksa mengadakan industri kapal angkut dari kayu. Jepang juga membuka pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat, tetapi semua usaha itu tidak berkembang lancar karena kekurangan suku cadang.

Kebutuhan pangan untuk menopang perang semakin meningkat, sehingga kegiatan penanaman untuk menghasilkan bahan pangan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, organisasi Jawa Hokokai giat melakukan kampanye untuk meningkatkan usaha pengadaan pangan terutama beras dan jagung. Tanah pertanian baru, bekas perkebunan dibuka untuk menambah produksi beras. Di Sumatra Timur, daerah bekas perkebunan yang luasnya ribuan hektar ditanami kembali sehingga menjadi daerah pertanian baru. Di tanah Karo juga dibuka lahan pertanian baru dengan menggunakan tenaga para tawanan. Di Kalimantan dan Sulawesi juga dibuka tanah pertanian baru untuk menambah hasil beras. Untuk kepentingan penambahan lahan pertanian ini, Jepang melakukan penebangan hutan secara liar dan besar-besaran. Di Pulau Jawa dilakukan penebangan hutan secara liar sekitar 500.000 hektar. Penebangan hutan secara liar dan berlebihan tersebut mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga timbullah erosi dan banjir pada musim penghujan. Penebangan hutan secara liar tersebut juga berdampak pada berkurangnya sumber mata air. Dengan demikian, sekalipun tanah pertanian semakin luas, tetapi kebutuhan pangan tetap tidak tercukupi.

» *Bagaimana pendapat kamu tentang kebijakan Jepang tentang penebangan hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan pertanian sebagau paya menambah bahan pangan!*

Pemerintahan Jepang juga membuat berbagai kebijakan dalam bidang pertanian. Kebijakan itu diantaranya yaitu kebijakan untuk "wajib serah padi". Kebijakan ini menjadikan Jawa sebagai "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya". Kebijakan ini melibatkan seluruh Asia Tenggara serta Asia Timur. Juga kebijakan dalam penanaman jenis-jenis tanaman baru, seperti kapas, yute-rosela, rami, dan jarak. Keadaan ini semakin menambah beban bagi pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk mengatasi keadaan ini kemudian pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat yang terkait dengan produksi padi.

a) Padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Hanya pemerintah Jepang yang berhak mengatur untuk produksi, pungutan dan penyaluran padi serta menentukan harganya. Dalam kaitan ini Jepang telah membentuk badan yang diberi nama *Shokuryo Konri Zimusyo* (Kantor Pengelolaan Pangan).
b) Penggiling dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri, harus diatur oleh Kantor Pengelolaan Pangan.

c) Para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah Jepang. Begitu juga padi harus diserahkan ke penggilingan padi yang sudah ditunjuk pemerintah Jepang. Dalam hal ini, berlaku ketentuan hasil keseluruhan produksi, petani berhak 40%, kemudian 30% disetor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk, dan 30% sisanya untuk persiapan bibit dengan disetor ke lumbung desa.

Selama pendudukan Tirani Jepang kehidupan petani semakin merosot. Mereka tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya sebagai petani. Karena hasil pertaniannya harus dijual dengan harga yang sudah ditentukan Jepang (boleh dikatakan diserahkan kepada penguasa Jepang), sehingga kehidupannya menjadi semakin menderita. Sebelum panen petani harus melaporkan kepada *kucho* (kepala desa). *Kucho* inilah yang menjadi ujung tombak pengumpulan hasil panen dari petani. Hasil panen itu ditimbang dengan ukuran "kintalan" (atau kuintal yang sama dengan 100 kg), pada hal sebelumnya menggunakan ukuran *dacin* (satu *dacin* kira-kira 65 kg) (Her Suganda, *Rengasdengklok*, 2009)



Sumber : Sejarah Nasional Indonesia VI, 1984 .
Gambar 5.11. Pengangkutan hasil padi yang akan dijual dan diserahkan kepada Jepang

Dalam rangka mengendalikan kebijakan di bidang ekonomi, maka semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai oleh Jepang dan di bawah pengawasan yang sangat ketat. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian di bidang perkebunan. Perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti dengan tanaman yang sesuai untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah *Meiji Seito Kaisya.* Akibat kebijakan Jepang ini, tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia terus merosot.

Dengan diterapkannya kebijakan ekonomi perang itu, ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintahan Hindia Belanda tidak begitu populer. Bahkan bank-bank yang pernah dikembangkan pemerintah Hindia Belanda dilikuidasi. Semua aset bank disita. Selanjutnya, pada bulan April 1942, diumumkan suatu banking-moratorium tentang adanya penangguhan pembayaran kewajiban-kewajiban bank. Beberapa bulan kemudian, pimpinan tentara Jepang untuk Pulau Jawa, yang berada di Jakarta, mengeluarkan ordonansi berupa perintah likuidasi untuk seluruh bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina. Ordonansi serupa juga dikeluarkan oleh komando militer Jepang di Singapura untuk bank-bank di Sumatera, sedangkan kewenangan likuidasi bank-bank di Kalimantan dan *Great East* diberikan kepada *Navy Ministry* di Tokyo.

Fungsi dan tugas bank-bank yang dilikuidasi tersebut, kemudian diambil alih oleh bank-bank Jepang, seperti *Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank,* dan *Mitsui Bank*, yang pernah ada sebelumnya dan ditutup oleh Belanda ketika mulai pecah perang. Sebagai bank sirkulasi di Pulau Jawa, *Javache Bank* dilikuidasi dibentuklah *Nanpo Kaihatsu Ginko* yang melanjutkan tugas tentara pendudukan Jepang dalam mengedarkan *invansion money* yang dicetak di Jepang dalam tujuh denominasi, mulai dari satu hingga sepuluh gulden.Uang Belanda kemudian digantikan oleh uang Jepang.

» *Dengan berbagai ketentuan pemerintah Jepang tersebut, coba bandingkan dengan kegiatan monopoli yang dilakukan pada zaman Hindia Belanda! Adakah persamaannya? Coba lakukan telaah kritis tentang hal itu!*

2. Pengendalian di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama, sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah.

Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti (*kinrohosyi*). Kegiatan kerja bakti itu meliputi, pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang *(Nippon Seishin)*. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu *Kimigayo,* menghormati bendera *Hinomaru* dan melakukan gerak badan *(taiso)* serta *seikerei.*

Akibat keputusan pemerintah Jepang tersebut, membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh *Putera.* Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Kemunduran pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan. Banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semimiliter sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah. Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk pembentukan kader-kader yang memelopori program Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi kejepangan.

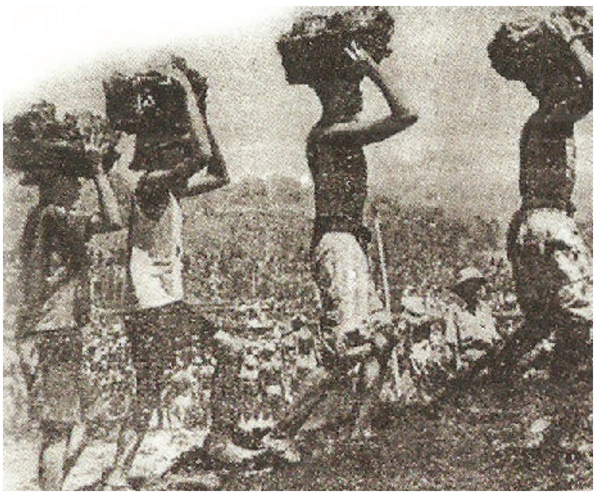
» *Coba pikirkan baik-baik, mengapa Jepang melakukan pembatasan dan pengendalian pendidikan di Indonesia?*

3. Pengerahan Romusa

Berbagai kebijakan dan tindakan Jepang seperti disebutkan di atas telah membuat penderitaan rakyat. Rakyat petani tidak dapat berbuat banyak kecuali harus tunduk kepada praktik-praktik tirani Jepang. Penderitaan rakyat ini semakin dirasakan dengan adanya kebijakan untuk pengerahan tenaga romusa. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan romusa? Coba cari jawabnya!

Perlu diketahui bahwa untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya, kemudian di kota-kota dibentuk barisan romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut *Romukyokai*, yang ada di setiap daerah.

Rakyat yang dijadikan romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya, rakyat Indonesia melakukan tugas romusa secara sukarela, sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga. Sebab, rakyat sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang sehingga rakyat rela membantu untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Oleh karena itu, di beberapa kota pernah terdapat beberapa romusa yang sifatnya sementara dan sukarela. Romusa sukarela terdiri atas para pegawai yang bekerja (tidak digaji) selama satu minggu di suatu tempat yang penting. Salah satu contoh ada rombongan dari Jakarta dipimpin oleh Sukarno. Para pekerja sukarela ini bekerja dalam



Sumber: Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 6 (Perang dan Revolusi), 2012.
Gambar 5.12 Romusa sedang bekerja.

suasana yang disebut "Pekan Perjuangan Mati-Matian". Akan tetapi, lama-kelamaan karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela ini oleh pemerintah Jepang diubah menjadi sebuah keharusan dan paksaan.

Rakyat Indonesia yang menjadi romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh, tanpa mengenal perikemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang, tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Padahal mereka melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan banyak asupan makanan dan istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka tidak terurus. Tidak jarang di antara mereka jatuh sakit bahkan mati kelaparan.

Untuk menutupi kekejamannya dan agar rakyat merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943, Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai romusa. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang memberi julukan mereka yang menjadi romusa itu sebagai "Pejuang Ekonomi" atau "Pahlawan Pekerja". Para romusa itu diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada periode itu sudah sekitar 300.000 tenaga romusa dikirim ke luar Jawa. Bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Birma, Muangthai, Vietnam, Serawak, dan Malaya. Sebagian besar dari mereka ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat kerja, tetapi kebanyakan mereka mati di tempat kerja.

Bagaimana dampak dari kebijakan dan tindakan Jepang tersebut?

Yang jelas penderitaan rakyat tidak berkurang tetapi justru semakin bertambah. Kehidupan rakyat benar-benar menyedihkan. Bahan makanan sulit didapatkan karena banyak petani yang menjadi pekerja romusa. Gelandangan di kota-kota besar makin tumbuh subur, seperti di kota Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Akibatnya, barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Masyarakat hidup dalam kesulitan. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Penderitaan rakyat Indonesia semakin tidak tertahankan.

» *Coba lakukan refleksi, bagaimana perasaan dan penilaianmu terkait dengan praktik romusa itu!*

4. Perang Melawan Sang Tirani

Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah Kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh *kempetai* (polisi militer Jepang). Pada masa pendudukan Jepang banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, ternyata hanya dipaksa untuk melayani para *kempetai*. Para gadis dan perempuan itu disekap dalam kamp-kamp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kamp-kamp itu dapat kita temukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kondisi itu menambah deretan penderitaan rakyat di bawah kendali penjajah Jepang. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian timbul berbagai perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.

a. Aceh Angkat Senjata

Salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawananan rakyat yang terjadi di Cot Plieng yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Cot Plieng, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap romusa, maka rakyat Cot Plieng melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Cot Plieng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan pendudukan Jepang.

Di Lhokseumawe, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Cot Plieng. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun, Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai itu. Karena Abdul Jalil menolak jalan damai, pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Cot Plieng.

Kemudian, pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942, saat rakyat sedang menjalankan ibadah salat subuh. Karena diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Rakyat dengan bersenjatakan pedang dan kelewang, bertahan bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan tentara Jepang diulang untuk yang kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan oleh rakyat. Kekuatan Jepang semakin ditingkatkan. Kemudian, Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Cot Plieng, setelah Jepang membakar masjid. Banyak rakyat pengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh Blang Ara*.* Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan salat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya.

Kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas sehingga muncul perlawanan di Jangka Buyadi bawah pimpinan perwira *Gyugun* Abdul Hamid. Dalam situasi perang yang meluas ke berbagai tempat, Jepang mencari cara yang efektif untuk menghentikan perlawanan Abdul Hamid. Jepang menangkap dan menyandera semua anggota keluarga Abdul Hamid. Dengan berat hati akhirnya Abdul Hamid mengakhiri perlawanannya. Berikutnya perlawanan rakyat berkobar di Pandrah Kabupaten Bireuen. Perlawanan disebabkan oleh masalah penyetoran padi dan pengerahan tenaga romusa. Kerja paksa yang diadakan Jepang terlalu memakan waktu panjang sehingga para petani hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggarap sawah. Di samping itu, Jepang menancapi bambu runcing di sawah-sawah dengan maksud agar tidak dapat digunakan Sekutu untuk mendaratkan pasukan payungnya. Tindakan Jepang itu sangat merugikan rakyat. Fakta yang memberatkan lagi, Jepang juga memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil panennya sebanyak 50 – 80%.

» *Kamu telah mempelajari bagaimana perjuangan rakyat Aceh dalam memerangi kekejaman Jepang. Pelajaran apa yang kamu peroleh sehingga kita dapat menjalani hidup yang lebih baik?*

b. Perlawanan di Singaparna

Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat, yang rakyatnya dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Rakyat Singaparna sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, rakyat Singaparna sangat benci terhadap pendudukan Jepang, apalagi ketika mengetahui perilaku pemerintahan Jepang yang sangat kejam. Kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang banyak dianut oleh masyarakat Singaparna. Atas dasar pandangan dan ajaran Islam, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Perlawanan itu juga dilatarbelakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita.

Pengerahan tenaga romusa dengan paksa dan di bawah ancaman ternyata sangat mengganggu ketenteraman rakyat. Para romusa dari Singaparna dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa. Mereka umumnya tidak kembali karena menjadi korban keganasan alam maupun akibat tindakan Jepang yang tidak mengenal perikemanusiaan. Mereka banyak yang meninggal tanpa diketahui di mana kuburnya. Selain itu, rakyat juga diwajibkaan menyerahkan padi dan beras dengan aturan yang sangat menjerat dan menindas rakyat, sehingga penderitaan terjadi di mana-mana. Kemudian secara khusus rakyat Singaparna di bawah Kiai Zainal Mustafa menentang keras untuk melakukan *seikeirei*. Itulah sebabnya rakyat Singaparna mengangkat senjata melawan Jepang.

Perlawanan meletus pada bulan Februari, 1944. Perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, seorang *ajengan* di Sukamanah, Singaparna. Ia adalah pendiri Pesantren Sukamanah. Pendiri pesantren Sukamanah ini tidak mau kerja sama dengan Jepang. Ia sangat menentang kebijakan-kebijakan Jepang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan Zainal Mustafa secara diam-diam telah membentuk "Pasukan Tempur Sukamanah" yang dipimpin oleh *ajengan* Najminudin.



Sumber: Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia 1918-193, 2003.
Gambar 5.13 Kiai Zainal Mustafa.

Kiai Zainal Mustafa memulai pertempuran pada salah satu hari Jumat di bulan Februari 1944. Sebelum perang itu dimulai, ada beberapa utusan dari kepolisian Tasikmalaya dan beberapa orang Indonesia yang ingin mengadakan perundingan dengan Zainal Mustafa. Namun, polisi Jepang itu dilucuti senjatanya dan ditahan oleh pengikut Zainal Mustafa. Kemudian ada seorang polisi yang disuruh kembali ke Tasikmalaya untuk melaporkan yang baru saja terjadi dan menyampaikan ultimatum dari Kiai Zainal Mustafa kepada pihak Jepang agar besok segera memerdekakan Jawa dan jika tidak, maka akan terjadi pertempuran yang akan mengancam keselamatan orang-orang Jepang.

Hari berikutnya datang kembali rombongan utusan Jepang ke Sukamanah untuk mengadakan kembali perundingan dengan Zainal Mustafa. Akan tetapi, utusan Jepang itu bersikap congkak dan sombong untuk menunjukkan bahwa Jepang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih kuat. Hal ini menyulut kemarahan pengikut Zainal Mustafa, sehingga utusan Jepang itu pun dilucuti senjatanya dan ditangkap bahkan ada yang dibunuh, sementara ada juga yang berhasil melarikan diri. Setelah kejadian ini, Jepang mengirimkan pasukan ke Sukamanah, yang terdiri dari 30 orang *kempetai* dan 60 orang polisi negara istimewa *(tokubetsu keisatsu)* dari Tasikmalaya dan Garut. Pertempuran terjadi lebih kurang satu jam di kampung Sukamanah. Pihak rakyat menyerang dengan mempergunakan pedang dan bambu runcing yang diikuti dengan teriakan takbir. Zainal Mustafa dengan pengikutnya bertempur mati-matian untuk menghadapi gempuran dari pihak Jepang. Karena jumlah pasukan yang lebih besar dan peralatan senjata yang lebih lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa. Dalam pertempuran ini banyak berguguran para pejuang Indonesia. Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar. Selanjutnya Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 1944, mereka dihukum mati. Sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal.

c. Perlawanan di Indramayu

Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Latar belakang dan sebab-sebab perlawanan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Singaparna. Para petani dan rakyat Indramayu pada umumnya hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka harus menyerahkan sebagian besar

hasil padinya kepada Jepang. Tentu kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat. Begitu juga kebijakan untuk mengerahkan tenaga romusa juga terjadi di Indramayu, sehingga semakin membuat rakyat menderita.

Perlawanan rakyat Indramayu antara lain terjadi di Desa Kaplongan, Distrik Karangampel pada bulan April 1944. Kemudian pada bulan Juli, muncul pula perlawanan rakyat di Desa Cidempet, Kecamatan Lohbener. Perlawanan tersebut terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan. Rakyat yang baru saja memanen padinya harus langsung dibawa ke balai desa. Setelah itu, pemilik mengajukan permohonan kembali untuk mendapat sebagian padi hasil panennya. Rakyat tidak dapat menerima cara-cara Jepang yang demikian. Rakyat protes dan melawan. Mereka bersemboyan "lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan". Setelah kejadian tersebut, maka terjadilah perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat. Namun, sekali lagi rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan yang lengkap. Rakyat telah menjadi korban dalam membela bumi tanah airnya.

» *Demikian beberapa perlawanan yang dilakukan untuk melawan tirani Jepang, baik di Singaparna maupun di Indramayu. Bagaimana penilaianmu tentang perjuangan rakyat Indonesia? Bagaimana penilaianmu tentang semboyan: "lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan?"*

d. Rakyat Kalimantan Angkat Senjata

Perlawanan rakyat terhadap kekejaman Jepang terjadi di banyak tempat. Begitu juga di Kalimantan, terjadi peristiwa yang hampir sama dengan yang terjadi di Jawa dan Sumatera. Rakyat melawan Jepang karena himpitan penindasan yang dirasakan sangat berat. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pang Suma, seorang pemimpin Suku Dayak. Pemimpin Suku Dayak ini memiliki pengaruh yang luas di kalangan orang-orang atau suku-suku dari daerah Tayan, Meliau, dan sekitarnya.

Pang Suma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Walaupun mereka hanya berjumlah sedikit, tetapi dengan bantuan rakyat yang militan dan dengan memanfaatkan keuntungan alam



Sumber: Museum Naskah Perumusan Proklamasi.
Gambar 5.14 Kedatangan tentara Jepang di Borneo Februari 1942.

berupa rimba belantara, sungai, rawa, dan daerah yang sulit ditempuh—perlawanan berkobar dengan sengitnya. Namun, harus dipahami bahwa di kalangan penduduk juga berkeliaran para mata-mata Jepang yang berasal dari orang-orang Indonesia sendiri. Lebih menyedihkan lagi, para mata-mata itu juga tidak segan-segan menangkap rakyat, melakukan penganiayaan, dan pembunuhan, baik terhadap orang-orang yang dicurigai atau bahkan terhadap saudaranya sendiri. Adanya mata-mata inilah yang sering membuat perlawanan para pejuang Indonesia dapat dikalahkan oleh penjajah. Demikian juga perlawanan rakyat yang dipimpin Pang Suma di Kalimantan ini akhirnya mengalami kegagalan.

e. Perlawanan Rakyat Irian Barat

Pada masa pendudukan Jepang, penderitaan juga dialami oleh rakyat di Irian Barat. Mereka mendapat pukulan dan penganiayaan yang sering di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, wajar jika kemudian mereka melancarkan perlawanan terhadap Jepang.

Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah "Gerakan Koreri" yang berpusat di Biak dengan pemimpinnya bernama L. Rumkorem. Biak merupakan pusat pergolakan untuk melawan pendudukan Jepang. Rakyat Irian memiliki semangat juang pantang menyerah, sekalipun Jepang sangat kuat, sedangkan rakyat hanya menggunakan senjata seadanya untuk

melawan. Rakyat Irian terus memberikan perlawanan di berbagai tempat. Mereka juga tidak memiliki rasa takut. Padahal kalau ada rakyat yang tertangkap, Jepang tidak segan-segan memberi hukuman pancung di depan umum. Namun, rakyat Irian tidak gentar menghadapi semua itu. Mereka melakukan taktik perang gerilya. Tampaknya, Jepang cukup kewalahan menghadapi keberanian dan taktik gerilya orang-orang Irian. Akhirnya, Jepang tidak mampu bertahan menghadapi para pejuang Irian tersebut. Jepang akhirnya meninggalkan Biak. Oleh karena itu, dapat dikatakan Pulau Biak ini merupakan daerah bebas dan merdeka yang pertama di Indonesia.

Ternyata perlawanan di tanah Irian ini juga meluas ke berbagai daerah, dari Biak kemudian ke Yapen Selatan. Salah seorang pemimpin perlawanan di daerah ini adalah Silas Papare. Perlawanan di daerah ini berlangsung sangat lama bahkan sampai kemudian tentara Jepang dikalahkan Sekutu. Setelah berjuang bergerilya dalam waktu yang sangat lama, rakyat Yape Selatan mendapatkan bantuan senjata dari Sekutu, bantuan senjata itu membantu rakyat Yape Selatan untuk mengalahkan Jepang. Hal tersebut menunjukkan bagaimana keuletan rakyat Irian dalam menghadapi kekejaman pendudukan Jepang.

f. Peta di Blitar Angkat Senjata

Pada masa pendudukan Jepang penderitaan rakyat sangat berat. Tidak ada sedikit pun dari pemerintah pendudukan Jepang yang memikirkan kehidupan rakyat yang diperintahnya.Yang ada pada benak Jepang adalah memenangkan perang dan upaya mempertahankan Indonesia dari serangan Sekutu. Namun, justru rakyat yang dikorbankan. Rakyat menjadi semakin menderita. Penderitaan demi penderitaan ini mulai terlintas di benak Supriyadi seorang *Shodanco* Peta. Tumbuhlah semangat dan kesadaran nasional, sehingga timbul rencana untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang.

Sebagai komandan Peta, Supriyadi cukup memahami bagaimana penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan Jepang. Masalah pengumpulan hasil padi, pengerahan romusa, semua dilakukan secara paksa dengan tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, sungguh kekejaman yang luar biasa. Hal semacam ini juga dirasakan Supriyadi dan kawan-kawannya di lingkungan Peta. Mereka kerap menyaksikan sikap congkak dan sombong dari para *syidokan* yang melatih mereka.

Para pelatih Jepang sering merendahkan para prajurit bumiputra. Hal ini menambah rasa sakit hati sekaligus rasa benci pasukan Supriyadi terhadap pemerintahan Jepang di Indonesia. Penderitaan rakyat itulah yang menimbulkan rencana para anggota Peta di Blitar untuk melancarkan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Rencana perlawanan itu tampaknya sudah bulat tinggal menunggu waktu yang tepat. Dalam perlawanan Peta tersebut, direncanakan akan melibatkan rakyat dan beberapa kesatuan lain.

Apa pun yang terjadi, Supriyadi dengan teman-temannya sudah bertekad bulat untuk melancarkan serangan terhadap pihak Jepang. Pada tanggal 29 Februari 1945 dini hari, Supriyadi dengan teman-temannya mulai bergerak. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat dari *daidan*, lalu keluar dengan bersenjata lengkap. Setelah pihak Jepang mengetahui adanya gerakan penyerbuan itu, mereka segera mendatangkan pasukan yang semuanya orang Jepang. Pasukan Jepang juga dipersenjatai dengan beberapa tank dan pesawat udara. Mereka segera menghalau para anggota Peta yang mencoba melakukan perlawanan. Tentara Jepang mulai menguasai keadaan dan seluruh kota Blitar mulai dapat dikuasai. Pimpinan tentara Jepang kemudian menyerukan kepada segenap anggota Peta yang melakukan serangan, agar segera kembali ke induk kesatuan masing-masing.



Sumber: PETA: Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa dan Sumatera 1942-1945, 1996.
Gambar 5.15 Daidan Peta di Blitar.

Beberapa kesatuan mulai memenuhi perintah pimpinan tentara Jepang itu. Akan tetapi mereka yang kembali ke induk pasukannya memenuhi panggilan justru ditangkapi, ditahan, dan disiksa oleh polisi Jepang. Selanjutnya diserukan kepada anak buah Supriyadi agar menyerah dan kembali ke induk pasukannya. Kurang lebih setengah dari batalion Supriyadi memenuhi panggilan tersebut. Namun, pasukan yang lain tidak ingin kembali dan tetap setia melakukan perlawanan Peta yang dipimpin oleh Supriyadi. Mereka yang tetap melakukan perlawanan itu antara lain peleton pimpinan *Shodanco*, Supriyadi, dan Muradi. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan Distrik Pare.

Untuk menghadapi perlawanan Peta di bawah pimpinan Supriyadi, Jepang mengerahkan semua pasukannya dan mulai memblokir serta mengepung pertahanan pasukan Peta tersebut. Namun, pasukan Supriyadi tetap bertahan. Mengingat semangat, tekad, dan keuletan pasukan Supriyadi dan Muradi tersebut, maka Jepang mulai menggunakan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang Kolonel Katagiri berpura-pura menyerah kepada pasukan Muradi. Kolonel Katagiri kemudian bertukar pikiran dengan anggota pasukan Peta dengan lemah lembut, penuh kesantunan, sehingga hati para pemuda yang telah memuncak panas itu bisa membalik menjadi dingin kembali.

Kolonel Katagiri berhasil mengadakan persetujuan dengan mereka. Para pemuda Peta yang melancarkan serangan bersedia kembali ke *daidan* beserta senjata-senjatanya. Katagiri menjanjikan, bahwa segala sesuatu akan dianggap soal interen *daidan*, dan akan diurus oleh *Daidanco* Surakhmad. Mereka akan diterima kembali dan tidak akan dibawa ke depan pengadilan militer. Dengan hasil kesepakatan itu, maka pada suatu hari kira-kira pukul delapan malam *Shodanco* Muradi tiba bersama pasukannya kembali ke *daidan*. Di sini sudah berderet barisan para perwira di bawah pimpinan *Daidanco* Surahmad. Sejenak kemudian *Shodanco* Muradi maju, lapor kepada *Daidanco* Surakhmad, bahwa pasukannya telah kembali. Mereka juga menyatakan menyesal atas perbuatan melawan Jepang dan berjanji untuk setia kepada kesatuannya. Mereka tidak menyadari bahwa telah masuk perangkap, karena dari tempat-tempat yang gelap pasukan Jepang telah mengepung mereka. Mereka kemudian dilucuti senjatanya dan ditawan, diangkut ke Markas *Kempetai* Blitar. Ternyata Muradi yang sudah menyerah tetap diadili dan dijatuhi hukuman mati.

Kekuatan Peta ini di bawah Supriyadi ini semakin lemah. Tidak terlalu lama akhirnya perlawanan Peta di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi ini dapat dipadamkan. Tokoh-tokoh dan anggota Peta yang ditangkap kemudian diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta.

Setelah melalui beberapa kali persidangan, mereka kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peranan masing-masing dalam perlawanan itu. Ada yang mendapat pidana mati, ada yang seumur hidup, dan sebagainya. Mereka yang dipidana mati antara lain, dr. Ismail, Muradi yang sudah disebutkan di atas, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarno. Sementara itu, Supriyadi tidak jelas beritanya dan tidak disebut-sebut dalam pengadilan tersebut.

» *Kamu sudah mempelajari bagaimana perlawanan Peta di Blitar pimpinan Supriyadi. Bagaimana penilaianmu tentang sosok Supriyadi, adakah nilai-nilai yang perlu kita teladani? Bagaimana penilaianmu tentang taktik Jepang untuk menghadapi perlawanan Peta di bawah pimpinan Supriyadi?*

» *Perlawanan terhadap kekejaman Jepan tentu juga terjadi di berbagai daerah, termasuk sangat mungkin terjadi di lingkungan kamu. Coba kamu mencari informasi kira-kira peristiwa apa dan dimana yang terkait dengan penentangan terhadap kedatangan dan Jepang?*

KESIMPULAN

1. *Jepang telah melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Salah satunya kebijakan Ekonomi Perang, produk ekonomi yang semua diperuntukkan pemenangan Perang Asia Timur Raya.*

2. *Pengendalian pendidikan dan kebudayaan yang berdampak pada kemunduran bidang ekonomi, rakyat menjadi bodoh dan banyak buta huruf. Bidang seni dan budaya juga diawasi.*

3. *Untuk membantu pertahanan Jepang, pemerintah Tirani Jepang telah membentuk organisasi militer dan semimiliter yang direkrut dari para muda Indonesia.*

4. *Karena tindak kekejaman dan kesewenang-wenangan Jepang telah menimbulkan perlawanan di berbagai daerah.*

LATIH UJI KOMPETENSI

1. Mengapa Jepang menerapkan kebijakan "Ekonomi Perang"?

2. Apakah kamu tahu yang dimaksud dengan *seikeirei*? Jelaskan!

3. Bagaimana penilaianmu tentang pengerahan tenaga romusa oleh pemerintah pendudukan Jepang?

4. Bandingkan tentang kebijakan di bidang pendidikan antara zaman Pemerintahan Kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia!

5. Jelaskan tentang dampak dari kebijakan Jepang yang sewenang-wenang! Pelajaran apa yang kamu peroleh dari belajar tentang dampak kebijakan itu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan?

Tugas

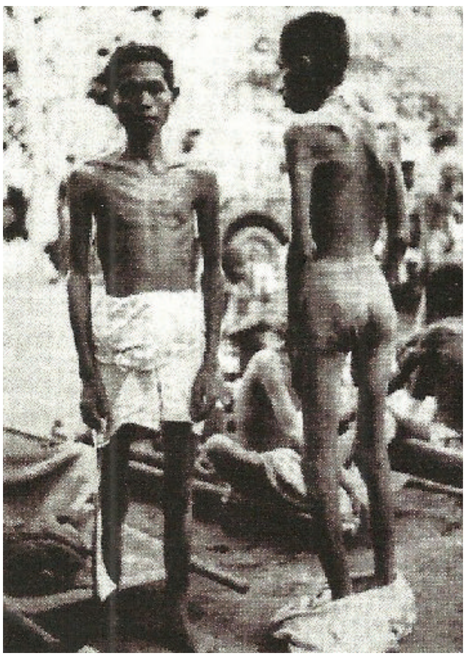
1. Coba amati berbagai situs atau pengaruh budaya yang terkait dengan kebijakan dan kekejaman Jepang di Indonesia yang ada di lingkungan kamu. Kemudian buatlah laporan telaah mu tentang hal itu?

2. Coba buatlah karya tulis dengan judul: "Romusa".

D. Drama Akhir Sang Tirani

Memahami Lingkungan

Apakah yang terlintas dalam pikiranmu, ketika kamu menanyakan alamat seseorang? Tentu kamu akan menanyakan di jalan apa, di Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berapakah orang tersebut tinggal. Dengan mengetahui lokasi RT dan RW akan mempermudah untuk menemukan alamat yang sedang dicarinya. Selain memudahkan pencarian alamat, apakah sebenarnya fungsi RT dan RW saat ini? Tentu keberadaan RT dan RW sekarang ini juga untuk mengordinasikan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan di lokasi tersebut. RT dan RW juga menjadi kepanjangan tangan dari Kelurahan atau Desa dan pemerintahan di atasnya, sehingga melalui RT informasi pemerintahan di tingkat kecamatan. Kabupaten, provinsi bahkan pemerintahan pusat dapat sampai ke penduduk di wilayah RT dan RW setempat.



Sumber: Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 6 (Perang dan Revolusi), 2012.

Gambar 5.16 Penderitaan rakyat, kelaparan rakyat terjadi di berbagai daerah.

Tetapi bagaimana keberadaan RT pada masa pendudukan Tirani Jepang? Istilah RT dan fungsinya ini memang diefektifkan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Namun tujuan keberadaan RT masa pendudukan Jepang untuk mematai-matai pribumi dalam kerja romusa atau dalam upaya menyerahkan hasil pertanian dan barang lain dari rakyat ke pada Jepang.

Dengan demikian RT dan RW mempunyai peranan yang cukup penting pada masa pendudukan Jepang. Saat itu Jepang membuat suatu kebijakan mengerahkan massa untuk bekerja lebih giat. Kerja itu kemudian menjurus ke

arah kerja paksa, atau yang kita kenal dengan romusa. Untuk melaksanakan tugas pengerahan massa dengan baik, maka dibentuklah *tonarigumi* (RT), merupakan organisasi sosial yang efektif untuk mengawasi pengerahan tenaga kerja rakyat. Karena tenaga sepenuhnya disediakan untuk kepentingan Jepang, rakyat sendiri menjadi tidak terurus, ditambah lagi harus melakukan kerja paksa, maka kehidupan rakyat semakin menderita. Coba amati gambar di halaman sebelumnya!

Memahami Teks

1. Akibat Pendudukan Jepang di Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan maupun di bidang birokrasi dan militer.

a. Bidang Politik

Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang, misalnya desa dengan *Ku,* kecamatan dengan *So,* kawedanan dengan *Gun*, kotapraja dengan *Syi,* kabupaten dengan *Ken,* dan karesidenan dengan *Syu.* Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan kearah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang Tenno Heika.

Seperti telah diterangkan di atas bahwa Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat yang meliputi Jawa-Madura berpusat di Batavia. Sementara itu di Sumatra berpusat di Bukittinggi, angkatan lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian, sebagai pusatnya di Ujungpandang. Pemerintahan itu berada dibawah pimpinan Panglima Tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat (Vietnam).

Jepang juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda, seperti Gerakan Tiga A dan Putera, tetapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan

nasional. Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943. Kebijakan politik Jepang yang sangat keras itu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia terutama kaum nasionalis untuk segera mewujudkan cita-cita mereka, yaitu Indonesia merdeka.

b. Keadaan Sosial-Budaya dan Ekonomi

Guna membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Mula-mula tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan romusa sebagai sarana propaganda. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang mulanya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Panitia pengerahan disebut dengan *Romukyokai,* yang ada disetiap daerah.

Para pekerja romusa itu diperlakukan dengan kasar dan kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan dan makan tidak diperhatikan. Banyak pekerja romusa yang jatuh sakit dan meninggal. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja romusa sebagai "pahlawan pekerja" atau "prajurit ekonomi". Mereka digambarkan sebagai sosok yang suci dalam menjalankan tugasnya. Para pekerja romusa itu juga dikirim ke Birma, Muangthai, Vietnam, Serawak, dan Malaya.

Saat itu kondisi masyarakat menyedihkan. Bahan makanan sulit didapat akibat banyak petani yang menjadi pekerja romusa. Gelandangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang jumlahnya semakin meningkat. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan.

Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi sangat ketat oleh Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah *Meiji Seito Kaisya.*

Masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jarak. Mereka melakukannya secara bergantian. Untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka dibentuklah *tonarigumi* (rukun tetangga) untuk memobilisasi massa dengan efektif.

Sementara itu, proses komunikasi antarkomponen bangsa di Indonesia mengalami kesulitan baik komunikasi antarpulau maupun komunikasi dengan dunia luar, karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan Bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Sementara itu, untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah pusat kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta, yang bernama *Keimun Bunka Shidosho*.

Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah Kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Seringkali rakyat yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh *kempetai* (polisi militer Jepang). Pada masa pendudukan Jepang banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, tetapi dipaksa menemani para *kempetai.* Para gadis dan perempuan tersebut disekap dalam kamp-kamp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kamp-kamp tersebut dapat ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat.

c. Pendidikan

Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan enam tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, *Kimigayo,* serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib.

Sementara itu, perguruan tinggi di tutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah Perguruan Tinggi Kedokteran (*Ika Daigaku*) di Jakarta dan Perguruan Tinggi Teknik (*Kogyo Daigaku)* di Bandung. Jepang juga membuka Akademi Pamong Praja (*Konkoku Gakuin*) di Jakarta, serta Perguruan Tinggi Hewan di Bogor. Pada saat itu, perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran.

Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinasasi. Menurut Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Namun, bagi bangsa Indonesia tugas berat itu merupakan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan.

Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan Heiho atau sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan *Seinendan* dan Keibodan (pembantu polisi). Mereka dilatih baris berbaris dan perang meskipun hanya bersenjatakan kayu. Dalam *Seinendan* mereka dijadikan barisan pelopor atau *suisintai.* Barisan pelopor itu mendapat pelatihan yang berat. Latihan militer itu kelak sangat berguna bagi bangsa kita.

d. Birokrasi dan Militer

Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya UU no. 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan UU No. 28 tentang Aturan Pemerintah *Syu* dan *Tokubetshu Syi*, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga

sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi pemerintahan Jepang, yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan.

Sesuai dengan undang-undang itu, seluruh kota di Jawa dan Madura, kecuali Solo dan Yogyakarta, dibagi atas *syu, syi, ken, gun, son*, dan *ku.* Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang, daerah pemerintahan yang tertinggi, yaitu *Syu.* Meskipun luas wilayah *Syu* sebesar keresidenan, namun fungsinya berbeda. Apabila residen merupakan pembantu gubernur, maka *Syu* adalah pemerintah otonomi di bawah *shucokan* yang berkedudukan sama dengan gubernur. Pada masa pendudukan Jepang juga dibentuk *Chou Sangi- in* yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan *Volksraad*. Dalam *Volksraad* masih dapat dilakukan kritik pemerintah dengan bebas. Sementara *Chou Sangi In* tidak dapat melakukan hal itu.

Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang yaitu rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan keamanan. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer. Mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer, dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi Sekutu. Oleh karena itulah, mereka melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Bekas pasukan Peta itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

2. Janji Kemerdekaan

Pada tahun 1944, Jepang terdesak, Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Jenderal Hideki Tojo pun kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso sebagai perdana menteri. Angkatan udara Sekutu yang di Morotai pun mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang dalam melawan Sekutu.



Sumber: Pancasila : Nilai Budaya, Ideologi Bangsa dan Harapan Kita, 2009.
Gambar 5.17 Rakyat menyambut janji kemerdekaan dari Jepang.

Sementara itu, Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan (September 1944). Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Sejak itu pula Jepang mulai mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk pertahanan. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh. Pada saat itu suasana kemerdekaan terasa semakin dekat.

Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P Suroso sebagai wakil ketua merangkap kepala Tata Usaha dan seorang Jepang sebagai wakilnya Tata Usaha, yaitu Masuda Toyohiko dan Mr. R. M. Abdul Gafar Pringgodigdo. Semua anggotanya terdiri dari 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia, ditambah tujuh orang Jepang yang tidak punya suara.

Sidang BPUPKI dilakukan dua tahap, tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut dilakukan di Gedung *Chou Shangi In* di Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada masa penjajahan Belanda gedung ini digunakan sebagai gedung *Volksraad.* Meskipun badan itu dibentuk oleh pemerintah militer Jepang, jalannya persidangan baik wakil ketua maupun anggota istimewa dari kebangsaan Jepang tidak pernah terlibat dalam pembicaraan persiapan kemerdekaan. Semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan Indonesia merupakan urusan pemimpin dan anggota dari Indonesia.

Pada pidato sidang BPUPKI, Radjiman menyampaikan pokok persoalan mengenai Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10-11 Juni 1945, dibahas dan

dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Dalam kata pembukaannya Rajiman Wedyodiningrat meminta pandangan kepada para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Orang-orang yang membahas mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Sukarno

Dalam sidang pertama, Sukarno mendapat kesempatan berbicara dua kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Namun pada saat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Radjiman, selama dua hari berlangsung rapat, belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Menanggapi hal itu, pada tanggal 1 Juni pukul 11.00 WIB, Sukarno menyampaikan pidato pentingnya dasar negara dan landasan filosofi dari suatu negara merdeka. Pada saat itu, Gedung *Chuo Shangi In* mendapat penjagaan ketat dari tentara Jepang. Sidang saat itu dinyatakan tertutup, hanya beberapa wartawan dan orang tertentu yang diizinkan masuk. Dalam pidatonya, Sukarno mengusulkan dasar-dasar negara. Pada mulanya Sukarno mengusulkan Panca Dharma. Nama Panca Dharma dianggap tidak tepat, karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan yang dimaksudkan adalah dasar. Sukarno kemudian meminta saran pada seorang teman, yang mengerti bahasa, sehingga dinamakan dengan Pancasila. Pancasila, sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan Negara Indonesia, supaya kekal dan abadi.

Pidato Sukarno itu mendapat sambutan sangat meriah, tepukan tangan para peserta, suatu sambutan yang belum pernah terjadi selama persidangan BPUPKI. Para wartawan mencatat sambutan yang diucapkan Sukarno itu dengan cermat. Cindy Adam, penulis buku autobiografi Sukarno, menceritakan bahwa ketika ia diasingkan di Ende, Flores (saat ini menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur) pada tahun 1934-1937, Sukarno sering merenung tentang dasar negara Indonesia Merdeka, di bawah pohon sukun.

Pada kesempatan tersebut Ir. Sukarno juga menjadi pembicara kedua. Ia mengemukakan tentang lima dasar negara. Lima dasar itu adalah (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, (5) Ketuhanan Yang Maha Esa. Pidato itu kemudian dikenal dengan Pancasila.

Sementara itu Muh.Yamin dalam pidatonya juga mengemukakan Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Yamin ada lima azas, yaitu (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusian, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang. Pembentukan panitia sembilan itu bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya Negara Indonesia. Panitia kecil itu terdiri atas, Ir. Sukarno, Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A Maramis, Abdul Kahar Muzakkar, Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. Panitia kecil itu menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia Merdeka. Kemudian disusunlah rumusan bersama dasar negara Indonesia Merdeka yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam teks Piagam Jakarta itu juga dimuat lima asas yang diharapkan akan menjadi dasar dan landasan filosofi bagi Indonesia Merdeka.

PIAGAM JAKARTA

1. *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*
2. *(menurut) dasar kemanusian yang adil dan beradab.*
3. *Persatuan Indonesia.*
4. *(dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/ perwakilan*
5. *(serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, tiga orang wakil dari Sumatra, dan dua orang dari Sulawesi dan masing-masing satu orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah enam orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945.

KESIMPULAN

1. *Kedatangan Jepang yang dianggap sebagai Saudara Tua pada mulanya disambut dengan penuh harapan. Namun, perlakuan yang kejam terhadap rakyat Indonesia menimbulkan kebencian rakyat Indonesia pada Jepang.*

2. *Dampak pendudukan Jepang di Indonesia menjadikan rakyat semakin sengsara, serta kehidupan yang semakin sulit. Semua gerak dikontrol oleh pemerintah Jepang. Selama itu pula, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan azas ekonomi perang, yaitu menerapkan berbagai peraturan, pembatasan, dan penguasaan produksi oleh negara untuk kemenangan perang.*

3. *Mobilisasi massa menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, bahkan korban jiwa, yaitu romusa yang kemudian oleh pemerintah Jepang disebut sebagai prajurit pekerja.*

4. *Pada masa pendudukan Jepang, pembentukan organisasi massa dilakukan atas mobilisasi pemerintah militer Jepang. Meskipun demikian pergerakan terus dilakukan oleh kaum nasionalis baik secara terang-terangan maupun di bawah tanah.*

5. *Program militer pertama Jepang adalah Heiho, yaitu perekrutan serdadu pembantu lapangan, yang melibatkan pemuda-pemuda Indonesia dalam kegiatan militer. Keikutsertaan dalam pendidikan militer itu yang kemudian menjadi bekal pemuda-pemuda Indonesia dalam perang revolusi kemerdekaan.*

6. *Dasar negara dibentuk melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.*

LATIH UJI KOMPETENSI

1. Coba kamu uraikan dengan singkat, mengapa pergerakan nasional pada tahun 1930-an menjadi lebih moderat! Buatlah dalam lembar kertas folio dan diskusikanlah dengan temanmu!

2. Buatlah inventarisasi tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang, kemudian bandingkan dengan masa penjajahan Belanda!

3. Bagaimanakah peran BPUPKI dan PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan? Coba diskusikan dengan teman-temanmu, kemudian buatlah laporan singkat tentang pembentukan dasar negara dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam lima lembar kertas folio!

4. Bagaimana menurut pendapatmu kondisi Indonesia selama dalam pendudukan Jepang?

5. Apakah Indonesia diuntungkan atau dirugikan dengan adanya pendudukan Jepang?

LATIH ULANGAN AKHIR BAB

Jawablah beberapa pertanyaan dan tugas berikut!

1. Mengapa Jepang tampak begitu mudah memasuki Kepulauan Indonesia secara merata?
2. Mengapa dibentuk pemerintahan militer di Sumatra, Jawa, dan juga Indonesia bagian timur?
3. Apa maksud program "Pan Asia" dan apa hubungannya dengan ajaran *Hakko ichiu*?
4. Mengapa dibentuk Putera dan apa tujuannya?
5. Mengapa dibentuk Barisan Pelopor, apa tujuannya?
6. Jelaskan yang dimaksud dengan Ekonomi Perang?
7. Pada zaman Jepang, keadaan pendidikan dan aktivitas di bidang perkebunan mengalami kemerosotan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Coba lakukan telaah kritis!
8. Jelaskan dampak dari berbagai kebijakan Jepang itu terhadap kehidupan masyarakat!
9. Jelaskan tentang perlawanan Rakyat Papua terhadap kekejaman Jepang!
10. Nilai-nilai apa yang dapat kamu peroleh setelah belajar tentang sejarah pendudukan di Jepang di Indonesia?

Praktik tirani tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia

BAB 6
Indonesia Merdeka

Kami yang kini terbaring antara Kerawang-Bekasi
tidak bisa berteriak "Merdeka" dan angkat senjata lagi
Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,
Terbayang kami maju dan berdegap hati?
....
Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu.
Kenang, kenanglah kami.
Kami sudah coba apa yang kami bisa
Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa
....
(Charil Anwar dalam Sajak Kerawang-Bekasi)

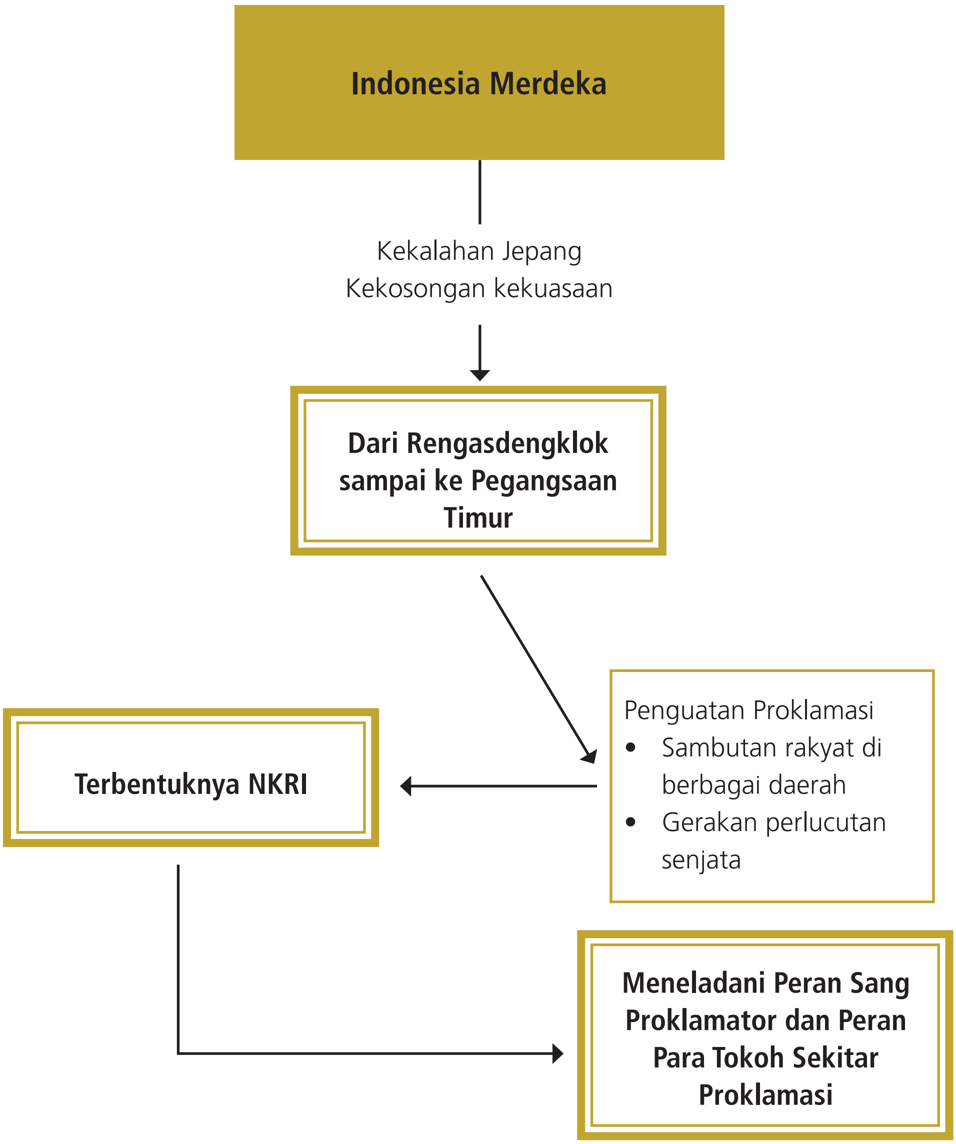
Setiap tanggal 17 Agustus kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan setiap tahun di sekitar bulan Agustus, dalam rangka menyemarakkan hari kemerdekaan Indonesia. Kegiatan apa saja yang sering kamu ikuti dalam rangkaian peringatan hari kemerdekaan tersebut? Mengapa kita harus memperingati hari kemerdekaan? Mengapa bangsa Indonesia harus merdeka? Siapa yang membuat bangsa Indonesia merdeka?Bagaimana makna hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Apa yang harus kita lakukan di masa kemerdekaan ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut pantas kita ajukan untuk menemukan jawaban yang lebih jelas. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan adalah keinginan seluruh bangsa di dunia. Kemerdekaan menjadi modal dasar pembangunan di berbagai bangsa, termasuk Indonesia. Dengan kemerdekaan, bangsa Indonesia bebas menentukan nasib sendiri. Hidup merdeka tentu akan membuat kita lebih leluasa menentukan arah dan jalan pembangunan bangsa Indonesia. Kemerdekaan juga memberikan keberpihakan pembangunan kepada bangsa sendiri. Kamu tentu masih

ingat bahwa penjajah hanya mementingkan kesejahteraan mereka sendiri. Penjajahan di manapun akan selalu menguras sumber daya negeri yang terjajah dan menambah kejayaan negeri penjajah. Karena itu, kewajiban kita mensyukuri kemerdekaan dengan mengisinya melalui pembangunan nasional. Kemerdekaan juga bukan merupakan hadiah penjajah.Bangsa Indonesia berjuang melalui berbagai cara dan berbagai pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan. Ribuan pejuang gugur sebagai kusuma bangsa, tidak terhitung kerugian harta benda untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Masihkah ada ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia sekarang? Tentu saja ada, karena itu mari kita telaah lebih lanjut hakikat kemerdekaan bangsa Indonesia dan bagaimana seharusnya kita menjaganya!



Sumber: Kemendikbud, 2013.
Gambar 6.1 Tugu Proklamasi.

PETA KONSEP


Indonesia Merdeka
Kekalahan Jepang
Kekosongan kekuasaan
Dari Rengasdengklok sampai ke Pegangsaan Timur
Penguatan Proklamasi
• Sambutan rakyat di berbagai daerah
• Gerakan perlucutan senjata
Terbentuknya NKRI
Meneladani Peran Sang Proklamator dan Peran Para Tokoh Sekitar Proklamasi

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari uraian ini, diharapkan kamu dapat:

1. *Menganalisis peristiwa Proklamasi dan maknanya bagi kehidupan bangsa.*
2. *Merekontruksi pemerintahan dan NKRI.*
3. *Meneladani perjuangan para tokoh proklamasi.*
4. *Mensyukuri nikmat Tuhan YME yang telah memberi karunia kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.*

ARTI PENTING

Melacak sejarah proses kemerdekaan bangsa Indonesia sangat penting untuk memberikan kesadaran betapa berat perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Mempelajari materi ini juga akan selalu mengingatkan kepada kita betapa besar jasa dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kita juga hendaknya semakin sadar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, selayaknya selalu kita syukuri dengan terus menjaga dan membangun menjadi bangsa yang lebih jaya.

A. Dari Rengasdengklok sampai ke Pegangsaan Timur

Memahami Lingkungan



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.2 Pengeboman Hiroshima.



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.3 Foto Ir. Sukarno.



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.4 Foto Moh. Hatta.



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.5 Tempat perumusan Teks Proklamasi.

» *Coba amati gambar terkait kemerdekaan bangsa Indonesia di samping dan di atas!*
Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan gambar-gambar tersebut.

1. *Apa pengaruh pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu dalam rangkaian PD II?*
2. *Bagaimana situasi Indonesia setelah peristiwa pengeboman itu?*
3. *Mengapa terjadi peristiwa Rengasdengklok?*
4. *Bagaimana proses penyusunan naskah teks proklamasi?*
5. *Mengapa harus ada proklamasi?*

Teks proklamasi kemerdekaan telah dibacakan oleh Sukarno dalam upacara pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Pernyataan kemerdekaan tersebut disambut bahagia dan suka cita oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Bagaimana proses proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mari kita lacak melalui uraian di bawah ini!

Memahami Teks

1. Jepang Bertekuk Lutut

Coba sekali lagi kamu amati gambar bom atom di halaman sebelumnya! Di manakah bom atom tersebut meletus? Siapa yang melakukan pengeboman? Bagaimana korban akibat letusan bom atom tersebut? Bom atom yang diledakkan di dua kota di Jepang yakni Hirosima dan Nagasaki menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami kecacatan. Kerugian material tidak terhitung jumlahnya.Bahkan sampai sekarang dampak terjadinya bom atom masih dirasakan masyarakat Jepang. Kerusakan dan dampak korban yang sangat mengerikan tersebut mendorong masyarakat dunia sepakat untuk tidak menggunakan senjata tersebut dalam berbagai peperangan. Dua bom atom tersebut telah meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki.

Coba kamu bayangkan bagaimana seandainya ada 1000 bom atom yang diledakkan? Sangat mungkin masyarakat akan menyebut sebagai peristiwa "kiamat" karena makhluk di dunia bisa jadi sebagian besar menjadi korban. Tetapi harus kita yakini bahwa kiamat yang sesungguhnya berada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa yang menjatuhkan kedua bom atom tersebut? Amerika Serikat yang menjatuhkan kedua bom atom pada dua kota di Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Mengapa Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang? Perang Dunia II yang berkecamuk sejak tahun 1939 telah menyebabkan kedua kelompok yakni Sekutu dan negara-negara fasis saling menyerang dengan menggunakan senjata pemusnah dan kerusakan massal. Korban dan kerugian kedua belah pihak tidak terhitung jumlahnya. Jutaan manusia meninggal dunia akibat Perang Dunia II tersebut. Sebagian besar dari mereka adalah masyarakat sipil yang bukan merupakan tentara perang.

Keinginan Amerika Serikat untuk segera menyelesaikan perang dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom ke Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama diledakkan di kota Hirosihma, sementara pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Digambarkan oleh masyarakat yang selamat di kedua kota tersebut, bahwa ledakan bom atom seperti gunung api yang jatuh ke bumi. Tiba-tiba langit

terang seperti ada kilat, disusul berbagai benda berhamburan terbang. Bersamaan itu berbagai makhluk hidup meregang nyawa, kehilangan anggota badan, bahkan hancur berkeping-keping. Dua kota Jepang luluh lantak.

» *Bagaimana dampak bom atom bagi Jepang?*
Coba lakukan analisis, apakah Amerika Serikat harus meledakkan Bom atom untuk mengalahkan Jepang! Menurut pendapat kamu, siapa yang paling menderita akibat bom atom di Jepang? Apakah masih ada senjata pemusnah massal selain bom atom? Setujukah kamu, jika senjata tersebut digunakan untuk perang?

Kehancuran Kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata, bahwa Sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia (PD) II. Sebenarnya tanda-tanda kekalahan Jepang dalam PD II sudah terlihat sejak tahun 1943 dengan berhasil direbutnya beberapa wilayah oleh Sekutu. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki merupakan faktor pemicu Jepang harus menyerah.

Bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat Jepang kalah dari Sekutu? Dalam posisi semakin terjepit dalam perang melawan Sekutu, Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Komando Tentara Jepang wilayah Selatan, pada bulan Juli 1945 menyepakati dan akan memberikan kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan ***Dokuritsu Junbi Inkai*** atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang tugasnya melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Lembaga PPKI ini diketuai oleh Ir. Sukarno dengan wakil Drs. Moh. Hatta.

» *Apa sebenarnya tugas dan pekerjaan BPUPKI yang diketuai oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta itu?*

Panitia persiapan atau PPKI itu beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah.

Jawa	12 wakil
Wakil Sumatera	3 wakil
Sulawesi	2 wakil
Wakil Kalimantan	1 wakil
Wakil Sunda Kecil	1 wakil
Wakil Maluku	1 wakil
Wakil dan golongan penduduk Cina	1 wakil

Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Sukarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Saigon adalah salah satu pusat tentara Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Sukarno dan Moh.Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian Terauchi menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sukarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus.

Pada masa-masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia. Walaupun alat komunikasi pada masa tersebut dikuasai Jepang, namun para tokoh perjuangan berhasil mengakses berbagai informasi dunia dengan berbagai cara. Radio sebagai alat yang paling berperan pada masa tersebut telah disegel oleh Jepang. Siaran radio sudah lama menjadi kekuasaan Jepang, untuk menerima siaran radio luar negeri pun masyarakat Indonesia tidak diizinkan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan Jepang apabila bangsa Indonesia mengetahui perkembangan perang yang menunjukkan Jepang semakin terjepit. Namun, para tokoh pergerakan tidak kurang akal. Mereka berhasil menyembunyikan beberapa radio gelap yang dapat digunakan untuk mendengarkan berbagai siaran radio luar negeri seperti BBC London.

» *Kamu telah mengkaji bagaimana tindakan Jepang di saat akhir perlawanannya terhadap Sekutu. Coba kamu buat peta perjalanan Sukarno, Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat untuk memenuhi panggilan Jendral Terauchi ke Dalat, Saigon!*

2. Peristiwa Rengasdengklok

Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan PD II. Menyerah kepada Sekutu adalah pilihan yang sangat pahit tetapi harus dilakukan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang menjadi pemikiran utama para pemuda atau sering disebut Golongan Muda kaum pergerakan Indonesia. Para pemuda berpikir, bahwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu, berarti di Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat, sekaligus tanpa campur tangan Jepang.

Para pejuang terutama kaum muda yang melancarkan gerakan "bawah tanah" segera mengetahui berita penyerahan Jepang itu. Para pemuda mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sutan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam "gerakan bawah tanah" telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada Sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia segera menemui Moh. Hatta di kediamannya. Syahrir mendesak agar Sukarno dan Moh.Hatta segera memerdekakan Indonesia. Kira-kira pukul 14.00 Syahrir berhasil menemui Bung Hatta yang baru saja datang dari Dalat, Saigon. Syahrir menyampaikan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Oleh karena itu, agar Sukarno dan Moh.Hatta mau menyatakan kemerdekaan. Namun Hatta tidak bersedia dan akan membicarakan dengan Bung Karno. Oleh karena itu, Bung Hatta dan Syahrir pergi ke kediaman Bung Karno. Syahrir menyampaikan hal yang sama saat bertemu Moh. Hatta, agar Bung Karno dan Bung Hatta mau memerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah. Tetapi Bung Karno belum bersedia sambil mencari kebenaran berita tentang menyerahnya Jepang pada Sekutu.

Mengapa Sukarno dan Hatta menolak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sebagai tokoh-tokoh yang demokratis, tahu hak dan kewajiban selaku pemimpin, kedua tokoh itu berpendapat bahwa untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Akan tetapi, para pemuda berpendapat bahwa proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI. Menurut para pemuda, PPKI

itu buatan Jepang. Pemuda berharap kemerdekaan yang dilakukan adalah kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bukan karena jasanya Jepang.

Hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 21.30 WIB, para pemuda yang dipimpin Wikana, dan Darwis datang di rumah Sukarno di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Sukarno untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar proklamasi malam ini dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Sambil menimang-nimang senjata Wikana berucap dan bernada ancaman.

Wikana :"Bung … Apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah"

Sukarno bangkit dari duduk dan nampak marah kemudian berjalan menuju Wikana nyawa saya malam ini juga, jangan menunggu sampai besok berdiri. Sukarno membuka krah baju sambil berucap:

Sukarno: Ini gorok leher saya, seretlah saya ke pojok itu, sudahilah "Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI, karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok".

Wikana terperanjat setelah melihat sikap dan bentakan Bung Karno. Suasana rumah Bung Karno semakin tegang. Hal ini juga disaksikan antara lain oleh Moh. Hatta, dr. Buntaran, Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusumasumantri.

Para pemuda gagal memaksa Sukarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda kemudian meninggalkan rumah kediaman Bung Karno. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia.

Para pemuda malam itu sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jl Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir, antara lain Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Chaerul Saleh, dan *Shodanco* Singgih. Mereka sepakat untuk membawa Sukarno dan Moh. Hatta ke luar kota. Tujuannya, agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.Para pemuda juga sepakat menunjuk *Shodanco* Singgih untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut.

Untuk melaksanakan tugas, Singgih mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas Peta di Jaga Monyet. Waktu itu yang piket di markas Peta adalah Latif Hendraningrat.Singgih disertai pengemudi, Sampun dan penembak mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan dr. Muwardi menuju ke rumah Moh.Hatta. Singgih secara singkat minta kesediaan Moh. Hatta untuk ikut ke luar kota. Moh. Hatta menuruti kehendak para pemuda itu. Rombongan kemudian menuju ke rumah Sukarno. Tiba di rumah Sukarno, keluarga Sukarno baru saja makan sahur. Setelah permisi, Singgih masuk rumah dan meminta agar Sukarno ikut pergi ke luar kota saat itu juga. Sukarno setuju, asal Fatmawati, Guntur (waktu itu berusia sekitar delapan bulan) dan Moh.Hatta ikut serta. Pemuda pun mengiyakan permintaan Sukarno. Tanggal 16 Agustus sekitar pukul 04.00 pagi rombongan Sukarno, Moh.Hatta, dan para pemuda menuju ke arah timur. Pemuda tetap merahasiakan kemana tujuan rombongan Sukarno ini mau dibawa pergi, Ternyata rombongan ini akan dibawa ke Rengasdengklok.



Sumber: Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, 1996.
Gambar 6.6 Rute perjalanan ke Rengasdengklok.

Dipilihnya daerah Kawedanan Rengasdengklok, karena daerah itu terpencil yaitu 15 km dari Kedunggede, Karawang. Selain itu, juga ada hubungan baik antara Daidan Peta Purwakarta dan Daidan Jakarta, sehingga dari segi keamanan terjamin. Pagi hari rombongan Sukarno sampai di Rengasdengklok. Mereka diterima oleh *Shodanco* Subeno dan Affan. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa, Djiau Kie Siong yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia.



Sumber: https://www.disparbud.jabarprov.co.id, 4-1-2016
Gambar 6.7 Rumah Djiau Kie Siong

Sehari di Rengasdengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Sukarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Namun, ada gelagat yang ditangkap oleh Singgih bahwa Sukarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau sudah kembali ke Jakarta. Melihat tanda-tanda bahwa Sukarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sekitar pukul 10.00 bendera Merah Putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengasdengklok.

Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI, tetapi Sukarno dan Moh. Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengasdengklok oleh Yusuf Kunto.

Subeno	: "Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti"
Subardjo	: "Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam delapan (malam). Kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu minta banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya"
Subeno	: "Bagaimana kalau jam enam besok pagi"
Subardjo	: "Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam enam pagi", tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres"
Subeno	: "Kalau tidak bagaimana?"
Subardjo	: " Mayor, kalau semua gagal. Besok siang tanggal 17 Agustus jam 12.00 belum terjadi Proklamasi, jaminannya saya, sayalah yang bertanggung jawab, tembak matilah saya"

Ahmad Subarjo tiba di Rengasdengklok pukul 17.30 WIB untuk menjemput Sukarno dan rombongan. Namun kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subardjo pun masih terjadi. Apakah, kalau Sukarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana. Terjadilah dialog antara Subeno selaku komandan Peta Rengasdengklok dengan Ahmad Subardjo.

Dengan jaminan itu, maka *Shodanco* Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subardjo untuk bertemu dan membawa pulang bersama Ir. Sukarno, Drs. Moh.Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta. Petang itu juga Sukarno dan rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengasdengklok.

» *Siapakah Ahmad Subarjo? Dapatkah kamu mencari riwayat Ahmad Subarjo? Mengapa dia berani menjadi taruhan kepada para pemuda bila proklamasi tidak terjadi tanggal 17 Agustus 1945? Apa yang terjadi seandainya proklamasi tidak jadi dilaksanakan? Nilai apa yang pantas kita contoh dari Ahmad Subarjo?*

3. Perumusan Teks Proklamasi

Bagaimana setelah para pemuda melepas para tokoh golongan tua tersebut? Rombongan Sukarno setelah mengantar pulang Fatmawati dan Guntur, menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol no. 1. Setelah tiba di Jl. Imam Bonjol No. 1, lalu Sukarno dan Moh.Hatta diantarkan Laksamana Maeda menemui *Gunseikan* Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto (Kepala Pemerintahan Militer Jepang). Akan tetapi, *Gunseikan* menolak menerima Sukarno-Hatta pada tengah malam. Dengan ditemani oleh Maeda, Shigetada Nishijima dan Tomegoro Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penterjemah, mereka pergi menemui *Somubuco* Mayor Jenderal Otoshi Nishimura (Direktur/ Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang), dengan maksud untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sukarno menyampaikan bahwa akan mengadakan rapat PPKI untuk membahas persiapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan.

Pada pertemuan antara Sukarno-Hatta dengan Nishimura ini tidak dicapai kata sepakat. Di satu pihak Sukarno- Hatta bertekad untuk melangsungkan rapat PPKI yang pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 itu tidak jadi diadakan karena mereka dibawa ke Rengasdengklok. Mereka menekankan kepada Nishimura bahwa Jenderal Besar Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Di lain pihak Nishimura menegaskan garis kebijakan Panglima Tentara ke-XVI di Jawa, bahwa dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah *status quo*.

Berdasarkan garis kebijaksanaan itu, Nishimura melarang Sukarno-Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Sampailah Sukarno-Hatta pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Mereka hanya berharap pihak Jepang supaya tidak menghalang-halangi pelaksanaan Proklamasi oleh rakyat Indonesia sendiri.

Rombongan Sukarno segera kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1. Para tokoh-tokoh nasionalis berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Di rumah Maeda, hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota *Chuo Sangi In* yang ada di Jakarta. Mereka berjumlah 40 - 50 orang.



Sumber: 1996. PETA: Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa dan Sumatera 1942-1945.
Gambar 6.8 Laksamana Maeda.

Rumah Laksamana Maeda itu dianggap aman dari kemungkinan gangguan yang sewenang-wenang dari anggota-anggota *Rikugun* (Angkatan Darat Jepang/ *Kampeitai)* yang hendak menggagalkan usaha bangsa Indonesia untuk mengumumkan Proklamasi Kemerdekaannya. Oleh karena Laksamana Maeda adalah Kepala Perwakilan *Kaigun,* maka rumahnya merupakan *extra territorial*, yang harus dihormati oleh *Rikugun.* Selain itu, Laksamana Maeda sendiri memiliki hubungan yang akrab dengan para pemimpin bangsa Indonesia, dan Maeda juga simpatik terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia, maka rumah beliau direlakan menjadi tempat pertemuan para pemimpin bangsa Indonesia untuk berunding dan merumuskan naskah/teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

» *Siapakah Laksamana Maeda? Dapatkah kamu mencari riwayat hidupnya? Mengapa Maeda memberikan kesempatan para pejuang menyusun proklamasi di rumahnya? Bagaimana akhir hidup Maeda? Nilai apa yang pantas kita tiru dari Laksamana Maeda?*

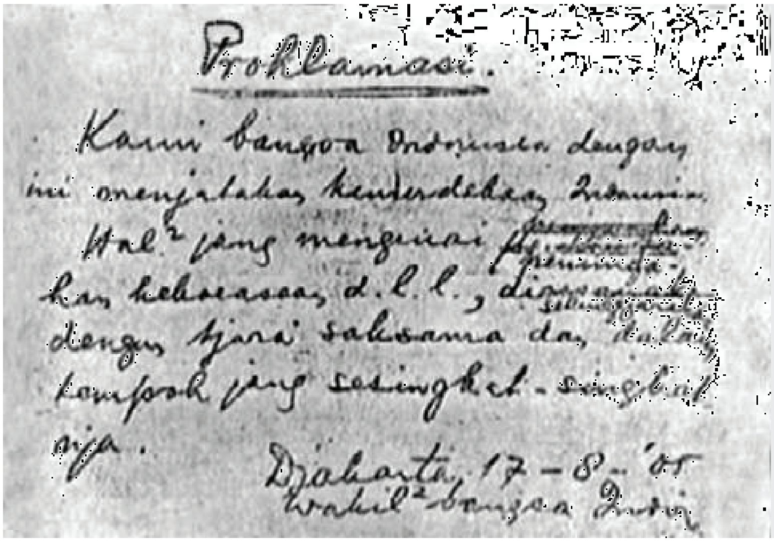
Setelah pertemuan dengan Nishimura itu dianggap cukup, Sukarno dan Hatta kembali ke rumah Maeda. Setelah berbicara sebentar dengan Sukarno, Moh.Hatta dan Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda minta diri untuk beristirahat dan mempersilakan para pemimpin Indonesia berunding sampai puas di rumahnya. Di ruang makan Maeda, dirumuskanlah naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ketika peristiwa itu berlangsung Maeda tidak hadir, tetapi Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diah menyaksikan Sukarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.9 Ruangan tempat perumusan teks proklamasi.

Sukarno pertama kali menuliskan kata pernyataan "Proklamasi". Sukarno kemudian bertanya kepada Moh. Hatta dan Ahmad Subarjo." Bagaimana bunyi rancangan pada draf pembukaan UUD?" Kedua orang yang ditanya pun tidak ingat persis. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". Moh. Hatta menambahkan kalimat: "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya". Sukarno menuliskan, "Jakarta, 17-8-'05 Wakil-wakil bangsa Indonesia", sebagai penutup. Mereka semua sepakat tentang draf itu.

Pukul 04.00 WIB dini hari, Sukarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia.Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Sukarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Sukarno dan Moh. Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Sukarni diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik.



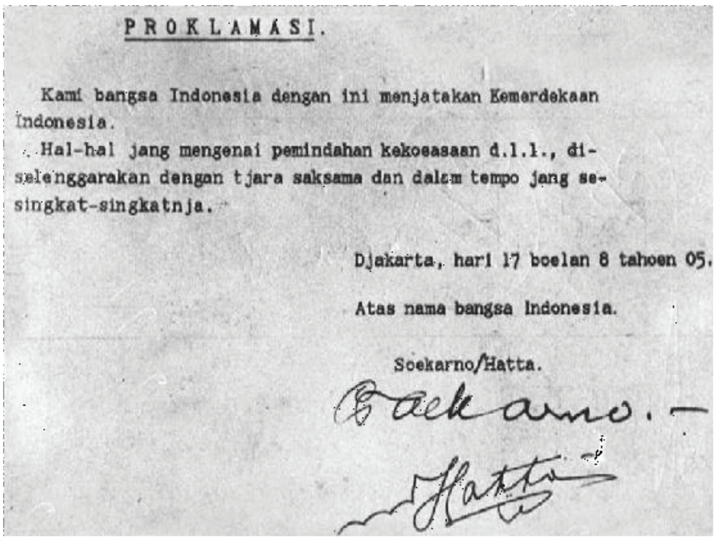
Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal² jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17-8-'05
Wakil² bangsa Indonesia.

Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.10 Konsep rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Sukarno.

Berikut naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, baik yang diketik oleh Sayuti Melik. Coba kamu perhatikan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang sudah diketik Sayuti Melik dengan naskah yang dikonsep dengan tulis tangan.



PROKLAMASI.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05.

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

Soekarno.—
Hatta

Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.11 Naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik.

Keterangan: naskah diatas sudah mengalami perubahan sesuai dengan persetujuan dalam rapat.

Naskah Proklamasi:

Beberapa perubahan yang dimaksud, yaitu kata tempoh diganti dengan kata tempo. Penulisan tanggal, bulan, dan tahun yang semula Jakarta, 17-8-'05 diubah menjadi Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun '05. (Tahun 05 adalah singkatan dari tahun Jepang Sumera, yakni tahun 2605 yang bertepatan dengan tahun 1945 Masehi). Kata-kata Wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan kata-kata Atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik kemudian ditandatangani oleh Sukarno dan Moh. Hatta. Naskah inilah yang kemudian diketik Sayuti Melik itu disebut teks proklamasi yang otentik

Teks Proklamasi yang hanya beberapa kalimat itu memiliki makna yang luar biasa dalam konteks jalinan kerja masa atau persatuan yang kokoh. Kata "Proklamasi" andil Bung Karno. Kalimat "Kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia" dinyatakan oleh Ahmad Subarjo. Kalimat "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll. Diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat" andil Bung Hatta. Kalimat "Atas nama Bangsa Indonesia, Sukarno-Hatta" usulan Sukarni.

Demikian pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah Proklamasi. Agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya, naskah itu harus disebarluaskan. Timbullah persoalan tentang bagaimana caranya naskah tersebut disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Sukarni mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di Lapangan Ikada, yang telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengar pembacaan naskah Proklamasi. Tetapi Sukarno tidak setuju, karena tempat itu adalah tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Beliau sendiri mengusulkan agar Proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No.56. Usul tersebut disetujui dan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dibacakannya bersama Hatta di tempat itu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00.WIB di tengah-tengah bulan Ramadhan (bulan Puasa).

4. Proklamasi Berkumandang

Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Sukarno di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Moh. Hatta berpesan kepada B.M. Diah untuk memperbanyak teks Proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia.

Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang, mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyelenggaraan pembacaan naskah Proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat Proklamasi telah tiba. Semua alat komunikasi digunakan untuk penyambutan Proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota.

Tanpa diduga, pada hari itu barisan pemuda berbondong-bondong menuju Lapangan Ikada. Para pemuda datang ke tempat itu, karena informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut bahwa Proklamasi akan diselenggarakan di Lapangan Ikada. Rupanya Jepang telah mencium kegiatan para pemuda malam itu, sehingga mereka berusaha untuk menghalang-halanginya. Lapangan Ikada telah dijaga oleh Pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Karena itu, Proklamasi tidak diselenggarakan di Lapangan Ikada, tetapi dilaksanakan di Pegangsaan Timur No. 56.

Pada pagi hari itu juga, rumah Sukarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan Proklamasi, dr. Muwardi meminta Latief Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Sukarno.

Sementara itu, Walikota Jakarta, Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhud untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. S. Suhud mendapatkan bendera Merah Putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar (tidak standar). Bendera Merah Putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang bendera menggunakan sebatang bambu (semacam bekas jemuran pakaian).

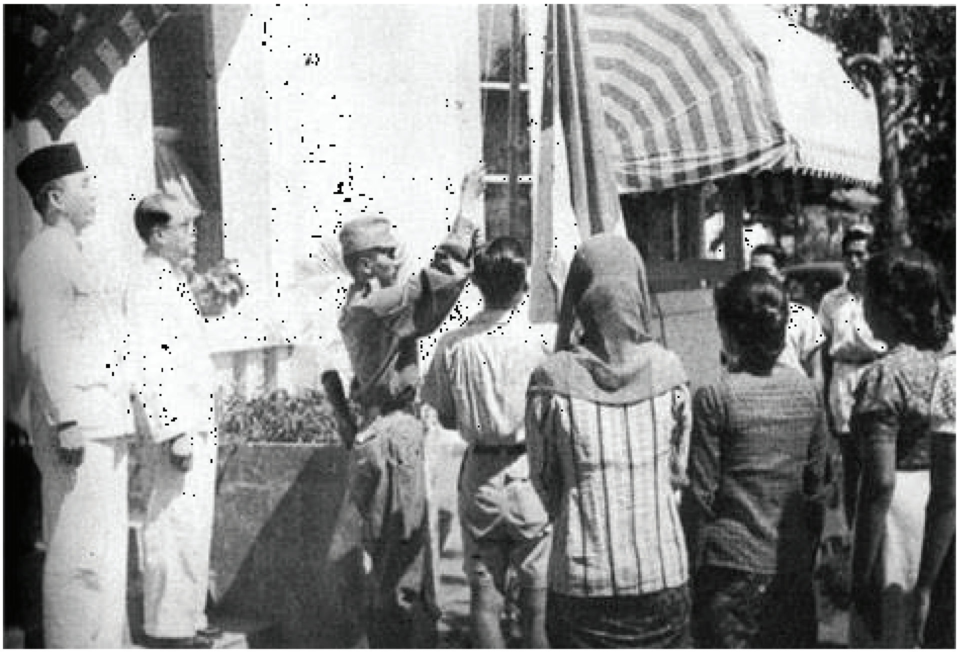
Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah Sukarno di Jl. Pegangsaan Timur No. 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir, antara lain Mr. A. A. Maramis, dr. Buntaran Martoatmojo, Mr. Latuharhary, Abikusno Cokrosuyoso, Otto Iskandardinata, Ki Hajar Dewantoro, Sam Ratulangie, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, dr. Muwardi, Ny. SK. Trimurti, dan AG. Pringgodigdo.

Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah; *pertama* pembacaan teks proklamasi; *kedua*, pengibaran bendera Merah Putih; dan *ketiga*, sambutan walikota Suwiryo dan dr. Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10.00 WIB, Sukarno dan Moh. Hatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Sukarno dan Moh. Hatta maju beberapa langkah. Sukarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi.



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.12 Sukarno didampingi Mohammad Hatta membacakan Teks Proklamasi.

Acara berikutnya adalah pengibaran bendera Merah Putih yang dilakukan oleh Latief Hendraningrat dan S. Suhud. Bersamaan dengan naiknya bendera Merah Putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin.



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.13 Pengibaran bendera merah putih oleh Latief Hendraningrat dan S. Suhud.

Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan dr. Muwardi. Sekitar pukul 11.00 WIB, upacara telah selesai. Kemudian dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota Barisan Pelopor untuk menjaga keselamatan Sukarno dan Moh. Hatta.



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.14 Suwiryo memberikan sambutan.

Sebuah Renungan

Sayuti Melik sempat membuang naskah asli yang merupakan konsep awal. Namun insting wartawan seorang BM Diah, tergerak. Diah memungutnya lalu mengamankan dalam sakunya. Berkat kejelian BM Diah, hingga kini kita masih bisa menyaksikan naskah bersejarah ini. Naskah dalam bentuk ketikan ini kemudian ditandatangani Sukarno-Hatta di atas sebuah piano.

Karena begitu tergesa-gesanya para tokoh ini tidak sempat menyiapkan bendera negara. Konon pada malam itu juga, mereka membuat bendera dari kain sprei putih dan kain merah milik dari seorang penjual soto yang kebetulan mangkal di sekitar rumah Sukarno. Kain itu dijahit oleh Ibu Fatmawati sehingga jadi bendera. Begitu juga tiang bendera yang pertama ini terbuat dari bambu.

Situasi begitu kritis, ketika menjelang pembacaan, Sukarno dikabarkan menderita sakit malaria. Hingga pukul 08.00 WIB pagi, Presiden Pertama Republik Indonesia masih belum bisa bangun.

» *Coba kamu perankan proses Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sejak dari Rengasdengklok sampai dengan pembacaan proklamasi! Susunlah skenario cerita dengan sub tema berikut ini.*

1. *Perundingan para pemuda untuk mendesak Sukarno memproklamasikan kemerdekaan.*
2. *Peristiwa Rengasdengklok.*
3. *Penyusunan teks proklamasi.*
4. *Pembacaan teks proklamasi.*

5. Dukungan dari Berbagai Lapisan

Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lain menyambut dengan antusias. Karena alat komunikasi yang terbatas, informasi ke daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. Saat tersiarnya berita tentang Proklamasi Kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayainya.

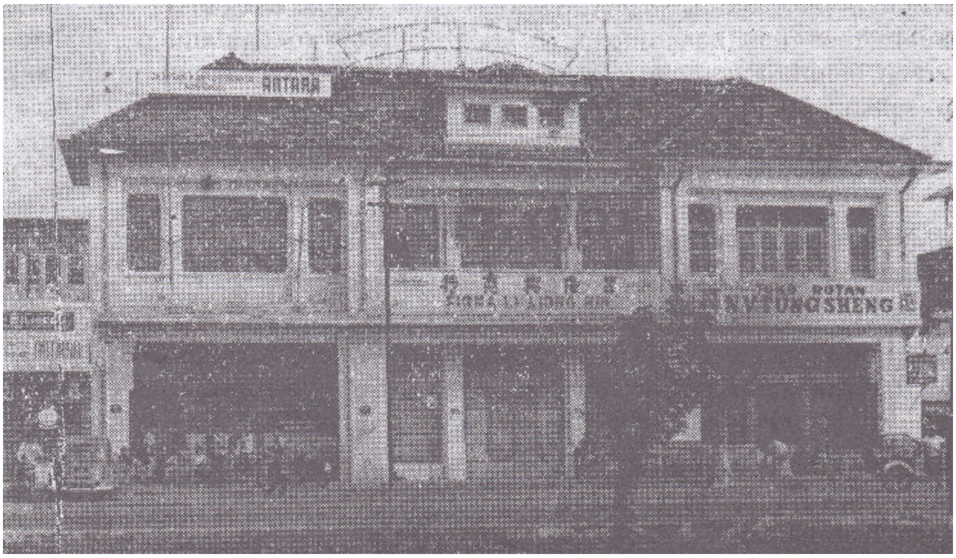
Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya kepada Sekutu. Baru pada bulan September 1945, Proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan mereka kepada Republik, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran.

Euforia revolusi segera mulai melanda negeri ini, khususnya kaum muda yang merespon kegairahan dan tantangan kemerdekaan. Para komandan pasukan Jepang di daerah-daerah sering kali meninggalkan wilayah perkotaan dan menarik mundur pasukan ke daerah pinggiran guna menghindari konfrontasi. Banyak yang bijaksana memperbolehkan pemuda-pemuda Indonesia memperoleh senjata. Antara tanggal 3-11 September, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa mendapat perlawanan dari pihak Jepang. Pada akhir bulan September, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung juga sudah berada di tangan para pemuda Indonesia. Selain itu, juga terlihat adanya semangat revolusi di dalam kesusasteraan dan kesenian. Surat-surat kabar dan majalah Republik bermunculan di berbagai

daerah, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Aktivitas kelompok sastrawan yang bernama "Angkatan 45", mengalami masa puncaknya pada zaman revolusi. Lukisan-lukisan modern juga mulai berkembang pesat di era revolusi.

Banyak pemuda bergabung dengan badan-badan perjuangan. Di Sumatera, mereka benar-benar memonopoli kekuasaan revolusioner. Karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah mapan di sana hanya segelintir, mereka ragu terhadap apa yang akan dilakukan. Para mantan prajurit Peta dan Heiho membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin. Laskar Masyumi dan Barisan Hizbullah, menerima banyak pejuang baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam lainnya yang umumnya disebut Barisan Sabilillah, yang kebanyakan dipimpin oleh para Kiai.

Proklamasi kemerdekaan akan disebarluaskan melalui radio, tetapi Jepang menentang upaya penyiaran tersebut, dan malah memerintahkan agar para penyiar meralat berita proklamasi sebagai sesuatu kekeliruan. Tampaknya para penyiar tetap tidak mau memenuhi seruan pihak Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancarnya disegel dan para pegawainya dilarang masuk. Mereka kemudian membuat pemancar baru di Menteng 31. Di samping melalui siaran radio, para wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak, seperti surat kabar, selebaran, dan penerbitan-penerbitan yang lain.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 6.15 Kantor Berita Antara tempat proklamasi disiarkan.

Pada tanggal 3 September 1945, para pemuda mengambil alih kereta api termasuk bengkel di Manggarai. Tanggal 5 September 1945, Gedung Radio Jakarta dapat dikuasai.Tanggal 11 September 1945, seluruh Jawatan Radio berhasil dikuasai oleh Republik. Oleh karena itu, tanggal 11 September dijadikan hari lahir Radio Republik Indonesia (RRI).

Para pemuda memprakarsai diadakannya rapat raksasa di Lapangan Ikada (sekarang Monas). Rapat yang digagas oleh para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam "Kesatuan van Aksi", untuk melakukan rapat raksasa di lapangan Ikada, yang semula digagas tanggal 17 September 1945, mundur menjadi 19 September 1945. Presiden Sukarno sudah dihubungi dan bersedia akan menyampaikan pidato di dalam rapat raksasa pada tanggal 19 September 1945. Sejak pagi, rakyat Jakarta sudah mulai berdatangan dan memenuhi Lapangan Ikada. Rapat itu untuk memperingati sebulan kemerdekaan Indonesia.

Bermula dari ketidakpuasan rakyat terhadap sikap Jepang yang belum juga mengakui Negara Republik Indonesia dan bahkan Jepang malah mempertahankan status *quo*-nya dengan mengatasnamakan Sekutu. Kondisi itu mendorong rakyat Indonesia yang baru saja merdeka, untuk segera membentuk pemerintah yang baru dan mengambil langkah-langkah nyata. Ketidakpuasan rakyat semakin bertambah ketika mengetahui pendaratan pasukan Sekutu dibawah pimpinan Mayor Geenhalgh, di Kemayoran pada 8 September 1945. Rakyat dari berbagai penjuru dengan tertib berdatangan ke Lapangan Ikada dengan membawa poster dan bendera merah-putih. Mereka menuntut kebulatan tekad untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Mereka juga bertekad untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia bukan atas bantuan Jepang, tetapi merupakan tekad seluruh rakyat Indonesia.

Melihat tekad rakyat yang menggelora dan tidak dapat dihalangi meskipun oleh tentara Jepang sekalipun, pemerintah terdorong untuk mengadakan sidang kabinet. Setelah itu, diputuskan Presiden Sukarno dan Moh.Hatta dan para menteri untuk datang ke Lapangan Ikada. Pada kesempatan itu Sukarno menyampaikan pidatonya yang disambut dengan gegap gempita oleh rakyat. Rapat itu berlangsung tertib dan damai



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 6.16 Sukarno sedang memberikan pesan singkat pada rapat raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 itu juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII telah mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta atas berdirinya Negara Republik Indonesia dan atas terpilihnya dua tokoh tersebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ucapan selamat itu tersirat bahwa Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengakui kemerdekaan RI dan siap membantu mereka. Kemudian, pagi itu sekitar pukul 10.00 tanggal 19 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengundang kelompok-kelompok pemuda di bangsal kepatihan.

Kemudian untuk mempertegas sikapnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VII pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanat antara lain sebagai berikut.

a. Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari Negara Indonesia.
b. Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat.
c. Hubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara RI bersifat langsung. Sultan selaku Kepala Daerah Istimewa bertanggung jawab kepada Presiden.

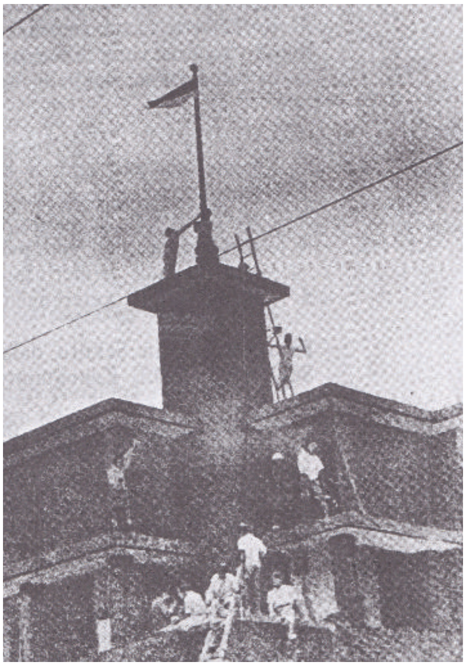


Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 6.17 Sri Sultan Hamengkubuwono IX beserta para pengiringnya di bangsal kepatihan.

Amanat Sri Paku Alam VIII sama dengan amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Hanya saja kata'Sri Sultan Hamengkubuwono IX' diganti dengan 'Sri Paku Alam VIII' dan 'Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat' diganti dengan 'Negeri Paku Alaman'.

Sementara di Surabaya, memasuki bulan September 1945, terjadi gerakan perebutan senjata di gudang Don Bosco. Rakyat Surabaya juga merebut Markas Pertahanan Jepang di Jawa Timur, serta pangkalan Angkatan Laut di Ujung sekaligus merebut pabrik-pabrik yang tersebar di sana.

Orang-orang Inggris dan Belanda yang sebagian telah datang, langsung berhubungan dengan Jepang. Mereka menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada zaman Belanda. Pada tanggal 19 September 1945, seorang bernama Ploegman dibantu kawan-kawannya mengibarkan bendera Merah Putih Biru di atas Hotel Yamato. Residen Sudirman segera memperingatkan agar Ploegman dan kawan-kawannya menurunkan bendera tersebut. Peringatan itu tidak mendapat tanggapan. Hal ini telah mendorong kemarahan para



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.

Gambar 6.18 Bendera Merah Putih Biru di atas Hotel Yamato sedang diturunkan pemuda Surabaya.

pemuda Surabaya. Para pemuda Surabaya kemudian menyerbu Hotel Yamato. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera Merah Putih Biru, kemudian merobek bagian warna birunya. Setelah itu, bendera tersebut dikibarkan kembali sebagai bendera Merah Putih. Dengan berkibamya bendera Merah Putih maka dengan penuh semangat dan tetap menjaga kewaspadaan, para pemuda itu satu per satu meninggalkan Hotel Yamato.

» *Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa makna kemerdekaan itu bagi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan bangsa. Sudah barang tentu secara politik bangsa Indonesia memiliki kedaulatan, bebas untuk menentukan nasib sendiri. Secara ekonomi kita tidak tergantung dan ditindas oleh bangsa lain. Bangsa Indonesia dapat meracang pembangunan demi kesejahteraan. Dari dimensi sosial, sebagai rakyat yang merdeka tidak lagi merupakan kelompok kelas 2 atau kelas 3, tetapi sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain. Dengan kemerdekaan kita juga dapat mengembangkan kebudayaan bangsa sesuai dengan nilai-nilai dan martabat bangsa Indonesia.Semua ini menjadi mudah untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.*

KESIMPULAN

1. *Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan perjuangan bersama rakyat Indonesia. Banyak tokoh berperan dalam proses perjuangan tersebut. Bahkan bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi sebagian bangsa lain juga bersimpati untuk perjuangan bangsa Indonesia.*

2. *Peranan para tokoh dalam proklamasi kemerdekaan berbeda-beda. Mereka berperan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang harus dilakukan.*

3. *Rakyat Indonesia di berbagai daerah mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibuktikan dengan reaksi mereka yang sangat heroik. Keberanian dan kerelaan berkorban ditunjukkan rakyat di berbagai daerah dalam rangka mengambil alih kuasaan Jepang.*

LATIH UJI KOMPETENSI

1. Jelaskan mengapa para pemuda melakukan penculikan atau pengamanan terhadap Sukarno dan Moh. Hatta!

2. Ceritakan secara singkat bagaimana kronologi peristiwa Rengasdengklok, sampai akhirnya terjadi penyusunan teks proklamasi?

3. Ketika dipaksa para pemuda untuk menuju Rengasdengklok, Sukarno dan Moh. Hatta tidak menolaknya. Padahal beliau sebagai tokoh utama PPKI memiliki kekuatan dan kewibawaan. Mengapa hal itu bisa terjadi, apa makna yang ada di balik itu semua?

4. Jelaskan secara singkat bagaimana latar belakang, proses, dan dampak terjadinya insiden di Hotel Yamato!

Tugas

Buatlah ringkasan tentang dukungan rakyat Indonesia di berbagai daerah terkait dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Lengkapi dengan deskripsi tentang situs atau peninggalan yang terkait dengan peristiwa sekitar proklamasi dan dukungan rakyat yang ada di lingkunganmu. Apabila di lingkungan tempat tinggalmu tidak terdapat situs atau peninggalan tersebut, carilah informasi di buku, majalah, atau media lainnya.

B. Terbentuknya Pemerintahan dan NKRI

Mengamati Lingkungan



Sumber: Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia, 1994.
Gambar 6.19 Peta Negara Republik Indonesia.

» *Coba amati baik-baik Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas!*

1. *Di manakah pusat pemerintahan Republik Indonesia saat ini?*
2. *Bagaimana struktur pemerintahan Republik Indonesia saat ini?*
3. *Apakah Dasar Negara Republik Indonesia?*
4. *Apakah jumlah provinsi di Indonesia selalu tetap?*
5. *Bagaimana Negara Indonesia pertama kali terbentuk?*

Proklamasi 17 Agustus 1945 dilaksanakan dalam situasi kacau, dapat dikatakan bahwa proklamasi tersebut dilakukan dengan tergesa-gesa, tanpa melalui pembicaraan panjang. Walaupun kamu sudah tahu bahwa sebelumnya telah dibentuk BPUPKI dan PPKI yang secara resmi merancang kemerdekaan Indonesia.

Pada saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Mengapa demikian? Karena syarat kelengkapan negara pada saat itu belum semua terpenuhi. Apa saja syarat berdirinya negara? Selain memiliki wilayah, negara harus memiliki struktur pemerintahan, diakui negara lain, dan memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum. Di antara persyaratan tersebut, syarat utama yang belum terpenuhi adalah struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Ingat, proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak mengundang secara resmi berbagai duta besar negara lain, karena memang sebelum proklamasi pemerintahan yang ada adalah pemerintahan Jepang!

Karena itu, tugas pertama bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan dan mencari pengakuan negara-negara lain. Bagaimana prosesnya? Mari kita lacak melalui kegiatan di bawah ini!

Memahami teks

1. Pengesahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden, Wakil Presiden

Setelah Indonesia diproklamasikan, secara resmi terbentuklah suatu negara baru yang bernama Indonesia. Sudah barang tentu kelengkapan-kelengkapan sebagai negara merdeka harus segera dipenuhi. Salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan kemudian mengesahkan UUD. Rapat yang pertama ini diadakan di Pejambon (sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila). Rencana pukul 11.30, sidang pleno dibuka di bawah pimpinan Sukarno. Kemudian dilaksanakan acara pemandangan umum, yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal.

Namun sebelum secara resmi rapat itu dilaksanakan berkembang isu yang sangat krusial yang terkait dengan bunyi sila pertama dalam Pancasila yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pembukaan UUD: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rakyat Indonesia Timur yang umumnya beragama Kristen Protestan dan Katholik merasa keberatan dengan rumusan itu. Informasi penting ini disampaikan oleh seorang opsir Angkatan Laut Jepang (setelah mendapat persetujuan Nisyijima, pembantu Laksamana Maeda). Dengan diantar

Nisyijima opsir Jepang itu bertemu Moh.Hatta tanggal 17 Agustus 1945 sore hari. Tentu informasi ini menjadi perhatian serius bagi Hatta. Semalaman Hatta terbayang bagaimana Republik Indonesia tanpa Indonesia bagian Timur, bagaimana perjuangan yang sudah bertahun-tahun dilakukan bersama baik dari kelompok Islam, Kristen, Katholik dan agama yang lain. Bung Hatta dalam hatinya menegaskan Indonesia harus tetap bersatu. Bagaimana harus memecahkan persoalan tersebut dan bagaimana sidang PPKI itu berlangsung, mari kita simak uraian berikut.

Tanggal 18 Agustus 1945, pagi-pagi sebelum sidang PPKI di mulai, Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Islam yang cukup berpengaruh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, Teuku Hasan. Dikumpulkanlah mereka dan diajak rapat pendahuluan. Bung Hatta menyampaikan informasi yang telah diberikan seorang opsir Jepang. Terjadilah diskusi serius dan dengan konsep "filsafat garam" (terasa tetapi tidak harus tampak), Bung Hatta dengan kedudukannya yang cukup berpengaruh berhasil meyakinkan para tokoh Islam itu. Mereka sepakat dari pada harus terjadi perpecahan maka rela menghilangkan kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang menyertai Ketuhanan dalam Pembukaan UUD, sehingga tinggal "Ketuhanan". Ada pemikiran untuk menambahkan kata-kata di belakang Ketuhanan dengan "berdasarkan kemanusiaan" sehingga menjadi "Ketuhanan berdasarkan kemanusiaan". Ki Bagus Hadikusumo kemudian mengusulkan dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Semua sepakat, dan waktu sidang PPKI pun segera dimulai.

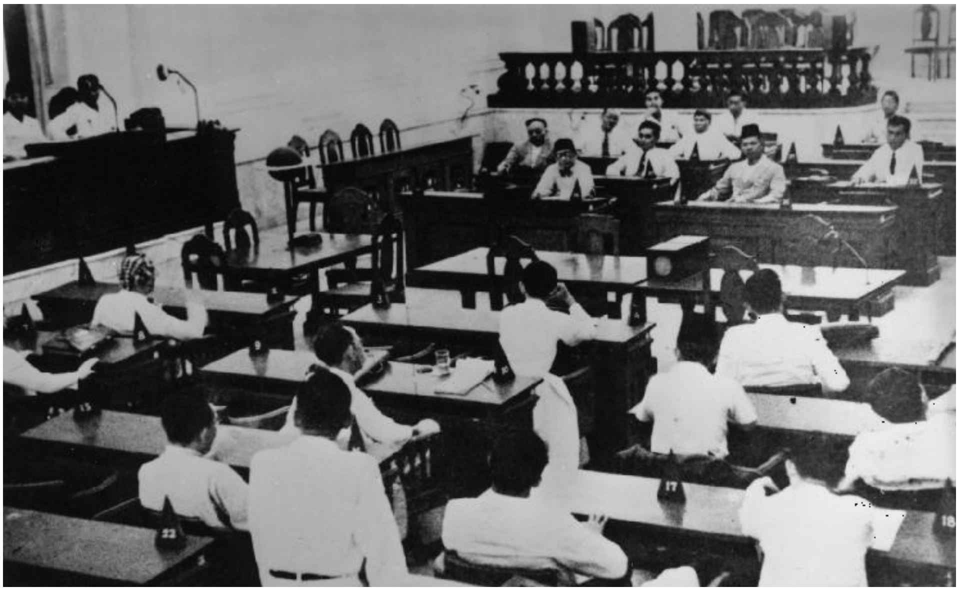
Di dalam acara pertama yakni pemandangan umum, Bung Hatta juga menyampaikan hasil lobi atau pertemuannya dengan beberapa tokoh Islam yang hasilnya mengganti kata-kata yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", dalam draf Pembukaan UUD diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan itu telah dikonsultasikan dan didiskusikan antara Hatta dengan para pemuka Islam. Hatta menegaskan bahwa kesepakatan itu diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun merupakan bagian yang mayoritas. Kesepakatan pergantian rumusan ini dapat melegakan semua pihak, sekalipun sebagian dari pihak Islam ada yang merasa kecewa, tetapi tidak ada masalah. Rapat pemandangan umum dapat berlangsung dengan lancar.

Setelah diadakan revisi isi draf Pembukaan UUD yang tertera di dalam Piagam Jakarta itu, lahirlah rumusan Teks Pancasila yang kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut.

PANCASILA

1. ***Ketuhanan Yang Maha Esa.***
2. ***Kemanusian yang adil dan beradab.***
3. ***Persatuan Indonesia.***
4. ***Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.***
5. ***Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.***

Sidang dilanjutkan dengan membahas bab perbab, pasal demi pasal. Pembahasan ini juga cukup produktif dan berjalan lancar. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 13.50 wib. Sidang dihentikan istirahat sampai pukul 15.00 wib untuk memberi kesempatan salat bagi umat Islam dan memberi kesempatan makan siang bagi yang tidak berpuasa.



Sumber: Museum Perumusan Naskah Teks Proklamasi.
Gambar 6.20 Sidang pengesahan UUD 1945.

Pukul 15.00 sidang dimulai kembali. Agenda utamanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut, harus disahkan dulu yakni pasal 3 dari Aturan Peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI.

Kertas suara dibagikan, tetapi atas usul Otto Iskandardinata, maka secara aklamasi terpilih Ir. Sukarno sebagai Presiden RI dan Drs. Moh.Hatta sebagai Wakil Presiden Rl. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan disetujui. Setelah menjadi presiden, Sukarno kemudian menunjuk sembilan orang anggota PPKI sebagai Panitia Kecil dipimpin oleh Otto Iskandardinata.Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia.

2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah

Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Sukarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo sebagai Panitia Kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI, tetapi bukan personalianya (pejabatnya).

Otto Iskandardinata menyampaikan hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi delapan provinsi, yaitu sebagai berikut.

a. Jawa Tengah
b. Jawa Timur
c. Borneo (Kalimantan)
d. Sulawesi
e. Maluku
f. Sunda Kecil
g. Sumatera
h. Jawa Barat

Di samping delapan wilayah tersebut, masih ditambah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subardjo, mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut.

a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Kehakiman
d. Kementerian Keuangan
e. Kementerian Kemakmuran
f. Kementerian Kesehatan
g. Kementerian Pengajaran
h. Kementerian Sosial
i. Kementerian Pertahanan
j. Kementerian Penerangan
k. Kementerian Perhubungan
l. Kementerian Pekerjaan Umum

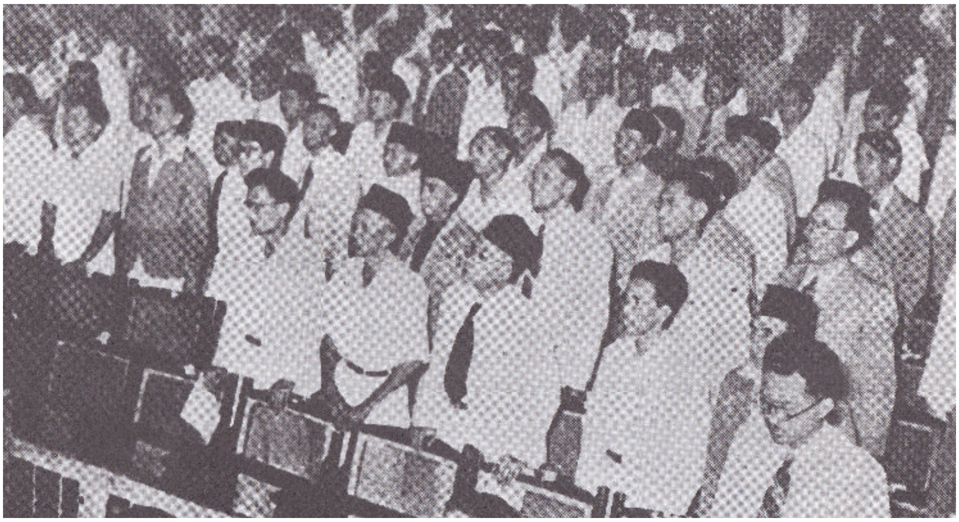
Selain itu juga ada Kementerian Negara.

3. Pembentukan Badan-Badan Negara

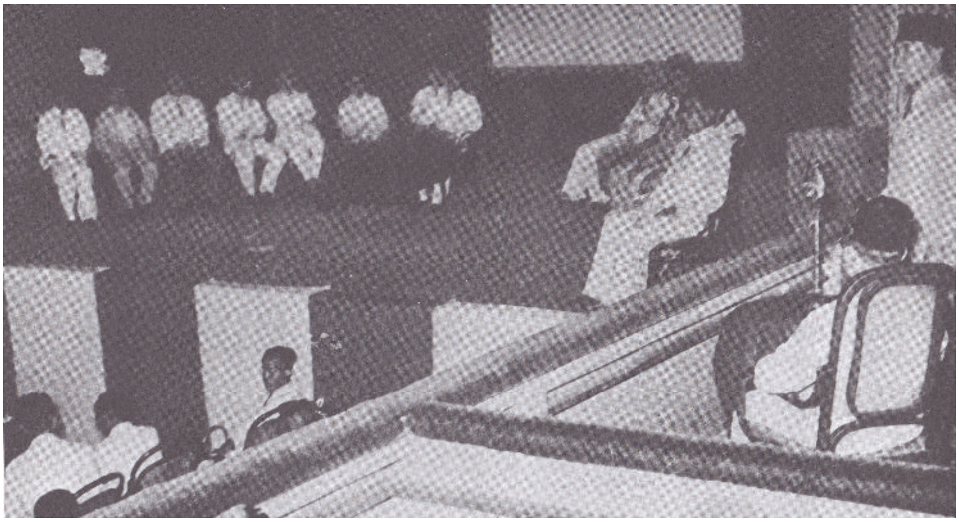
Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945, di Jln. Gambir Selatan (sekarang Merdeka Selatan) No. 10, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Otto Iskandardinata, Sukardjo Wirjopranoto, dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodigdo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan dr. Tajuluddin, berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945.

PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini, diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat.

KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sebagai ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimejo, dengan beberapa wakilnya, yakni Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhary, dan Adam Malik.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 6.21 Para anggota KNIP sedang dilantik.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 6.22 Presiden Sukarno sedang memberi amanat pada pelantikan anggota KNIP.

Pada tanggal 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimejo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal ini dirasa penting, karena dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan. Syahrir dan Amir Syarifudin mengusulkan adanya BPKNIP (Badan Pekerja KNIP) untuk menghadapi suasana genting. BPKNIP akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Berdasarkan usul-usul dalam sidang tersebut, maka Wakil Presiden selaku wakil pemerintah, mengeluarkan maklumat yang lazim disebut Maklumat Wakil Presiden No. X. Bunyi maklumat itu sebagai berikut:

MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X
KOMITE NASIONAL PUSAT, PEMBERIAN KEKUASAAN
LEGISLATIF KEPADA KOMITE NASIONAL PUSAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SESUDAH MENDENGAR pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk, kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut Pasal IV Aturan Peralihan dan Undang-Undang Dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat;

MENIMBANG bahwa di dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia, di sebelah pemerintah.

MENIMBANG selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat.

MEMUTUSKAN:
Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar daripada

Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Jakarta, 16 Oktober 1945

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MOHAMMAD HATTA

Dengan adanya maklumat tersebut, untuk sementara Indonesia sudah memiliki badan negara yang memiliki kekuasaan legislatif. KNIP yang semula sebagai Pembantu Presiden dan merupakan wadah pemusatan kehendak rakyat serta pengobar semangat perebutan kekuasaan dari Jepang, setelah dikeluarkan maklumat No. X itu KNIP diharapkan berperan sebagai MPR dan DPR, meskipun hanya bersifat sementara. Untuk menjalankan kegiatannya, telah dibentuk BPKNIP, yang diketuai oleh Sutan Syahrir.

4. Pembentukan Kabinet

Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Dalam kabinet ini para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau Kabinet Presidensial.

Kabinet RI yang pertama dibentuk oleh Presiden Sukarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas para menteri sebagai berikut.

a. Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranata Kusumah
b. Menteri Luar Negeri : Mr. Ahmad Subarjo
c. Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis
d. Menteri Kehakiman : Prof. Mr. Supomo
e. Menteri Kemakmuran : Ir. Surakhmad Cokroadisuryo
f. Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi
g. Menteri Kesehatan : Dr. Buntaran Martoatmojo

h.	Menteri Pengajaran	:	Ki Hajar Dewantara
i.	Menteri Penerangan	:	Mr. Amir Syarifuddin
j.	Menteri Sosial	:	Mr. Iwa Kusumasumantri
k.	Menteri Pekerjaan Umum	:	Abikusno Cokrosuyoso
l.	Menteri Perhubungan	:	Abikusno Cokrosuyoso
m.	Menteri Negara	:	Wahid Hasyim
n.	Menteri Negara	:	Dr. M. Amir
o.	Menteri Negara	:	Mr. R.M. Sartono
p.	Menteri Negara	:	R. Otto Iskandardinata



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 6.23 Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta dan para menteri kabinet pertama.

5. Pembentukan Berbagai Partai Politik

Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI (Partai Nasional Indonesia). Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu, berdirilah partai-partai politik di NKRI.

Beberapa partai politik yang kemudian terbentuk misalnya

a. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), berdiri tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh dr. Sukiman Wiryosanjoyo.
b. PKI (Partai Komunis Indonesia) berdiri 7 November 1945 dipimpin oleh Mr. Moh. Yusuf. Oleh tokoh-tokoh komunis, sebenarnya pada tanggal 2 Oktober 1945 PKI telah didirikan.
c. PBI (Partai Buruh Indonesia), berdiri tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Nyono.
d. Partai Rakyat Jelata, berdiri tanggal 8 Nopember 1945 dipimpin oleh Sutan Dewanis.
e. Parkindo (Partai Kristen Indonesia), berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Dr Prabowinoto.
f. PSI (Partai Sosialis Indonesia), berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin Amir Syarifuddin.
g. PRS (Partai Rakyat Sosialis), berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Sutan Syahrir.
h. PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), berdiri tanggal 8 Desember 1945 dipimpin oleh I.J. Kasimo.
i. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, berdiri tanggal 17 Desember 1945 dipimpin oleh JB Assa.
j. PNI (Partai Nasional Indonesia), berdiri tanggal 29 Januari 1946. PNI merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia (PRI), Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, yang masing-masing sudah berdiri dalam bulan November dan Desember 1945.

6. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia

Sebagai negara yang wilayahnya luas, tentara mutlak diperlukan sebagai benteng pertahanan. Sebutan TNI (Tentara Nasional Indonesia), lebih populer dengan sebutan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Bagaimana sejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia? Terbentuknya TNI berpangkal dari maklumat pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Kesatuan TKR kemudian berkembang menjadi TNI.

a. Badan Keamanan Rakyat

Beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Sukarno masih bersikap hati-hati. Hal ini berkaitan dengan sikap Jepang yang tidak senang kalau terjadi perubahan *status quo* (dari negara jajahan menjadi negara merdeka), apalagi sampai memiliki tentara. Sejak Jepang menyerah kepada Sekutu, Jepang harus menjaga Indonesia agar jangan sampai terjadi perubahan sampai Sekutu tiba di Indonesia. Oleh karena takut kepada pemerintah Sekutu, maka Jepang bersikap keras kepada Indonesia. Sikap keras dan ketidaksenangan Jepang terhadap Indonesia, misalnya melucuti persenjataan dan sekaligus membubarkan Peta pada tanggal 18 Agustus 1945. Jepang khawatir Peta akan menjelma menjadi tentara Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Sukarno bersikap lebih hati-hati, agar Republik Indonesia tetap dapat berlangsung.

Sikap Sukarno yang demikian itu tidak disenangi oleh para pemuda yang lebih bersifat revolusioner. Oleh karena itu, para pemuda memelopori pembentukan badan-badan perjuangan.

Sampai akhir bulan Agustus 1945, sikap hati-hati Sukarno masih tetap dipertahankan. Hal ini terbukti pada waktu diadakan sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Untuk menghadapi situasi dalam sidang itu diputuskan, untuk pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat). BKR merupakan bagian dari BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang). Tujuan dibentuknya BKR untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, BKR juga dibentuk di berbagai daerah, namun harus diingat bahwa BKR bukan tentara. Jadi, sampai akhir bulan Agustus 1945, Indonesia belum memiliki tentara.

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pada saat itu Indonesia belum mempunyai tentara kebangsaan. Sementara itu, tentara PETA tidak dapat langsung dijadikan sebagai tentara Indonesia karena saat itu Indonesia masih dalam *status quo* hingga kedatangan sekutu di Indonesia. Kemudian pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Oto Iskandar Dinata merencanakan untuk membentuk susunan pembagian sebagian wilayah, kepolisian negara, tentara kebangsaan dan perekonomian. Dalam pada itu PPKI mengusulkan, bahwa rencana bela negara dari BPUPKI yang mengandung politik perang tidak dapat diterima dan Tentara PETA di

Jawa dan Bali serta *Giyugun* di Sumatera harus dibubarkan karena bentukan Jepang. Untuk itulah Presiden Sukarno memanggil kalangan militer yang cakap untuk membentuk tentara kebangsaan yang kokoh. Otto Iskandar kemudian dibantu oleh dua tentara Peta, Kasman Singodimejo dan Abdul Kadir, untuk membentuk tentara kebangsaan. Abdul Kadir kemudian ditunjuk untuk menjadi ketua panitia khusus itu.

Pada tanggal 19 Agustus di luar parlemen itu, para pemuda yang dipimpin oleh Adam Malik mengadakan rapat di Prapatan 10. Hadir pula Kasman, Ki Hajar Dewantoro dan Sutan Sjahrir. Pada saat itu Presiden dan Wakil Presiden dipaksa untuk hadir, karena para pemuda ingin mengajukan tuntutan, yaitu lahirnya Tentara Republik Indonesia yang berasal dari bekas tentara PETA. Setelah melalui proses panjang, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat paripurna yang menghasilkan tiga hal yaitu, tentang Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pembentukan BKR ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemuda, para pemuda yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah dalam pembentukan BKR itu, kemudian membentuk badan-badan perjuangan. Badan-badan perjuangan atau juga dikenal dengan laskar, yaitu suatu organisasi perjuangan, yang tidak memiliki senjata, kurang disiplin, dan tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman.

Komite van Aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan

Demikian pula pemuda Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite van Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya di bawah Komite van Aksi seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia), BARA (Barisan Rakyat Indonesia) dan BBI (Barisan Buruh Indonesia).

Di berbagai daerah kemudian juga berkembang badan-badan perjuangan. Di Surabaya muncul BBI pada tanggal 21 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945, dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Ruslan Wijayasastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk PRI (Pemuda Republik Indonesia) bersama Bung Tomo pada tanggal 23 September.

Demikian halnya yang terjadi di Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang, di sana juga muncul berbagai badan perjuangan. Misalnya, Angkatan Muda dan Pemuda di Semarang, Angkatan Muda di Surakarta, Angkatan Muda Pegawai Kesultanan atau dikenal *Pekik* (Pemuda Kita Kesultanan) di Yogyakarta. Di Bandung berdiri Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan PRI (Pemuda Republik Indonesia).

Selain itu, juga muncul Barisan Banteng, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia). BPRI (Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia), dan juga muncul Hizbullah-Sabilillah. Bahkan orang-orang luar Jawa yang berada di Jawa membentuk badan perjuangan seperti KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) dan PIM (Pemuda Indonesia Maluku). Kemudian, muncul pula badan-badan perjuangan yang lebih bersifat khusus, misalnya TP (Tentara Pelajar), TGP (Tentara Genie Pelajar), dan TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar). Selanjutnya berkembang pula kelaskaran. Badan-badan perjuangan juga berkembang di luar Jawa, antara lain sebagai berikut.

a. di Aceh terdapat API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang dipimpin oleh Syamaun Gaharu dan BPI (Barisan Pemuda Indonesia) kemudian menjadi PRI (Pemuda Republik Indonesia) yang dipimpin oleh A. Hasyim
b. di Sumatera Utara terdapat Pemuda Republik Andalas;
c. di Sumatera Barat terdapat Pemuda Andalas dan Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat;
d. di Lampung terdapat API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang dipimpin oleh Pangeran Emir Mohammad Noor;
e. di Bengkulu terdapat PRI (Pemuda Republik Indonesia) dipimpin oleh Nawawi Manaf;
f. di Kalimantan Barat terdapat PPRI (Pemuda Penyongsong Republik Indonesia). Tokoh-tokohnya, antara lain Musani Rani dan Jayadi Saman;
g. di Kalimantan Selatan terdapat PRI (Persatuan Rakyat Indonesia) yang dipimpin oleh Rusbandi;
h. di Bali terdapat AMI (Angkatan Muda Indonesia) dan PRI (Pemuda Republik Indonesia); dan
i. di Sulawesi Selatan terdapat PPNI (Pusat Pemuda Nasional Indonesia) yang dipimpin oleh Manai Sophian, AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia), Pemuda Merah Putih, dan Penunjang Republik Indonesia.

Dengan munculnya badan-badan perjuangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa di seluruh tanah air telah siap menggelorakan revolusi untuk membersihkan kekuatan Jepang dari Indonesia.

b. Tentara Keamanan Rakyat

Sampai akhir bulan September 1945, ternyata Indonesia belum memiliki kesatuan dan organisasi ketentaraan secara resmi dan profesional. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta belum membentuk kesatuan tentara. Hal ini tampaknya sangat terpengaruh oleh sikap serta strategi politik yang cenderung pada usaha diplomasi. BKR hanya diprogram untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di daerah masing-masing. BKR kemudian menghimpun bekas-bekas anggota Peta, Heiho, Seinendan, dan lain-lain. BKR bukan merupakan kekuatan bersenjata yang bersifat nasional. Para pemuda belum puas dengan keberadaan BKR. Oleh karena itu, badan-badan perjuangan terus mengadakan perlawanan terhadap kekuatan Jepang.

Angkatan Perang Inggris yang tergabung dalam SEAC (*South East Asian Command*) mendarat di Jakarta pada tanggal 16 September 1945. Pasukan ini dipimpin Laksamana Muda Lord Louis Mountbatten yang mendesak pihak Jepang untuk mempertahankan *status quo* di Indonesia. Indonesia masih dipandang sebagai daerah jajahan seperti pada masa-masa sebelum 17 Agustus 1945. Dengan demikian, maka Jepang semakin keras dan berani untuk tetap mempertahankan diri dan melawan gerakan para pemuda yang sedang melakukan usaha perlucutan senjata dan perebutan kekuasaan.

Pada tanggal 29 September 1945, mendarat lagi tentara Inggris yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, panglima dari AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indies*). Kedatangan tentara AFNEI ternyata diboncengi oleh tentara Belanda yang disebut NICA (*Netherlands India Civil Administration*). Hal ini menimbulkan kemarahan bagi bangsa Indonesia. Akhirnya, timbul berbagai insiden dan perlawanan terhadap kekuatan asing, terutama terhadap Belanda.

Dengan demikian ancaman dari kekuatan asing semakin besar. Para pemimpin negara menyadari bahwa sulit mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa suatu tentara atau angkatan perang. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah memanggil bekas mayor KNIL, Urip Sumoharjo dan ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Urip Sumoharjo sejak zaman Belanda sudah memiliki pengalaman di bidang kemiliteran. Ia termasuk lulusan pertama dari Sekolah Perwira di Meester Cornelis yang didirikan Belanda.

Kemudian, dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Adapun maklumat itu berbunyi sebagai berikut.

> *Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat.*
>
> *Jakarta, 5 Oktober 1945*
> *Presiden Republik Indonesia*
>
> *Soekarno*

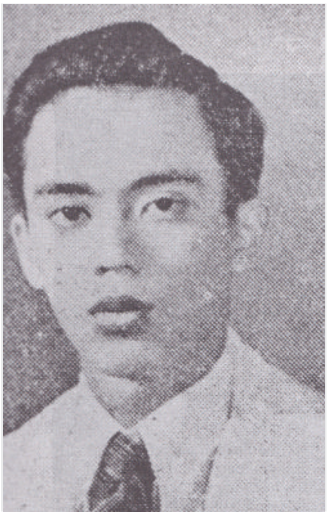
Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR. Sehari kemudian pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi (bekas komandan Peta) sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1945, KNIP mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekas-bekas tentara, Peta, KNIL (*koninklijk Nederlands Indisch Leger*), Heiho dan laskar-laskar yang ada untuk bergabung menjadi satu ke dalam TKR. Sementara itu, kesatuan aksi atau badan-badan perjuangan para pemuda yang bersifat setengah militer atau setengah organisasi politik (laskar-laskar) masih tetap diizinkan beroperasi apabila tidak ingin bergabung ke dalam TKR.

Personalia pimpinan TKR ternyata belum mantap. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak munculnya tokoh Supriyadi. Supriyadi hilang secara misterius sejak berakhirnya pemberontakan Peta di Blitar pada Februari 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Oktober 1945 diumumkan kembali pengangkatan pejabat-pejabat pimpinan di lingkungan TKR.

Susunan pimpinan TKR yang baru sebagai berikut. Menteri Keamanan Rakyat *ad interim*: Muhamad Suryoadikusumo

- Pimpinan Tertinggi TKR: Supriyadi
- Kepala Staf Umum TKR: Urip Sumoharjo

Ternyata, Supriyadi tidak kunjung datang. Oleh karena itu, secara operasional kepemimpinan yang aktif dalam TKR adalah Urip Sumoharjo. Ia memilih Markas Besar TKR di Yogyakarta dan membagi TKR dalam 16 divisi. Seluruh Jawa dan Madura dibagi dalam 10 divisi dan Sumatera dibagi menjadi 6 divisi.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 6.24 Supriyadi.

Mengingat Supriyadi tidak pernah muncul, maka atas prakarsa Markas Tertinggi TKR, pada tanggal 12 November 1945, diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Dalam, rapat pemilihan itu dihadiri oleh para Komandan Divisi, Sri Sultan Hamengkubuwana IX, dan Sri Mangkunegoro X. Rapat dipimpin oleh Urip Sumoharjo. Dalam rapat itu disepakati untuk mengangkat Kolonel Sudirman, Panglima Divisi V Banyumas sebagai Panglima Besar TKR dan sebagai Kepala Staf, disepakati mengangkat Urip Sumoharjo. Namun pengangkatan dan pelantikan Kolonel Sudirman baru dilaksanakan pada tanggal 18 Desember1945, setelah pertempuran Ambarawa selesai. Setelah pertempuran itu selesai, pangkat Sudirman menjadi Jenderal dan Urip Sumoharjo menjadi Letnan Jenderal.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 6.25 Urip Sumoharjo.

c. Dari TKR, TRI, ke TNI

Sejarah ketentaraan Indonesia terus mengalami perubahan pada masa awal kemerdekaan. TKR dengan sebutan keamanan rakyat, dinilai hanya merupakan kesatuan yang menjaga keamanan rakyat yang belum menunjukkan sebagai suatu kesatuan angkatan bersenjata yang mampu melawan musuh dengan perang bersenjata. Jenderal Sudirman ingin meninjau susunan dan tata kerja TKR. Kemudian atas prakarsa Markas Tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 tanggal 1 Januari 1946. Isi dari Penetapan Pemerintah itu adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat

diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Belum genap satu bulan, sebutan Tentara Keselamatan Rakyat diganti dengan TRI (Tentara Republik Indonesia). Hal ini berdasarkan pada Maklumat Pemerintah tertanggal 26 Januari 1946. Di dalam maklumat itu ditegaskan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan, atau tentara nasional. Namun dalam maklumat itu tidak menyinggung tentang kedudukan badan-badan perjuangan atau kelaskaran di luar TKR.

Di dalam Lingkungan Markas Tertinggi, TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut yang kemudian dikenal dengan ALRI (Angkalan Laut Republik Indonesia) dan TRI Angkatan Udara yang dikenal dengan AURI (Angkalan Udara Republik Indonesia).

Tanggal 17 Mei diadakan beberapa perubahan di dalam organisasi. Beberapa perubahan itu antara lain sebagai berikut.

1) Di lingkungan Markas Besar:
    a) Panglima Besar: Jenderal Sudirman, dan
    b) Kepala Staf Umum : Letnan Jenderal Urip Sumoharjo
2) Pengurangan jumlah divisi:
    a) Jawa - Madura yang semula 10 divisi dijadikan 7 divisi ditambah 3 brigade di Jawa Barat, dan
    b) Sumatera semula 6 divisi menjadi 3 divisi.
3) Dalam Kementerian Pertahanan:
    a) dibentuk Direktorat Jenderal bagian militer, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudibyo, dan
    b) dibentuk biro khusus yang menangani badan-badan perjuangan dan kelaskaran.

Situasi negara semakin genting. Aksi-aksi pihak tentara Belanda semakin mengancam kehidupan dan kelangsungan Republik Indonesia. Untuk menghadapi situasi yang semakin membahayakan ini, maka diperlukan kekuatan tentara yang kompak dan bersatu padu. Sementara dalam kenyataannya, Indonesia masih menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuatan bersenjata kita. Di samping tentara resmi TRI, ALRI, dan AURI, masih ada laskar-laskar. Pada umumnya kesatuan kelaskaran lebih condong kepada induk partainya yang seideologi dan belum tentu searah dengan perjuangan para tentara yang tergabung dalam TRI. Jelas ini akan memperlemah perjuangan bangsa dalam menghadapi aksi-aksi kaum Belanda.

Sehubungan dengan kenyataan itu maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekrit yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebut Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Panitia itu dipimpin sendiri oleh Presiden Sukarno.

Setelah panitia itu bekerja, akhirnya keluar Penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Mulai tanggal 3 Juni 1947, secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Segenap anggota angkatan perang yang tergabung dalam TRI dan anggota kelaskaran dimasukkan ke dalam TNI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan Udara (TNI AU). Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Saat ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali bernama Tentara Nasional Indonesia.

KESIMPULAN

1. *Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, baru dimulai tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai penyangga demokrasi suatu negara dan pembinaan kehidupan berpolitik, diperlukan adanya partai-partai politik. Karena itu pemerintah melalui Wakil Presiden telah mengeluarkan maklumat tanggal 3 November 1945. Berdirilah kemudian beberapa partai politik.*
2. *Sementara untuk menjaga keamanan negara masyarakat membentuk kesatuan aksi dan badan-badan perjuangan, terutama waktu itu untuk melucuti tentara Jepang.*
3. *Keadaan negara ternyata semakin terancam setelah datangnya tentara Sekutu dan diboncengi tentara NICA. Oleh karena itu, keberadaan tentara sangat diperlukan. Maka keluarlah maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 yang menandai berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). TKR ini terus dikembangkan dan terus disempurnakan, menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).*

LATIH UJI KOMPETENSI

1. Setelah proklamasi kemerdekaan, langkah pertama bangsa Indonesia adalah melengkapi struktur pemerintahan. Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan bangsa Indonesia dalam melengkapi struktur pemerintahan tersebut!

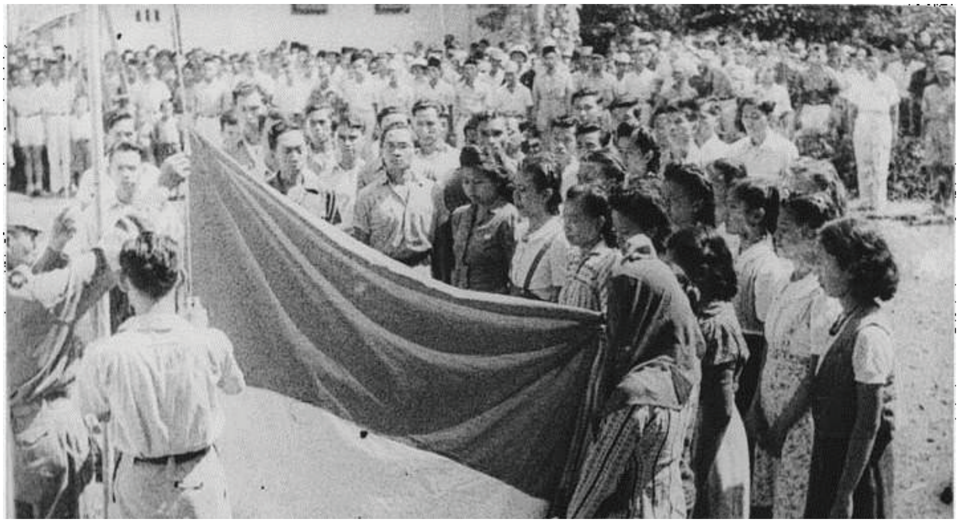
2. Pada masa awal kemerdekaan, sistem kabinet apa yang berlaku di Indonesia? Jelaskan alasan kamu!

3. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia belum memiliki anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat. Siapa yang melakukan kegiatan legislatif pada masa awal kemerdekaan? Jelaskan peranannya!

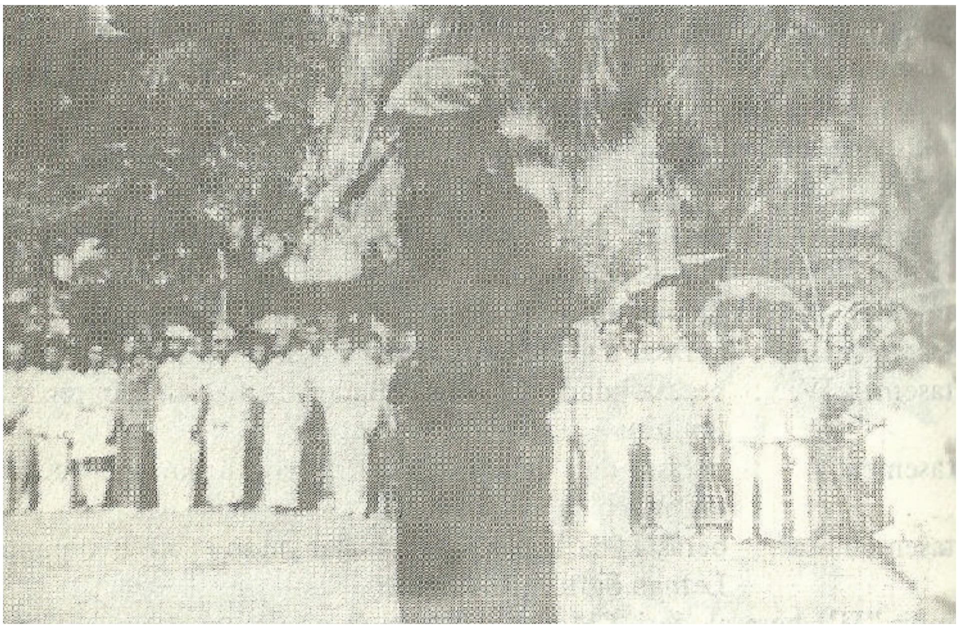
Tugas

Coba lakukan identifikasi kesatuan aksi dan badan-badan perjuangan yang pernah berkembang di lingkungan mu. Tuliskan dalam bentuk laporan!

C. Proklamator dan Peran Para Tokoh Sekitar Proklamasi



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 6.27 Peristiwa pengibaran bendera merah putih pada saat upacara proklamasi kemerdekaan.



Sumber: Pengabdian Selama Perang Kemerdekaan Bersama Brigade Ronggolawe, 1985.
Gambar 6.28 upacara peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia di salah satu wilayah Indonesia.

Mengamati Lingkungan

Melakukan refleksi nilai-nilai kepahlawanan dari para tokoh dalam memperjuangkan kedaulatan kemerdekaan Indonesia, merupakan sesuatu yang sangat penting. Banyak pelajaran yang dapat kita peroleh.

» *Coba amati baik-baik gambar pengibaran bendera merah putih pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di halaman sebelumnya dan serangkaian peristiwa Proklamasi pada bahasan sebelumnya!*

1. *Berdasarkan gambar tersebut coba rumuskan beberapa pertanyaan terkait dengan gambar tersebut.*
2. *Siapa yang mengibarkan bendera tersebut?*
3. *Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan tersebut?*
4. *Siapa yang mengetik naskah proklamasi?*
5. *Siapa yang menyusun teks proklamasi?*
6. *Siapa yang menjahit bendera merah putih tersebut?*
7. *Siapa yang menyiapkan tiang bendera untuk upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi?*
8. *Siapa yang terlibat dalam penyebarluasan berita proklamasi?*
9. *Bagamana ancaman dan hambatan mereka dalam melaksanakan kegiatan itu?*
10. *Mengapa mereka melakukan kegiatan-kegiatan di atas?*

Pertanyaan-pertanyaan di atas pantas kita ajukan dan kita cari jawabannya. Kita sadar bahwa proklamasi kemerdekaan bukan perjuangan orang per orang, tetapi perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Kita perlu memahami perjuangan mereka, karena mereka berjuang untuk bangsa Indonesia, yang berarti untuk kehidupan kita sekarang dan generasi penerus bangsa Indonesia. Dengan memahami bagaimana mereka berjuang, akan memberikan inspirasi kepada kita untuk menghargai mereka dan mendorong kita berjuang lebih giat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Untuk menghitung satu demi satu para pahlawan sekitar proklamasi kemerdekaan tidaklah mungkin. Oleh karena itu, kita akan melacak sebagian tokoh yang terlibat dalam perjuangan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa saja para tokoh yang berjuang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana peran mereka dalam perjuangan proklamasi kemerdekaan? Nilai apa yang pantas kita amalkan dari semangat perjuangan para tokoh tersebut? Mari kita telusuri melalui kajian di bawah ini!

Memahami Teks

Banyak tokoh penting yang berperan di berbagai peristiwa di sekitar Proklamasi. Beberapa tokoh penting itu, antara lain sebagai berikut.

1. Peran Sang Proklamator

a. Ir. Sukarno



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.29 Ir. Sukarno.

Sukarno atau Bung Karno, lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Tahun 1927, bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena perjuangannya, ia seringkali keluar-masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua Putera, *Chuo Sangi In* dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI.

Begitu tiba di tanah air, dari perjalanannya ke Saigon, Sukarno menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu antara lain, pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Hal ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Moh. Hatta, Sukarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sampai akhirnya ia harus diungsikan ke Rengasdengklok. Sepulangnya dari

Rengasdengklok ia bersama Moh. Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi, dan menuliskannya pada secarik kertas. Sukarno bersama Moh. Hatta diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi tersebut.

Tanggal 17 Agustus 1945, peranan Sukarno semakin penting. Secara tidak langsung ia terpilih menjadi tokoh nomor satu di Indonesia. Sukarno dengan didampingi Moh. Hatta, diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Sukarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Sukarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar.

b. Drs. Moh. Hatta



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.30 Moh. Hatta.

Tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah Drs. Moh. Hatta. Ia dilahirkan di Bukittinggi tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI Baru.

Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin PUTERA, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Moh. Hatta dan Sukarno menjadi dwi tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Bung Karno, ia juga pergi menghadap Terauchi di Saigon. Setelah pulang, Moh.Hatta menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar bersama Sukarno bersedia menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya.

Moh. Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Moh. Hatta tampil sebagai tokoh nomor dua dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980, dimakamkan di pemakaman umum Tanah Kusir Jakarta.

2. Peran para Tokoh Sekitar Proklamasi

a. Ahmad Subarjo



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.31 Ahmad Subarjo.

"Saya menjamin bahwa tanggal 17 Agustus 1945 akan terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Saudara-saudara ragu, nyawa sayalah yang menjadi taruhannya". Ucapan itu bukan main-main bagi Ahmad Subarjo. Ucapan tersebut berhasil meyakinkan Golongan Muda, bahwa para senior akan melaksanakan proklamasi sesuai dengan desakan para pemuda. Menjadi taruhan untuk peristiwa yang sangat penting menunjukkan bahwa Subarjo tidak menghitung jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Kerelaan tokoh untuk mengorbankan diri demi bangsa dan negara adalah salah satu teladan yang perlu selalu kita lakukan.

Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional ia aktif di PI dan PNI. Kemudian pada masa pendudukan Jepang sebagai *Kaigun*, bekerja pada Kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang pimpinan Laksamana Maeda. Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Ahmad Subarjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta Pusat.

Tokoh Ahmad Subarjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengasdengklok. Sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo, akhirnya Ir. Sukarno, Moh.Hatta, dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta dini hari, di rumah Maeda dilaksanakan perumusan teks proklamasi, Ahmad Subarjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi.

b. Sukarni Kartodiwiryo



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.32 Sukarni Kartodiwiryo.

Coba kamu perhatikan gambar Sukarni berikut ini! Tokoh inilah yang sering menjadi perdebatan para pembaca sejarah Indonesia sekitar proklamasi kemerdekaan. Banyak yang mengira tokoh ini perempuan, karena Sukarni lebih banyak digunakan untuk nama perempuan di Jawa Tengah.

Sukarni Kartodiwiryo adalah seorang pemuda gagah berani. Ia merupakan salah seorang pimpinan gerakan pemuda di masa proklamasi. Tokoh ini dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Mei 1971. Sejak muda, ia sudah aktif dalam pergerakan politik. Semasa pendudukan Jepang, ia bekerja pada kantor berita *Domei*. Kemudian Ia aktif di dalam gerakan pemuda. Bahlan ia menjadi pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31 Jakarta.

Sukarni merupakan pelopor penculikan Sukarno dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok. Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Sukarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi.

c. Sayuti Melik

Tokoh yang lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta ini, berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan Sukarno-Hatta. Sejak muda, Sayuti Melik sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Tahun 1942 menjadi pemimpin redaksi surat kabar *Sinar Baru* Semarang.



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.33 Sayuti Melik.

Nama tokoh ini semakin mencuat pada sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia telah menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan rumah Maeda. Bahkan akhirnya ia dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Sukarno.

d. Burhanuddin Mohammad Diah



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 6.34 Burhanuddin Mohammad Diah.

Burhanuddin Mohammad Diah (B.M. Diah) lahir di Kotaraja pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik. Sejak tahun 1937 sudah menjadi redaktur berbagai surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang, ia bekerja pada radio militer. Pada tahun 1942-1945, ia bekerja sebagai wartawan pada harian *Asia Raya*.

Pada sekitar peristiwa proklamasi, B.M. Diah sudah menjadi wartawan yang terkenal. Pada malam sewaktu akan diadakan perumusan teks proklamasi, B.M. Diah banyak melakukan kontak dengan pemuda, yaitu untuk datang ke rumah Maeda. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga sangat berperan dalam upaya penyebarluasan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

e. Latif Hendraningrat



Sumber: Pengabdian Selama Perang Kemerdekaan Bersama Brigade Ronggolawe, 1985.
Gambar 6.35 Latif Hendraningrat.

Latif Hendraningrat adalah salah seorang komandan Peta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur No. 56. Misalnya ia harus mencari dan menjemput Moh. Hatta.

Pada saat pelaksanaan proklamasi, setelah menyiapkan barisan, ia mempersilakan Sukarno membacakan teks proklamasi. Kemudian, Latief Hendraningrat dengan dibantu S. Suhud mengibarkan Sang Saka Merah Putih, dan yang membantu membawakan bendera Merah Putih adalah SK. Trimurti.

f. S. Suhud

S. Suhud adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera Merah Putih yang akan dikibarkan. Oleh karena gugup dan tegang, tiang yang digunakan adalah sebatang bambu, padahal tidak terlalu jauh dari rumah Sukarno ada tiang bendera dari besi. S. Suhud bersama Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera Merah Putih di halaman rumah Sukarno pada saat Proklamasi 17 Agustus 1945.

g. Suwiryo

Suwiryo adalah walikota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara Proklamasi Kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara.

h. dr. Muwardi

Tokoh muda Muwardi, bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia telah menugaskan anggota Barisan Pelopor dan Peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Setelah upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ia juga membagi tugas kepada para anggota Barisan Pelopor dan Peta untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Moh. Hatta.

i. Sutan Syahrir

Tokoh ini pada zaman pendudukan Jepang memilih aktif dalam gerakan bawah tanah bersama beberapa pemuda yang lain. Sutan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada tanggal 5 maret 1909. Setelah lulus di HIS (SD sekarang), ia melanjutkan ke MULO (SMP) di Medan. Kemudian ia melanjutkan studi di AMS atau SMA sekarang, di bagian A. di Bandung. Setelah itu, ia aktif dalam berbagai organisasi. Bahkan ia ikut mendirikan *Jong Indonesia*. Di masa penjajahan



Sumber: https://carapedia.com/sutan_sjahrir_bung_kecil_menoreh_sejarah_besar_info4034.html, 5-1-2016.

Gambar 5.30 Sutan Syahrir

Belanda, ia sudah militan dalam pergerakan politik. Ia juga pernah ditangkap pada tahun 1934.Ia dipenjarakan di Cipinang, kemudian bersama Drs. Moh. Hatta dibuang ke Digul, kemudian dipindah ke Banda Neira, Selanjutnya dipindah lagi ke Sukabumi, Jawa Barat.

Pada masa akhir pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi termasuk pemuda yang aktif untuk ikut mendesak Bung Hatta dan Bung Karno agar segera memerdekakan Indonesia, karena ia dapat mendengarkan radio bahwa Jepang telah menyerah. Setelah merdeka, pada awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri RI.

j. Frans Sumarto Mendur

Tokoh Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi. la bergabung dengan kawan-kawan dari *Indonesia Press Photo Senice* atau *Ipphos.*

k. Syahruddin

Syahruddin adalah seorang wartawan *Domei.* la dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Oleh karena gedung siaran dijaga oleh Jepang, maka terpaksa melalui belakang, yaitu dengan memanjat tembok belakang gedung dari JI. Tanah Abang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran.

l. Wuz dan Yusuf Ronodipuro

Tokoh F. Wuz dan Yusuf Ronodipuro berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak *Kempetai.*

m. Lambertus Nicodemus Palar

Lambertus Nicodemus Palar atau lebih dikenal dengan L.N.Palar adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Ia lahir di Tomohon, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 1900. Pendidikan yang ditempuhnya adalah sekolah MULO

di Tondano, kemudian melanjutkan sekolah di Yogyakrta di AMS dan ITB, namun Palar tidak menyelesaikan kuliahnya di ITB. Ia kemudian meneruskan sekolah di Amsterdam sambil bekerja.

Pada tahun 1947, L.N. Palar diminta oleh Presiden Sukarno untuk menjadi juru bicara RI di PBB. Pada akhir tahun 1947 dibantu oleh Sudarpo, Soedjatmoko, dan Sumitro, Palar membuka kantor perwakilan RI di New York. Sebelum pengakuan kedaulatan RI 1949, status Palar saat itu adalah sebagai peninjau. Kemudian pada tahun 1950 setelah Indonesia mendapat kedaulatan penuh dan Indonesia menjadi anggota PBB ke-60, Palar resmi sebagai perwakilan RI dengan status keanggotaan penuh.

n. Sumitro Djojohadikusumo

Begawan ekonomi Indonesia yang idealis ini selalu konsisten terhadap sikapnya yang dianggap benar. Sumitro lahir di Kebumen, Jawa Tengah 29 Mei 1917. Ayahnya Margono adalah pendiri Bank BNI. Setelah menamatkan sekolahnya di *Hogere Burger School* (HBS), ia langsung berangkat ke Belanda. Ia juga pernah belajar di Barcelona dan Rotterdam untuk mempelajari ekonomi. Dalam tempo tiga bulan ia telah berhasil meraih gelar *Bachelor of Arts* (BA). Ia juga pernah sekolah ekonomi di Universitas Sorbonne, Paris. Di Paris Sumitro mulai masuk ke kelompok sosialis. Ia kemudian belajar tentang konsisten pada prinsip hidup, pengabdian, perlawanan, dan keadilan sosial. Sumitro kemudian ke Belanda untuk mendapatkan gelar *Master of Arts* (MA). Bersama-sama dengan L.N. Palar, Sumitro memperjuangkan RI melalui jalur diplomasi.

» *Banyak tokoh berperan dalam proses persiapan dan pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945. Coba kamu pilih salah satu tokoh tersebut, kemudian carilah buku biografi tokoh itu, kemudian buatlah rangkuman perjuangan tokoh tersebut sekitar 2-3 halaman! Nilai atau karakter apa yang menurutmu perlu kita tiru dari tokoh tersebut?*

KESIMPULAN

1. *Proklamasi 17 Agustus 1945, besar bersama bangsa Indonesia.*
2. *Proklamasi 17 Agustus 1945 juga merupakan kehendak dari Tuhan Yang Esa.*
3. *Proklamasi 17 Agustus 1945 melibatkan peranan banyak orang. Bahkan bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi sebagian bangsa lain juga bersimpati untuk perjuangan bangsa Indonesia.*
4. *Para tokoh memiliki peranan berbeda-beda dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mereka berperan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang harus dilakukan.*
5. *Para tokoh pejuang itu senantiasa rela berkorban dan tanpa pamrih untuk berjuang mencapai kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia bebas dari penjajahan.*
6. *Mereka bersatu saling bahu membahu bersama rakyat rela berkorban tanpa pamrih untuk mempertahankan tanah air Indonesia.*

LATIH UJI KOMPETENSI

1. Mengapa pada saat Jepang menyerah kepada Sekutu, di Indonesia disebut sebagai mengalami *vacuum of power*?

2. Jelaskan bahwa pada saat proklamasi kemerdekaan, negara Republik Indonesia belum memiliki semua kelengkapan negara! Tindakan apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia untuk melengkapi kelengkapan negara tersebut?

3. Salah satu kegiatan yang dilakukan pasca proklamasi kemerdekaan adalah pembentukan KNIP. Apa yang melatarbelakangi pembentukan KNIP dan bagaimana fungsi badan tersebut bagi negara Indonesia?

4. Pada saat proklamasi kemerdekaan, di Jalan Pegangsaan Timur tidak terjadi penyerangan Jepang terhadap para peserta upacara proklamasi, padahal pada saat tersebut tentara Jepang di Indonesia masih lengkap. Mengapa hal tersebut dapat terjadi!

5. Menurut pendapatmu, apakah kamu sepakat dengan perjuangan golongan muda yang menuntut percepatan proses proklamasi kepada Sukarno-Hatta? Lebih menguntungkan mana bangsa Indonesia memproklamirkan sendiri sesuai keinginan golongan muda atau menunggu sidang PPKI? Jelaskan alasanmu!

Tugas

Buatlah penulisan tentang peran seorang tokoh dari lingkungan kamu yang ikut berperan dan berjuang di sekitar Proklamasi.

LATIH ULANGAN AKHIR BAB

1. Bagaimana penilaian kamu tentang adanya Janji Kaiso, tentang kemerdekaan Indonesia?

2. Mengapa terjadi perbedaan antara para pemuda dengan Sukarno-Hatta dan mengapa terjadi peristiwa Rengasdengklok?

3. Bagaimana kira-kira perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya setelah terjadi kemerdekaan?

4. Jelaskan pentingnya NKRI bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia!

5. Lakukan identifikasi departemen dan nama-nama menterinya, serta pembagian provinsinya!

6. Mengapa pada awal kemerdekaan kondisi perekonomian bangsa Indonesia dikatakan sangat memprihatinkan?

7. Apa peran dan posisi KNIP dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan?

8. Jelaskan, mengapa perlu partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia!

9. Rumuskan nilai-nilai kejuangan yang berkaitan dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945!

Tugas

Buatlah biografi singkat tentang tokoh Sukarno atau Moh. Hatta.

BAB 7
Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI

……Sejarah Perundingan yang sudah-sudah menunjukkan
bahwa pokok kesulitan terletak pada permasalahan kedaulatan,
yaitu kedaulatan Belanda berdasarkan sejarah.
Tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Proklamasi,
sudah tercetus revolusi di Indonesia.
Setelah itu, perjuangan bangsa Indonesia mengalir dalam satu saluran tertentu,
karena waktu itu bangsa Indonesia sudah menyatakan diri
sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Setelah hari ini jugalah bangsa Indonesia bertindak ke luar atas nama negaranya
yang diwujudkan dalam RI

Kutipan Pidato Hatta dalam Konferensi Meja Bundar

Sudah cukup lama bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan. Sebagai negara yang besar, dengan wilayah yang luas, dan penduduk yang banyak, kedaulatan dan keutuhan negara menjadi sebuah tantangan. Para pemimpin dan rakyat selalu berjuang untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai negara yang luas dan besar jumlah penduduknya, apakah kamu melihat ancaman terhadap negara kita? Apakah masih ada ancaman asing terhadap kedaulatan bangsa Indonesia? Apakah masih ada gerakan yang ingin memisahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah masih ada yang meragukan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan landasan hukum Negara Republik Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pantas kita renungkan, karena ancaman dan tantangan akan selalu

ada baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman terhadap kelangsungan NKRI terjadi sejak Negara Indonesia terbentuk pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bagaimana bentuk ancaman-ancaman terhadap kelangsungan Negara Republik Indonesia? Bagaimana para pahlawan dan tokoh kita menghadapinya? Kajian lebih dalam masalah ini harus kita lakukan, agar sebagai generasi penerus kita dapat memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan ancaman terhadap kelangsungan Negara Indonesia.



Sumber: Dokumen Kemdikbud, 2014.
Gambar 7.1 Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dengan ditandu.

PETA KONSEP

Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI

- Terbentuknya Pemerintahan RI
- Sikap Sekutu yang mendua
- Ambisi Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia

Perkembangan dan Tantangan pada Awal Kemerdekaan

Perbedaan strategi antara Sipil dan Militer Indonesia

Konflik Indonesia dengan Sekutu dan NICA

Perjuangan Bangsa: Antara Perang dan Damai

Nilai-Nilai Kejuangan Masa Revolusi

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari kajian ini, diharapkan kamu dapat:

1. *Menganalisis perkembangan dan tantangan awal kemerdekaan Indonesia.*
2. *Mengevaluasi perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan melalui perang dan diplomasi.*
3. *Merekontruksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan.*
4. *Mengamalkan nilai-nilai perjuangan para tokoh masa Revolusi.*

ARTI PENTING

Melacak sejarah proses kemerdekaan bangsa Indonesia sangat penting untuk memberikan kesadaran betapa berat perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Mempelajari materi ini juga akan selalu mengingatkan kita kepada ancaman yang mengusik kemerdekaan Indonesia. Karena itu kita akan selalu berhati-hati dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Kita semua tentu mencintai perdamaian, tetapi kecintaan kita pada kemerdekaan lebih besar.

A. Tantangan Awal Kemerdekaan

Mengamati Lingkungan



Sumber: Dokumen Kemdikbud, 2014.

Gambar 7.2 Monumen Tugu Pahlawan Surabaya.

» *Coba amati baik-baik monumen Tugu Pahlawan Surabaya di atas!*

1. *Mengapa dibangun Tugu Pahlawan tersebut?*
2. *Apa hubungan tugu tersebut dengan perjuangan bangsa Indonesia?*
3. *Bagaimana makna perjuangan para pahlawan tersebut bagi bangsa Indonesia?*

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan titik akhir perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Belanda yang telah ratusan tahun merasakan kekayaan Indonesia enggan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekutu yang telah memenangkan Perang Dunia II merasa memiliki hak atas nasib bangsa Indonesia. Belanda mencoba masuk kembali ke Indonesia dan menancapkan kolonialisme dan imperialismenya. Sementara kondisi sosial ekonomi Indonesia masih sangat memprihatinkan, perangkat-perangkat kenegaraan juga baru dibentuk, Indonesia ibarat bayi baru lahir masih lemah, tetapi merdeka adalah harga mati. Berbagai upaya bangsa asing untuk menguasai kembali bangsa Indonesia ditentang dengan berbagai cara. Pertempuran heroik dengan korban ribuan jiwa terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tidak terhitung dengan jelas berapa jumlah korban jiwa dari pertempuran mempertahankan bangsa Indonesia tersebut, bahkan banyak pahlawan tidak dikenal yang berguguran. Nah, bagaimana kondisi awal Indonesia merdeka dan bagaimana proses perjuangan bangsa Indonesia berikutnya? Mari kita telusuri melalui kajian di bawah ini!

Memahami Teks

1. Kondisi Awal Indonesia Merdeka

Secara politis keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini tidak lain karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Sebagai contoh rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Jepang beralasan bahwa ia diminta oleh Sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan *status quo.* Di samping menghadapi kekuatan Jepang, bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama Sekutu, dan juga Belanda atau NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. Pemerintahan memang telah terbentuk, beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia, tetapi karena baru awal kemerdekaan tentu masih banyak kekurangan. PPKI yang keanggotaannya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih Presiden-Wakil Presiden. Bahkan, untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk TNI.

Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali, sementara nilai tukarnya sangat rendah. Permerintah RI sendiri tidak bisa melarang beredarnya mata uang tersebut, mengingat Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri. Sementara kas pemerintah kosong, waktu itu berlaku tiga jenis mata uang, yaitu *De Javasche Bank*, uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Bahkan, setelah NICA datang ke Indonesia juga memberlakukan mata uang NICA. Kondisi perekonomian ini semakin parah karena adanya blokade yang dilakukan NICA. Belanda juga terus memberi tekanan dan teror terhadap pemerintah Indonesia. Inilah yang menyebabkan Jakarta semakin kacau sehingga pada tanggal 4 Januari 1946 Ibu Kota RI pindah ke Yogyakarta. Kemudian untuk mengatasi keadaan keuangan, pada 1 Oktober 1946 Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI (Oeang Republik Indonesia). Sementara itu uang NICA dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah.

Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan, tidak ada lagi diskriminasi. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sementara dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Menteri Pendidikan dan Pengajaran juga sudah diangkat. Kamu tahu siapa Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pertama di Indonesia?



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960. 1995.

Gambar 7.3 Mata uang provinsi Sumatera.

» *Nah, bagaimana uraian secara detail mengenai keadaan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia pada awal kemerdekaan dapat dibaca buku-buku sejarah Indonesia yang ada.*

2. Kedatangan Sekutu dan Belanda

Tentu kamu masih ingat bagaimana Jepang menyerah kepada Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 membuat analogi bahwa Sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam Sekutu. Belanda adalah salah satu negara yang berada di kelompok Sekutu. Apakah kamu masih ingat bagaimana Belanda saat kalah dan menyerahkan kekuasaan kepada Jepang? Apakah Belanda kembali ke tanah airnya? Setelah Belanda kalah dengan Jepang, mereka melarikan diri ke Australia.

Bagaimana kondisi Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu? Bagi Sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa *vacum of power* atau kekosongan pemerintahan. Karena itu, logika Belanda adalah kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Dengan kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Bagi Sekutu, setelah selesai PD II, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggung jawab Sekutu. Sekutu memiliki tanggung jawab perlucutan senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang? Bayangan Belanda tentang Indonesia jauh dari kenyataan. Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan bayangan Belanda dan Sekutu. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yakni akan terjadi pertentangan atau konflik antara Indonesia dengan Sekutu ataupun Belanda.

Bagaimana dampak kedatangan Sekutu ke Indonesia? Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi NICA. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah PD II, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan *Civil Affairs Agreement.* Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatra sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC *(South East Asia Command)*. Di dalam perundingan itu dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut.

a. Fase pertama, tentara Sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
b. Fase kedua, setelah keadaan normal pejabat-pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu.

Setelah diketahui Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, maka Belanda mendesak Inggris agar segera mensahkan hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 1945 hasil perundingan tersebut disahkan.

Berdasarkan Persetujuan Potsdam, isi *Civil Affairs Agreement* diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SWPAC (*South West Pasific Areas Command*).

Untuk melaksanakan isi Perjanjian Potsdam, maka pihak SWPAC di bawah Lord Louis Mountbatten di Singapura segera mengatur pendaratan tentara Sekutu di Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 September 1945, wakil Mountbatten, yakni Laksamana Muda WR Patterson dengan menumpang Kapal Cumberland, mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam rombongan Patterson ikut serta Van Der Plass seorang Belanda yang mewakili H.J. Van Mook (Pemimpin NICA).

» *Pada saat perundingan antara Belanda dan Inggris di London, Parlemen Inggris telah memutuskan kepada Pemerintah Inggris untuk tidak menggunakan pasukannya untuk membantu pihak lain selain untuk melaksanakan tugas Sekutu.*

Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, maka Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indiers*) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Mereka tergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India, yang sering disebut sebagai tentara Gurkha. Tugas tentara AFNEI sebagai berikut.



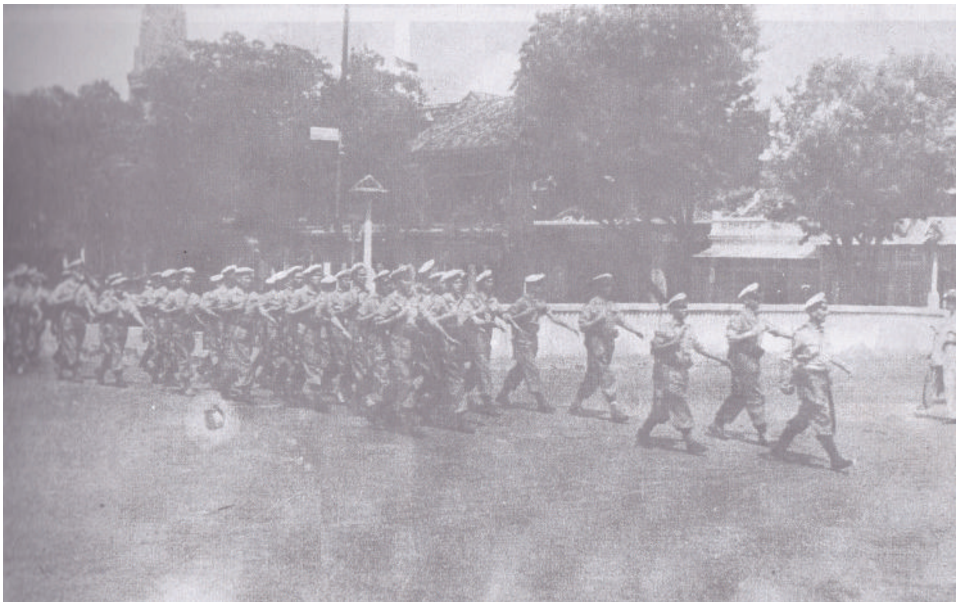
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.4 Van der Plass.

a. menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat.
b. membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu;
c. melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya;
d. menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban, dan keamanan, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil; dan
e. mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku.

Pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNEI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kekuatan pasukan AFNEI dibagi menjadi tiga divisi, yaitu sebagai berikut.
a. Divisi India 23 di bawah pimpinan Jenderal D.C Hawthorn. Daerah tugasnya di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta.
b. Divisi India 5 di bawah komando Jenderal E.C Mansergh bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat di Surabaya.
c. Divisi India 26 di bawah komando Jenderal H.M Chambers, bertugas di Sumatra, pusatnya ada di Medan.

Kedatangan tentara Sekutu diboncengi NICA yang akan menegakkan kembali kekuatannya di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap Sekutu dan bersikap anti Belanda.

Sementara Christison sebagai pemimpin AFNEI menyadari bahwa untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah RI. Oleh karena itu, Christison bersedia berunding dengan pemerintah RI. Selanjutnya, Christison pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan pengakuan secara *de facto* tentang negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya pernyataan tersebut banyak dilanggarnya. Sebagai bukti akan kita lihat dalam kajian di berikut ini.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.5 Kedatangan tentara Sekutu di Indonesia.

3. Merdeka atau Mati

Kedatangan Sekutu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia. Apalagi dengan memboncengnya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai upaya penentangan dan perlawanan dari masyarakat. Bagaimana peristiwa kekerasan akibat kedatangan Sekutu di Indonesia terjadi? Mari kita simak kajian di bawah ini.

a. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang

Berita proklamasi terus menyebar ke penjuru tanah air. Pemindahan kekuasaan dari pendudukan Jepang ke Indonesia juga terus dilakukan. Pada tanggal 19 Agustus 1945, sekitar pukul 13.00 WIB berkumandang lewat radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia terus dilakukan. Hal ini semakin membakar semangat para pemuda Semarang dan sekitarnya untuk melakukan perebutan kekuasaan.

Bahkan Wongsonegoro selaku pimpinan pemerintahan di Semarang mengeluarkan pernyataan atau perintah sebagai berikut.

Berdasarkan atas pengumuman-pengumuman Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional di Jakarta, maka dengan ini kami atas nama rakyat Indonesia mengumumkan sementara aturan-aturan pernerintahan untuk menjaga keamanan umum di daerah Semarang.

1. *Mulai hari ini tanggal 19 Agustus 1945 jam 13.00 Permerintah RI untuk daerah Semarang mulai berlaku.*
2. *Terhadap segala perbuatan yang menentang pemerintah RI akan diambil tindakan yang keras.*
3. *Senjata api, kecuali yang di tangan mereka yang berhak memakainya harus diserahkan kepada polisi.*
4. *Hanya bendera Indonesia Merah Putih boleh berkibar.*
5. *Terhadap segala perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan keras.*
6. *Selanjutnya semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagaimana biasa.*

Semarang, 19 Agustus 1945
Kepala Pemerintahan RI Daerah Semarang
Wongsonegoro

Suasana di Semarang semakin panas. Jepang tidak menghiraukan seruan pemerintahan di Semarang. Pada tanggal 7 Oktober 1945, ribuan pemuda Semarang mengerumuni tangsi tentara Jepang, *Kedobutai* di Jatingaleh. Sementara pimpinan mereka sedang berunding di dalam tangsi untuk membahas mengenai penyerahan senjata. Perundingan itu berjalan tersendat-sendat, tetapi akhirnya disepakati penyerahan senjata secara bertahap.

Ketegangan antara kedua belah pihak terus berlanjut. Pada tanggal 14 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh para pemuda ke penjara Bulu, Semarang. Dalam perjalanan, sebagian dari para tawanan berhasil melarikan diri dan minta perlindungan kepada batalion *Kedobutai*. Oleh karena itu, tanpa menunggu perintah, para pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata terhadap Jepang. Terjadilah pertempuran sengit antara rakyat Indonesia melawan pasukan Jepang. Pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran Lima Hari di Semarang.

Pada tanggal 14 Oktober 1945, pada petang harinya, petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air minum di Wungkal diserang oleh pasukan Jepang. Mereka dilucuti dan disiksa di tangsi *Kedobutai* Jatingaleh. Kemudian, di jalan Peterongan terdengar kabar bahwa air ledeng di Candi telah diracuni oleh Jepang. Oleh karena rakyat menjadi gelisah, dr. Kariadi, kepala laboratorium dinas Purusara Semarang ingin mengecek persediaan air tersebut namun ia dibunuh oleh tentara Jepang. Hal ini telah menambah sengitnya pertempuran antara para pemuda melawan tentara Jepang.

Para pemuda berhasil menangkap Mayor Jenderal Nakamura di kediamannya, di Magelang. Tokoh Jepang ini ditahan oleh para pemuda. Hal ini semakin meningkatkan kemarahan Jepang. Pada hari kedua dan ketiga Jepang berusaha dapat menguasai daerah Semarang kembali.

Dalam pertempuran itu Jepang membagi pasukannya menjadi tiga kekuatan sebagai berikut.

a. Poros Barat, sasarannya penduduk markas *Kempetai* di Karangasem yang telah dikuasai para pemuda. Selain itu, juga untuk menghambat gerakan bantuan pasukan dari Pekalongan dan Kendal.
b. Poros Tengah, dengan sasaran menguasai markas AMRI di Hotel Du Pavillon.
c. Poros Timur, dengan sasaran menduduki Sekolah Teknik dan mencegah datangnya bantuan BKR dari Demak, Pati, dan Rembang. Sementara itu, dari pihak Indonesia telah datang bantuan dari berbagai penjuru, baik dari arah Barat (Kendal dan Weleri), juga dari Timur, seperti dari Demak, Kudus, Pati, Purwodadi, bahkan dari Selatan seperti dari Solo, Magelang, dan Yogyakarta.

Tanggal 17 Oktober 1945, tercapai suatu perundingan mengenai gencatan senjata yang diadakan di Candi Baru. Pihak Indonesia juga menyetujui perundingan tersebut. Sekalipun telah disepakati adanya gencatan senjata, ternyata Jepang masih melanjutkan pertempuran. Pada tanggal 18 Oktober 1945 (hari kelima), Jepang berhasil mematahkan berbagai serangan para pemuda. Pada hari itu, telah datang beberapa utusan pemerintah pusat dari Jakarta untuk merundingkan soal keamanan dan perdamaian di Semarang. Beberapa tokoh yang hadir dari Jakarta waktu itu, antara lain Kasman Singodimejo dan Sartono. Pihak Jepang yang hadir, antara lain Jenderal Nakamura. Kemudian, dilanjutkan perundingan untuk mengatur gencatan senjata. Nakamura mengancam akan mengebom kota Semarang, apabila

para pemuda tidak mau menyerahkan senjata paling lambat tanggal 19 Oktober 1945 pukul 10.00. Wongsonegoro terpaksa menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada perjanjian itu.

Pada tanggal 19 Oktober 1945 pagi hari, belum ada tanda-tanda semua senjata akan diserahkan kembali kepada Jepang. Sementara Jepang telah bersiap-siap untuk membumihanguskan kota Semarang. Tiba-tiba pukul 07.45 terpetik berita bahwa tentara Sekutu mendarat di Pelabuhan Semarang dengan menumpang kapal HMS Glenry. Mereka terdiri atas pasukan Inggris, termasuk tentara *Gurkha.* Mereka bertugas untuk melucuti tentara Jepang.

Dengan kedatangan tentara Sekutu, berarti telah mempercepat berakhirnya pertempuran antara pejuang Semarang dengan tentara Jepang. Untuk mengenang pertempuran Lima Hari di Semarang ini, maka dibangun sebuah monumen yang terkenal dengan sebutan Tugu Muda.

b. Pengambilalihan Kekuasaan Jepang di Yogyakarta

Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan Pemerintahan RI.

Kepala Daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang (*Cokan*) harus meninggalkan kantornya di jalan Malioboro. Tanggal 5 Oktober 1945, gedung *Cokan Kantai* berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Gedung *Cokan Kantai* kemudian dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung.

Satu hari setelah perebutan gedung *Cokan Kantai,* para pejuang Yogyakarta ingin melakukan perebutan senjata dan markas *Osha Butai* di Kotabaru. Rakyat dan para pemuda terus mengepung markas *Osha Butai* di Kotabaru. Rakyat dan para pemuda terdiri dari berbagai kesatuan, antara lain TKR, Polisi Istimewa, dan BPU (Barisan Penjagaan Umum) sudah bertekad untuk menyerbu markas Jepang di Kotabaru.

Sekitar pukul 03.00 WIB tanggal 7 Oktober 1945, terjadilah pertempuran antara rakyat, pemuda, dan kesatuan dengan tentara Jepang di Yogyakarta. *Butaico* Pingit segera menghubungi TKR dan menyatakan menyerah, dengan jaminan anak buahnya tidak disiksa. Hal ini diterima baik oleh TKR. Kemudian, TKR meminta agar *Butaico* Pingit dapat mempengaruhi *Butaico* Kotabaru untuk menyerah. Ternyata *Butaico* menolak untuk menyerah. Akibatnya serangan para pejuang Indonesia semakin ditingkatkan.

Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1945 sekitar pukul 10.00, markas Jepang di Kotabaru secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pihak Indonesia yang gugur 21 orang dan 32 orang luka-luka. Sedangkan dari pihak Jepang, 9 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Setelah markas Kotabaru jatuh, usaha perebutan kekuasaan meluas. R.P. Sudarsono kemudian memimpin perlucutan senjata *Kaigun* di Maguwo. Dengan berakhirnya pertempuran Kotabaru dan dikuasainya Maguwo, maka Yogyakarta berada di bawah kekuasaan RI.

c. Arek-arek Surabaya untuk Indonesia

Perhatikan gambar tokoh pahlawan berikut ini! Apakah kamu mengenal tokoh tersebut? Beliau bernama Bung Tomo, terkenal karena perjuangannya dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Pertempuran rakyat Surabaya dengan Sekutu terjadi pada tahun 1945 tersebut, menyebabkan ribuan rakyat yang gugur. Karena itulah bangsa Indonesia menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan.



Sumber: Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan, 1997.
Gambar 7.6 Bung Tomo sedang mengobarkan semangat juang.

Semangat tempur arek-arek Surabaya dalam melawan pasukan Sekutu, tidak dapat dilepaskan dari kemenangannya melawan kekuatan Jepang di Surabaya dan sekitarnya. Arek-arek Surabaya berhasil menyerbu dan menguasai markas Kempetai yang terletak di depan Kantor Gubernur Surabaya. Semua senjata Kempetai Jepang dilucuti. Pertempuran meluas ke Markas Angkatan Laut Jepang di Embong Wungu. Markas Jepang ini juga berhasil dikuasai para pejuang. Gudang peluru di Kedung Cowek juga berhasil direbut oleh arek-arek Surabaya. Pertempuran perebutan kekuasaan terhadap Jepang ini berakhir setelah komandan Angkatan Darat Jepang Jenderal Iwabe menyerah dan menyusul komandan Angkatan Laut Laksamana Shibata. Semua kapal perang dan senjata serta pangkalannya diserahkan kepada pejuang Indonesia.



Sumber: Gelora Api Revolusi, 1996.
Gambar 7.7 Brigadier Jenderal A.W.S. Mallaby.

Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah bagian dari Divisi India ke-23, di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorn. Mereka mendapat tugas dari panglima *Allied forces for Netherlands East Indies* (AFNEI) untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran Sekutu. Kedatangan mereka diterima oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur, Gubernur Suryo. Setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Mallaby, maka dihasilkan kesepakatan sebagai berikut.

1) Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat Angkatan Perang Belanda.
2) Disetujui kerja sama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
3) Akan segera dibentuk "Kontak Biro" agar kerja sama dapat terlaksana sebaik-baiknya.
4) Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja.

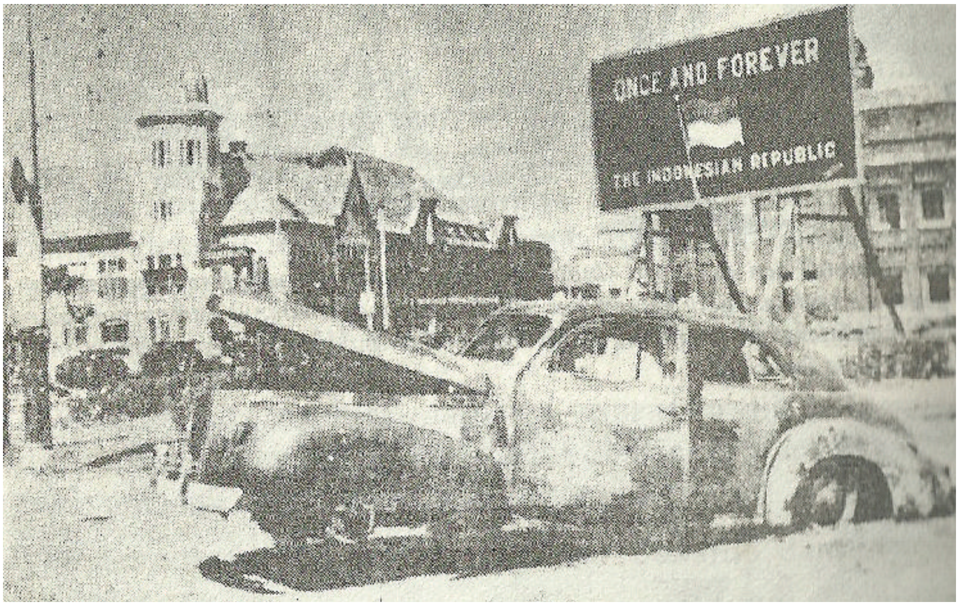
Namun, pada perkembangan selanjutnya, ternyata pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, peleton dari *Field Security Section* di bawah pimpinan Kapten Shaw, melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok. Mereka akan membebaskan Kolonel Huiyer—seorang Kolonel Angkatan Laut Belanda—beserta kawan-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan pada keesokan harinya dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya.

Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata yang pertama antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kontak senjata itu meluas sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu, pasukan Sekutu dapat dipukul mundur, bahkan hampir dapat dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Beberapa objek vital yang telah dikuasai oleh pihak Inggris berhasil direbut kembali oleh rakyat.

Melihat kenyataan seperti itu, komandan pasukan Sekutu menghubungi Presiden Sukarno untuk mendamaikan perselisihan antara para pejuang Indonesia dengan pasukan Sekutu (Inggris) di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Salah satu kesepakatannya adalah untuk menjaga keamanan di Surabaya dan sekitarnya. Karena dirasa perlu terus dilakukan komunikasi antara kedua pihak, maka dibentuklah Kontak Biro yang anggotanya tokoh-tokoh dari Indonesia seperti Residen Sudirman, Dul Arnawa dan Sungkana, sedangkan dari pihak Inggris antara lain Mallaby dan Shaw. Namun, setelah Sukarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin beserta Hawthorn kembali ke Jakarta, ternyata masih terjadi pertempuran di beberapa tempat.

Pada tanggal 30 Oktober 1945, dengan berkendaraan beberapa mobil, para anggota Kontak Biro berusaha menuju gedung Internatio yang masih terjadi kontak senjata. Pada saat itu, gedung ini diduduki oleh tentara Inggris. Arek-arek Surabaya mengepung gedung itu dan menuntut agar gedung itu dikosongkan. Kedatangan Kontak Biro yang di dalamnya ada Mallaby itu, membuat arek-arek Surabaya menuntut agar Mallaby dan tentara Inggris menyerah. Kebetulan hari itu sudah mulai gelap. Ketika itu rombongan Mallaby sedang berada di tempat perhentian trem listrik yang terletak beberapa belas meter sebelah utara Jembatan meledak, waktu itu

kira-kira pukul 20.30. Ternyata mobil yang ditumpangi Mallaby meledak dan ditemukan Mallaby tewas. Tewasnya Brigjen Mallaby ini memancing kemarahan pasukan Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, Mayjen E.C. Mansergh, sebagai pengganti Mallaby mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata selambat-lambatnya jam 06.00 tanggal 10 November 1945. %Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi



Sumber: Pengabdian Selama Perang Kemerdekaan Bersama Brigade Ronggolawe, 1985.
Gambar 7.8 Mobil tempat Mallaby tewas.

ancaman bahwa pihak Inggris akan menggempur kota Surabaya dari Darat, Laut, dan Udara, apabila orang-orang Indonesia tidak mau menaati ultimatum itu. Inggris juga mengeluarkan instruksi yang isinya *"………semua pemimpin bangsa Indonesia dari semua pihak di kota Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 06.00 pada tempat yang telah ditentukan dan membawa bendera merah putih dengan diletakkan di atas tanah pada jarak 100 m dari tempat berdiri, lalu mengangkat tangan tanda menyerah."*

Akhirnya pertempuran berkobar di Surabaya. Inggris mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran sengit di Surabaya. Salah satu tokoh pemuda, yaitu Sutomo

(Bung Tomo) telah mendirikan Radio Pemberontakan untuk mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Pada saat terjadi pertempuran di Surabaya, Bung Tomo berhasil memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat melalui pidato-pidatonya. Di dalam pidatonya melalui radio yang begitu berapi-api dan selalu dimulai dan diakhiri dengan teriakan takbir, "*Allahu Akbar*". Tokoh lain, misalnya Ktut Tantri, yakni wanita Amerika yang juga aktif dalam mengumandangkan pidato-pidato revolusinya dalam bahasa Inggris melalui Radio Pemberontakan Bung Tomo.

Sungkono sebagai Komandan Pertahanan Kota, pada tanggal 9 November 1945 pukul 17.00 mengundang semua unsur kekuatan rakyat, yang terdiri dari Komandan TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, dan TKR Laut untuk berkumpul di Markas Pregolan 4.

Kota Surabaya dibagi dalam 3 sektor pertahanan, yaitu Sektor Barat, Tengah dan Timur. Sektor Barat dipimpin oleh Kunkiyat, Sektor Tengah antara lain dipimpin oleh Marhadi, sedangkan Sektor Timur dipimpin oleh Kadim Prawirodiarjo. Sementara itu Sukarno membakar semangat juang rakyat lewat radio. Sesudah batas waktu ultimatum habis, keadaan semakin ekplosif. Kontak senjata pertama terjadi di Perak, yang berlangsung sampai jam 18.00. Inggris berhasil menguasai garis pertahanan pertama. Gerakan pasukan Inggris disertai dengan pengeboman yang ditujukan pada sasaran yang diperkirakan menjadi tempat pemusatan pemuda. Surabaya yang telah digempur oleh Inggris berhasil dipertahankan oleh para pemuda hampir 3 minggu lamanya. Sektor demi sektor dipertahankan secara gigih, walaupun pihak Inggris menggunakan senjata-senjata modern dan berat. Pertempuran yang terakhir terjadi di Gunungsari pada 28 November 1945, namun perlawanan secara sporadis masih dilakukan. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa yang terkenal dengan sebutan Markas Kali. Kejadian ini merupakan sebuah lambang keberanian dan kebulatan tekad dalam mempertahankan kemerdekaan dan membela Tanah Air Indonesia dari segala bentuk penjajahan.

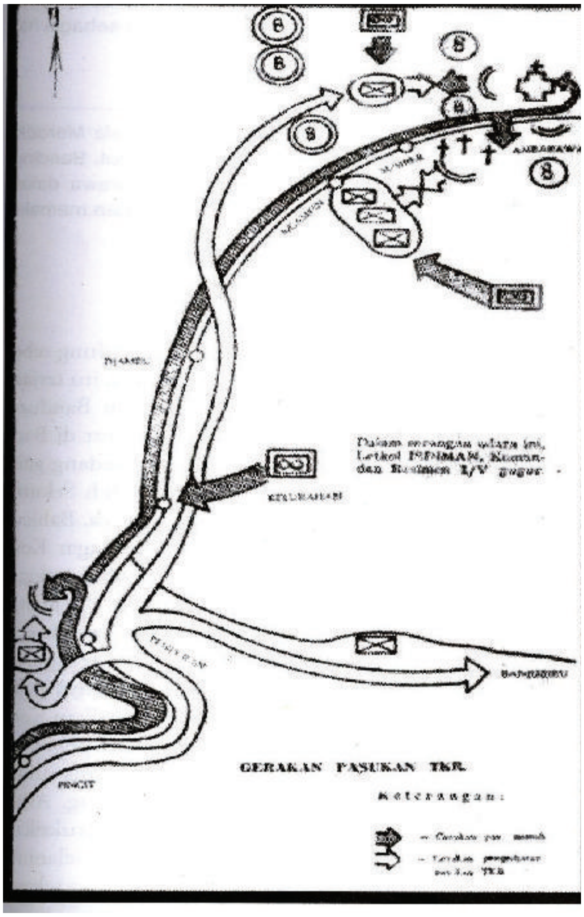
Pertempuran di Surabaya telah menunjukkan begitu heroiknya para pejuang kita untuk melawan kekuatan asing. Untuk mengenang, peristiwa itu, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.

d. Pertempuran Palagan Ambarawa

Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Oleh pihak RI mereka diperkenankan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata mereka diboncengi oleh tentara *Nederland Indische Civil Administration* (NICA) yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 26 Oktober 1945 pecah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKR dan tentara Sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Sukarno dan Brigadir Jenderal Bethell di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal, diantaranya sebagai berikut.

1) Pihak Sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi *Allied Prisoners War and Interneers* (APWI-tawanan perang dan interniran Sekutu);
2) Jalan raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia-Sekutu; dan
3) Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya.

Ternyata pihak Sekutu ingkar janji. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu. Pada tanggal 21 November 1945 pasukan Sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Namun, tanggal 22 November 1945 pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan Sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pemuda dari Boyolali, Salatiga, Kartosuro bertahan di kuburan Belanda, sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Sementara itu, dari arah Magelang pasukan TKR dan Divisi V/Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945 dengan tujuan memukul mundur pasukan Sekutu yang berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam Adrongi berhasil menduduki Desa Pingit dan merebut desa-desa sekitarnya.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.9 Peta Rute Gerilya Sudirman

Sementara itu, Batalion Imam Adrongi meneruskan gerakan pengejarannya. Kemudian disusul 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta, yaitu batalion 10 Divisi III di bawah pimpinan Mayor Suharto, batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Musuh akhirnya terkepung. Walaupun demikian, pasukan musuh mencoba mematahkan pengepungan dengan mengadakan gerakan melambung dan mengancam kedudukan pasukan Indonesia dari belakang dengan tank-tanknya. Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan mundur ke Bedono. Dengan bantuan resimen kedua yang dipimpin M. Sarbini, batalion Polisi Istimewa yang dipimpin Onie Sastroatmojo dan batalion dari Yogyakarta, gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu.

Di Desa Jambu para komandan mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat itu menghadirkan pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran dan bertempat di Magelang. Sejak saat Ambarawa dibagi atas 4 sektor, yaitu sektor Utara, sektor Selatan, sektor Barat dan sektor Timur. Kekuatan pasukan bertempur secara bergantian. Pada tanggal 26 November 1945 pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letkol Isdiman gugur. Setelah mengetahui Isdiman gugur maka pimpinan pasukan TKR Purwokerto Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan. Kehadiran Sudirman ini semakin menambah semangat tempur TKR dan para pejuang yang sedang bertempur di Ambarawa. Kolonel

Sudirman menyodorkan taktik perang *Supit Urang.* Taktik ini segera diterapkan. Musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan pasukan TKR. Sejak saat itu, pimpinan pasukan TKR Purwokerto dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR. Pada tanggal 5 Desember 1945, musuh terusir dari Desa Banyubiru, yang merupakan garis pertahanan yang terdepan.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.10 Kolonel Sudirman.

Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama empat hari empat malam. Musuh yang merasa kedudukannya terjepit berusaha keras untuk melakukan pertempuran. Pada tanggal 15 Desember 1945 musuh meninggalkan Kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang dan Yogyakarta.

Dalam pertempuran itu, pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang. Menyambut kemenangan itu Sudirman yang masih berpakaian perang langsung mengambil air wudu dan segera melakukan sujud syukur seraya berdoa:

Ya Allah ya Tuhan, Maha Besar dan Maha Kuasa Engkau. Engkaulah sumber kekuatan dan kemenangan. Ampunilah hamba-Mu yang lemah dan dhaif ini dan berikan kami kekuatan".

Kemenangan pertempuran Ambarawa ini cepat menyebar ke pos-pos pertahanan TKR, bahkan sampai ke dapur-dapur umum. Hal ini semakin menambah semangat juang pada pejuang di medan tempur.

Dengan kemenangan ini nama Sudirman semakin populer sebagai komandan dan pimpinan TKR. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih memiliki pasukan yang kuat yaitu pasukan TKR dan rakyat yang menolak kembalinya penjajah di bumi pertiwi Indonesia. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 15 Desember dijadikan Hari Infanteri. Di Ambarawa juga dibangun Monumen Palagan, Ambarawa.

» *Coba lakukan telaah kritis apa makna kemenangan dalam pertempuran Ambarawa bagi TNI dan perjuangan bangsa Indonesia. Untuk mendalami bagaimana Pertempuran Palagan Ambarawa dan tokoh Sudirman, Kamu dapat membaca buku karya Sardiman, Guru Bangsa: Sebuah Biografi Jenderal Sudirman.*

e. Pertempuran Medan Area

Pada tanggal 9 November 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatra Utara. Pendaratan pasukan Sekutu itu diboncengi oleh pasukan NICA yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pemerintahan RI Sumatra Utara memperkenankan mereka menempati beberapa hotel di Medan, seperti Hotel de Boer, Grand Hotel, Hotel Astoria dan lainnya, karena menghormati tugas mereka. Sebagian dari mereka ditempatkan di Binjai, Tanjung Morawa dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tenda-tenda lapangan.

Sehari setelah mendarat, tim dari RAPWI telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulu Berayan, Saentis, Rantau Prapat, Pematang Siantar dan Berastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan. Ternyata kelompok itu langsung dibentuk menjadi Medan Batalion KNIL. Dengan kekuatan itu, maka tampaklah perubahan sikap dari bekas tawanan tersebut. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai pemenang atas perang. Sikap ini memancing timbulnya pelbagai insiden yang dilakukan secara spontan oleh para pemuda. Insiden pertama terjadi di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai oleh salah seorang yang ditemuinya. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda.

Insiden ini menjalar ke berbagai kota seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Sementara itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuk TKR Sumatra Timur dengan pimpinannya Ahmad Tahir. Selanjutnya diadakan pemanggilan terhadap bekas *Giyugun* dan *Heiho* ke Sumatra Timur. Panggilan ini mendapat sambutan luar biasa dari mereka. Di samping TKR, di Sumatra Timur terbentuk juga badan-badan perjuangan yang sejak 15 Oktober 1945 menjadi Pemuda Republik Indonesia Sumatra Timur dan kemudian berganti nama menjadi Pesindo.



Sumber: Pengabdian Selama Perang Kemerdekaan Bersama Brigade Ronggolawe, 1985.
Gambar 7.11 Letkol Gatot Subroto.

Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, Inggris memulai aksinya untuk memperlemah kekuatan Republik dengan cara memberikan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjatanya kepada Sekutu. Hal ini dilakukan pula oleh Kelly terhadap pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober1945. Sejak saat itu tentara NICA merasa memperoleh dukungan dari pihak Inggris. Demikian pula pasukan Sekutu mulai melakukan aksi-aksi terornya, sehingga timbul rasa permusuhan di kalangan pemuda. Patroli-patroli Inggris tidak pernah merasa aman, karena pemerintah Republik Indonesia tidak memberikan jaminan keamanan. Meningkatnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan menentukan sendiri secara sepihak batas kekuasaannya.

Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan *Fixed Boundaries* Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Tindakan pihak Inggris itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Pihak Inggris bersama NICA melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang berada di kota Medan. Para pemuda membalas aksi-aksi tersebut, setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan, bahkan seringkali terjadi tembak menembak. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NICA berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Selanjutnya TKR menculik seorang perwira Inggris dan menghancurkan beberapa truk. Dengan peristiwa ini Jenderal Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Barang siapa yang nyata-nyata melanggar akan ditembak mati. Daerah yang ditentukan adalah kota Medan dan Belawan. Perlawanan terus memuncak, pada bulan April 1946 tentara Inggis mulai berusaha mendesak pemeintah RI ke luar

kota Medan. Gubernur, Markas Divisi TKR, Walikota RI pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian Inggris berhasil menguasai kota Medan.

Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama "Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area" yang dibagi atas 4 sektor dan bermarkas di Sudi Mengerti (Trepes). Di bawah komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area.

f. Bandung Lautan Api

Di Bandung pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas *Artillerie Constructie Winkel* (ACW-sekarang Pindad) dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan Sekutu di Bandung pada 17 Oktober 1945. Seperti halnya di kota-kota lain, di Bandung pun pasukan Sekutu dan NICA melakukan teror terhadap rakyat, sehingga terjadi pertempuran-pertempuran. Menjelang bulan November 1945, pasukan NICA semakin merajalela di Bandung. NICA memanfaatkan kedatangan pasukan Sekutu untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Namun, semangat juang rakyat dan para pemuda yang tergabung dalam TKR, laskar-laskar dan badan-badan perjuangan semakin berkobar. Pertempuran demi pertempuran terjadi.

Pada bulan Oktober di Bandung telah terbentuk Majelis Dewan Perjuangan yang dipimpin panglima TKR, Aruji Kartawinata. Dewan perjuangan ini terdiri atas wakil-wakil TKR dan berbagai kelaskaran. Pada tanggal 21 November 1945 Sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Utara. Ternyata ultimatum itu tidak diindahkan oleh pihak pejuang. Insiden terjadi, para pemuda melakukan penyerobotan terhadap kendaraan-kendaraan Belanda yang berlindung di bawah Sekutu. Penculikan juga sering terjadi.

Peristiwa yang memperburuk keadaan terjadi pada tanggal 25 November 1945. Selain menghadapi serangan musuh, rakyat menghadapi banjir besar meluapnya Sungai Cikapundung. Ratusan korban terbawa hanyut dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Keadaan ini dimanfaatkan musuh untuk menyerang rakyat yang tengah menghadapi musibah.

Dalam suasana yang demikian itu, Majelis Dewan Perjuangan tidak sabar menunggu reaksi dari pemerintah. Majelis yang terdiri dari berbagai kesatuan ini memutuskan untuk melancarkan perlawanan. Pada malam hari tanggal 24 - 25 November 1945 rakyat Bandung melancarkan serangan terhadap posisi-posisi Sekutu dan NICA.

Tanggal 23 Maret 1946, pihak Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum itu adalah agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur ke luar kota dengan jarak 11 km. Untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung, maka Pemerintah RI menyetujui untuk melaksanakan pengosongan kota Bandung.

Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi III Siliwangi menginstruksikan rakyat untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret 1946. Malam harinya bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan mengungsi ke Bandung Selatan oleh sekitar 200.000 warganya. Kota Bandung yang terbakar ini juga disaksikan oleh istri Otto Iskandardinata yang masih menunggu kabar kepastian hilangnya sang suami. Warga mengungsi dengan membawa barang seadanya, sebagian mengatur perjalanan ke pengungsian, sebagian menyelamatkan dokumen-dokumen kota, sebagian membakar gedung-gedung penting, bahkan meledakkan bangunan-bangunan besar, hingga instalasi militer pun dihancurkan, salah satunya gudang mesiu yang diledakkan oleh Mohammad Toha yang gugur bersama ledakan. Tengah malam kota Bandung yang terbakar telah ditinggalkan. Menyisakan kenangan perjuangan Bandung Lautan Api.

Peristiwa tersebut dikenang hingga kini. Mars Halo Halo Bandung diciptakan. Kemudian monumen pun didirikan di lapangan Tegalega. Sineas pun tak luput menjadikan peristiwa tersebut dalam film "Toha Pahlawan Bandung Selatan", sebuah film karya Usmar Ismail, juga film "Bandung Lautan Api" karya Alam Rengga Surawijaya. Tak ketinggalan penulis puisi W.S. Rendra juga mengabadikan dalam Sajak Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api.

g. Berita Proklamasi di Sulawesi

Berita proklamasi yang dikumandangkan oleh Sukarno dan Moh. Hatta, sampai pula di Sulawesi. Sam Ratulangi, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi, yang berkedudukan di Makasar mendapat tugas dari

PPKI untuk menyusun Komite Nasional Indonesia. Sementara itu, para pemuda Sulawesi memperbanyak teks proklamsi untuk disebarluaskan keseluruh pelosok penjuru. Atas inisiatif Manai Shopian dan kawan-kawan, dibuat plakat proklamasi di rumah A. Burhanuddin dan di kantor pewarta *Celebes*, yang kemudian diganti nama dengan *Soeara Indonesia*.

Saat itu tentara Sekutu dengan cepat dapat menguasai Indonesia bagian Timur, termasuk Sulawesi. Upaya Sam Ratulangi untuk menyampaikan berita proklamasi ke penjuru Sulawesi mendapat halangan dari tentara Sekutu. Para pemuda mulai mengorganisasi diri dan merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital. Pada tanggal 28 Oktober 1945, kelompok pemuda yang terdiri dari bekas *Kaigun, Heiho* dan pelajar SMP, bergerak menuju sasarannya dan mendudukinya. Akibat peristiwa itu pasukan Australia yang telah ada, bergerak dan melucuti para pemuda. Sejak itu pusat gerakan pemuda dipindahkan dari Ujungpandang ke Polombangkeng. Bahkan Sam Ratulangi kemudian ditangkap oleh NICA dan diasingkan ke Serui, Papua.

Berita proklamasi di Sulawesi Tenggara diterima di Kolaka, Kendari. Mula-mula berita diterima oleh kalangan *Kaigun* dan *Heiho* yang dibawa oleh tentara Jepang. Saat itu yang bertugas memimpin Heiho adalah Idie Heiso dan Sudamitsu Heiso. Sementara berita proklamasi baru diketahui oleh rakyat Muna, saat Jepang menyerahkan pemerintahan Muna kepada Ode Ipa yang kemudian meninggalkan Muna menuju Kendari. Di Buton berita proklamasi diterima rakyat dari para pelayar yang tiba dari Jakarta dan Bangka serta dari orang-orang Jepang yang datang ke Makassar. Mula-mula berita itu diterima di Kepulauan Tukang Besi (Wakatobi). Di Sulawesi Tengah, berita proklamasi diterima pada tanggal 17 Agustus pada pukul 15.00 waktu setempat. Berita itu diterima Abdul Latief dari tentara Jepang yang dikawal dari dua tentara *Heiho* dari Sulawesi Selatan, yaitu Saleh Topetu dan Djafar. Perwira itu mengatakan “Bangsa Indonesia sudah merdeka”.

Di Manado, berita proklamasi pertama kali diterima di markas besar tentara Jepang yang berkedudukan di Minahasa. Di Markas itu terdapat alat-alat sarana komunikasi yang mempekerjakan tenaga Indonesia diantaranya adalah A.S. Rombot. Saat itu, Rombot sedang mendapat tugas untuk menerima berita *Domei* dari Tokyo. Pada saat itulah berita tentang proklamasi yang disebarkan di seluruh penjuru dunia itu diketahuinya, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Berita itu diterimanya bersamaan dengan berita kapitulasi Jepang dan perintah genjatan senjata. Segera setelah bertugas Rombot mengontak W.F. Sumati yang saat itu sebagai *daidancho boo ei Teisintai* di

Tondano. Kedua tokoh itu kemudian menyampaikan berita proklamasi itu ke tokoh-tokoh nasionalis. Berita itu kemudian disebarkan ke Sangir Talaud, Bolaang Mongondow, dan Gorontalo.

Setelah berita proklamasi kemerdekaan tersebar keseluruh penjuru Sulawesi, sejak itu pula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia merdeka. Cita-cita yang sudah lama diinginkan oleh rakyat pun terwujud. Di Sulawesi Tenggara misalnya, bendera merah putih dikibarkan pada 17 September 1945 dengan dipimpin oleh D. Andi Kasim. Di Lasusua bendera merah putih dikibarkan pada 5 Oktober 1945 yang dihadiri oleh kepala distrik Patampanua dan beberapa pimpinan pemuda RI dari Luwu.

Sementara itu, pada 14 Februari 1946, B.W. Lapian sebagai pemimpin sipil pada saat itu memimpin pasukan pemuda bersama Letkol. Ch. Taulu dan Serda S.D. Wuisan merobek bagian biru pada bendera Belanda di tangsi militer Belanda, di Teling, Menado. Peristiwa heroik itu menandai berkibarnya bendera merah putih.

h. Operasi Lintas Laut Banyuwangi – Bali

Operasi lintas Laut Banyuwangi-Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. peristiwa itu dimulai dengan kedatangan Belanda dengan membonceng Sekutu, mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar, tanggal 3 Maret 1946. Hal ini dimaksudkan Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur yang dinilai sebagai lumbung pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan RI. Bali juga dapat dijadikan penghubung ke arah Australia.

Dengan perkembangan di atas, maka telah mengalihkan konfrontasi dari Indonesia melawan Jepang berganti menjadi Indonesia melawan Belanda. Berkaitan dengan hal tersebut, maka para pemimpin perjuangan yang sudah sampai di Jawa berusaha mencari bantuan dan membentuk kesatuan-kesatuan tempur. Mereka antara lain telah membentuk Pasukan Markadi atau Pasukan Merdeka sebagai pasukan induk. Pasukan itu kemudian lebih dikenal dengan nama Pasukan M. Kapten Markadi sebelumnya bertugas mendampingi Kolonel Prabowo, Kolonel Munadi dan Letkol I Gusti Ngurah Rai ke markas besar TRI di Yogyakarta untuk meminta bantuan, karena makin lemahnya kekuatan TRI Sunda Kecil di Bali.

Kondisi itu mendorong Letjen. Urip Sumoharjo di Markas Besar TRI Yogyakarta untuk memutuskan memperkuat TRI Sunda Kecil dengan bantuan senjata dan amunisi kepada I Gusti Ngurah Rai. Untuk itulah Pasukan M berperan penopang Pasukan Sunda Kecil di bawah Pimpinan Ngurah Rai. Pasukan ini juga dilengkapi pasukan sandi yang disebut CIS (*Combat Intelligent Section)* yang terdiri dari para pelajar. Disiapkanlah tiga pasukan untuk memblokade pasukan Belanda. Pasukan angkatan laut dipimpin oleh Kapten Makardi dan Waroka. Angkatan Darat di bawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai. Operasi itu direncanakan melalui tiga titik pendaratan. Pasukan Waroka mendarat di Pantai Gerokgak dan Celuk Bawang. Pasukan Markadi mendarat di antara Cupel dan Candi Kusuma, Jembrana dan Pasukan I Gusti Gurah Rai mendarat di Pantai Yeh Kuning. Operasi rahasia itu ditujukan untuk mendapatkan informasi intelijen yang akurat.

Pasukan diberangkatkan dari Muncar Banyuwangi dengan sasaran daerah Kuning dan terus ke Munduk Malang. Penyeberangan dilaksanakan malam hari. Rombongan ini dalam penyeberangannya di tengah laut dipergoki oleh patroli Belanda dan langsung menembaki ke arah rombongan pasukan Ngurah Rai. Akibatnya Cokorde Rai Gambir dan Cokorde Dharma Putra gugur. Sebagian berhasil mendarat di Yeh Kuning dan sebagian lagi di bawah Ngurah Rai kembali ke Muncar. Keesokan harinya tanggal 4 April 1946, rombongan Ngurah Rai berhasil mendarat di Pulukan untuk seterusnya menuju Munduk Malang.

Gelombang ketiga, Pasukan M sebagai induk pasukan berangkat pada tanggal 4 April 1946 malam hari. Mereka berangkat dari pelabuhan Banyuwangi dengan berkekuatan empat peleton. Sasarannya akan mendarat di daerah Candikusuma. Saat fajar menyingsing, rombongan Pasukan M dipergoki oleh dua *motorboat* Belanda yang sedang berpatroli. Terjadilah pertempuran antara Pasukan M melawan patroli Belanda. Dengan taktik menempel pada motorboat Belanda, Pasukan M sulit untuk ditembaki Belanda. Sebaliknya, Pasukan M dapat melemparkan granat-granat tangan ke dek motorboat. Akhirnya, satu *motorboat* Belanda terbakar dan tenggelam serta yang satunya melarikan diri. Setelah berhasil menghancurkan patroli Belanda, Pasukan memerintahkan untuk putar haluan kembali ke Banyuwangi, sebab arus laut yang kuat dan kapal Markadi sendiri berlobang-lobang. Dalam perang ini, pihak Pasukan M gugur dua orang, yakni Sumeh Darsono dan Sidik.

Keesokan harinya, Pasukan M kembali berlayar menuju Bali dan mereka berhasil melakukan pendaratan di Klatakan, Melaya, dan Candikusuma. Sesampainya di Bali dilakukan koordinasi dan dibentuk MGGSK (Markas Gabungan Gerakan Sunda Kecil). Kemudian pada bulan Juli 1946, juga terjadi pendaratan pasukan tempur yang dipimpin oleh Kapten Saestuhadi. Setelah itu terjadilah pertempuran di berbagai daerah.

Mula pertama pasukan MGGSK dihadang oleh pasukan Belanda di Klatakan. Terjadilah pertempuran sengit. Pasukan MGGSK terdesak dan pemimpin yang gugur, antara lain Kapten Saestuhadi, Kapten Suryadi, dan Letnan Nurhadi.

Selanjutnya, Pasukan M melakukan penyerangan ke berbagai daerah, antara lain, di Gilimanuk Cekik, Penginuman, Candikusuma, Cupek, Negara, Sarikuning, Pulukan, Gunungsari, Klatakan, Munduk Malang, Tabanan, dan Celukan Bawang.

Untuk mengenang perjuangan pasukan kita yang gugur dalam operasi lintas laut, maka di daerah Cekik, Gilimanuk didirikan monumen yang dinamakan Monumen Operasi Lintas Laut Banyuwangi-Bali.

KESIMPULAN

1. *Usaha mempertahankan kemerdekaan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Umumnya mereka berhadapan dengan kolonialisme baru yang dipastikan dapat menyengsarakan rakyat Indonesia.*

2. *Rakyat di berbagai daerah tidak memiliki ketakutan sedikitpun untuk melawan kezaliman kolonialisme. Mereka berani bertempur dengan korban yang sangat besar.*

LATIH UJI KOMPETENSI

1. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, Sekutu datang ke Indonesia. Mengapa Sekutu datang ke Indonesia? Jelaskan alasanmu!

2. Berbagai pertempuran terjadi di berbagai daerah dalam menentang Sekutu yang datang ke Indonesia. Mengapa rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Sekutu?

3. Di antara berbagai perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam rangka melawan Sekutu dan Belanda pada bacaan di atas, pertempuran mana yang menurutmu paling menarik? Jelaskan latar belakang dan proses terjadinya pertempuran tersebut!

Tugas

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari tiga orang. Kemudian buatlah tema "berita sekitar proklamasi di daerah tempat tinggalku". Setelah kamu mendapatkan teman dalam satu kelompok ikutilah langkah-langkah pembuatan tugas sebagai berikut:

   a. Kumpulkan buku, majalah, dan koran yang ada kaitan dengan berita tentang Proklamasi 17 Agustus 1945.

   b. Setelah data-data kepustakaan terkumpul, diskusikan dengan guru kamu, kira-kira siapa nara sumber yang pantas untuk mendapatkan keterangan tentang berita sekitar proklamasi yang ada di tempat tinggal kamu.

   c. Kemudian buatlah daftar pertanyaan yang terkait dengan kisah sekitar proklamasi di daerah tempat tinggal kamu, misalnya kapan berita proklamasi itu diterima oleh penduduk di kotamu. Bagaimana berita itu dapat sampai di kota tempat tinggalmu.

d. Nah, setelah tersusun daftar pertanyaannya. Cobalah membuat janji dengan nara sumber yang direkomendasikan oleh guru, atau tokoh masyarakat setempat. Jangan lupa membawa alat yang dapat untuk mencatat atau merekam semua kegiatan wawancara kamu.

e. Setelah selesai melakukan wawancara kamu dapat menyalin hasil wawancara itu ke dalam tulisan.

2. Setelah tahapan no. 1 kamu buatlah sebuah laporan deskriptif naratif dari hasil kerja kamu itu. Jangan lupa untuk memberi “judul” pada laporan itu. Judul tidak harus sama dengan tema.

B. Antara Perang dan Diplomasi

Mengamati Lingkungan



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.12 Tempat perundingan Linggarjati.

» *Coba amati gambar tempat perundingan Linggarjati di atas!*
1. *Di manakah lokasi perundingan tersebut?*
2. *Bagaimana peranan Linggarjati dalam sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia?*

Linggarjati adalah satu simbol perjuangan diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan masalah kedaulatan dengan Belanda. Seperti telah kamu kaji pada bagian sebelumnya, bahwa Belanda benar-benar belum mau meninggalkan Indonesia. Konflik Indonesia-Belanda tidak dapat dihindari. Kontak senjata dan perundingan dilakukan oleh kedua negara. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam konflik perang dan damai untuk mencapai kedaulatan?

Bangsa Indonesia juga sadar bahwa kekuatan senjata bukan satu-satunya jalan untuk mencapai kemerdekaan. Jalur diplomasi atau perundingan adalah jalan lain yang perlu ditempuh bangsa Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Mengapa demikian? Sebab langkah diplomasi kadang tidak selamanya menguntungkan bangsa Indonesia, demikian sebaliknya. Maka dalam kajian di bawah ini kamu akan menelaah bagaimana bangsa kita berusaha menjalankan politik damai untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga tidak mengesampingkan dengan kekuatan senjata. Jalan damai apa saja yang ditempuh bangsa Indonesia? Bagaimana dampak jalan yang ditempuh tersebut? Mari kita telaah bersama.

1. Rangkaian Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia dan Belanda, serta Inggris sebagai penengah. Tokoh-tokoh dalam perundingan itu adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christison dari Inggris, seorang diplomat senior serta mantan duta besar Inggris di Uni Soviet, yang kemudian diangkat sebagai duta istimewa Inggris untuk Indonesia. Wakil dari Belanda adalah Dr. H.J. Van Mook. Indonesia diwakili Perdana Menteri Republik Indonesia Sutan Sjahrir.

Sebelum perundingan Linggarjati, sudah dilakukan beberapa kali perundingan baik di Jakarta maupun di Belanda. Namun, usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan belum memenuhi harapan baik bagi pihak Indonesia maupun bagi pihak Belanda. Usaha itu mengalami kegagalan karena masing-masing pihak mempunyai pendapat yang berbeda.

Van Mook adalah orang Belanda yang lahir di Indonesia, yaitu di Semarang. Ia juga seorang penganjur persekutuan sejak tahun 1930-an. Ia termasuk kelompok pendorong gerakan orang Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda. Mereka bertujuan untuk menjadikan Hindia Belanda sebagai tanah air mereka dalam bentuk persemakmuran. Atas pandangan itu suatu saat nanti Indonesia menjadi bagiannya sesuai dengan makna politik dan sosialnya sendiri. Atas dasar pemikirannya itu Van Mook berkeinginan keras untuk

kembali ke Indonesia. Sebagai seorang Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Van Mook lebih siap menghadapi perubahan situasi daripada pemerintahan yang ada di Negeri Belanda. Namun, ia mendapatkan situasi yang jauh dari perkiraannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan segala konsekuensinya itu tidak mungkin untuk ditarik kembali. Belanda hanya dapat menolak dan tidak mengakui negeri jajahannya sebagai negara yang berdaulat.

Pada awal kehadirannya di Jakarta, Van Mook mendapat tekanan baik dari Sekutu maupun ancaman perlawanan dari pihak revolusioner Indonesia. Oleh karena itu, pada awal kehadirannya Van Mook bersedia untuk melakukan perundingan, meskipun pemerintah Belanda melarangnya untuk bertemu dengan Sukarno. Pada 14 Oktober 1945, Van Mook bersedia bertemu dengan Sukarno dan "kelompok-kelompok Indonesia". Ia tidak mau menyebut sebagai Republik Indonesia, karena pemerintah Belanda belum mengakui pemerintahan Republik Indonesia. Dalam pokok pikiran Van Mook menyatakan, bahwa NICA bersedia membangun hubungan ketatanegaraan yang baru dan status Indonesia menjadi "negara dominion" dalam persekutuan "persemakmuran Uni-Belanda".

Demikianlah karena tidak ada titik temu antara Indonesia dan Belanda, Cristison tetap berusaha mempertemukan mereka. Pemerintah Belanda diwakili oleh Van Mook dan wakilnya, Charles O. Van der Plas. Indonesia diwakili oleh Sukarno dan Moh. Hatta yang didampingi oleh H. Agus Salim dan Ahmad Subarjo. Dalam pertemuan itu tidak ada hasil yang memuaskan bagi pihak Indonesia. Pihak Belanda masih menginginkan kebijakan politiknya yang lama.

Pada minggu-minggu terakhir Oktober 1945, berbagai insiden dan konfrontasi dengan semakin banyaknya tentara NICA yang datang ke Indonesia. Konfrontasi itu menyebabkan pihak Sekutu ingin segera mengakhiri tugasnya di Indonesia, terlebih ketika aksi-aksi kekerasan terjadi di kota besar di Indonesia, terutama pertempuran sengit di Surabaya. Pihak Sekutu ingin segera meninggalkan Indonesia, tetapi tidak mungkin melepaskan tanggungjawab internasionalnya. Untuk itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan itu dengan melakukan perundingan.

a. Perundingan Awal di Jakarta

Pada tanggal I Oktober 1945, telah diadakan perundingan antara Christison (Inggris) dengan pihak Republik Indonesia. Dalam perundingan ini Christison mengakui secara *de facto* terhadap Republik Indonesia. Hal ini pula yang memperlancar gerak masuk Sekutu ke wilayah Indonesia. Kemudian, pihak pemerintah RI pada tanggal 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik. Isinya bahwa pemerintah RI menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah RI, baik oleh Inggris maupun Belanda sebagaimana yang dibuat sebelum PD II. Pemerintah RI juga berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik yang telah dikuasai oleh pemerintah RI.

Inggris yang ingin melepaskan diri dari kesulitan pelaksanaan tugas-tugasnya di Indonesia, mendorong agar segera diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr. Di bawah pengawasan dan perantaraan Clark Kerr, pada tanggal 10 Februari 1946 diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Dalam perundingan ini Van Mook selaku wakil dari Belanda mengajukan usul-usul antara lain sebagai berikut:

1) Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi, memiliki pemerintahan sendiri tetapi di dalarn lingkungan Kerajaan Nederland (Belanda);
2) masalah dalam negeri di urus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pernerintah Belanda;
3) sebelum dibentuk persemakmuran, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama sepuluh tahun; dan
4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Pihak Indonesia belum menanggapi dan mengajukan usul-usul balasannya. Kebetulan situasi Kabinet Syahrir mengalami krisis, Persatuan Perjuangan (PP) pimpinan Tan Malaka melakukan oposisi. PP mendesak pada pemerintahan bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan seratus persen terhadap RI.

Ternyata mayoritas suara anggota KNIP menentang kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Syahrir. Oleh karena itu, Kabinet Syahrir jatuh. Presiden Sukarno kemudian menunjuknya kembali sebagai Perdana Menteri. Kabinet Syahrir II terbentuk pada tanggal 13 Maret 1946. Kabinet Syahrir II mengajukan usul balasan dari usul-usul Van Mook. Usul-usul Kabinet Syahrir II antara lain sebagai berikut:

1) RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda.
2) Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu. Mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda.
3) Tentara Belanda segera ditarik kembali dari republik.
4) Pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota PBB.
5) Selama perundingan sedang terjadi, semua aksi militer harus dihentikan.

Usulan Syahrir tersebut ternyata ditolak oleh Van Mook. Sebagai jalan keluarnya Van Mook mengajukan usul tentang pengakuan Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerja sama dalam upaya pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Pada tanggal 27 Maret 1946, Sutan Syahrir memberikan jawaban disertai konsep persetujuan yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut:
1) supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan *de facto* RI atas Jawa dan Sumatra;
2) supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk RIS; dan
3) RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan Curacao, menjadi peserta dalam ikatan kenegaraan Belanda.

Usulan tersebut ternyata sudah saling mendekati kompromi. Oleh karena itu, usaha perundingan perlu ditingkatkan.

b. Perundingan Hooge Veluwe

Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hooge Veluwe bulan April 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memutus pembicaraan yang dilakukan di Jakarta oleh Van Mook dan Syahrir. Sebagai penengah dalam perundingan, Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr. Pada kesempatan itu Syahrir mengirim tiga orang delegasi dari Jakarta, yaitu Mr. W. Suwandi, dr. Sudarsono, dan A.K. Pringgodigdo. Mereka berangkat bersama Kerr pada 4 April 1946. Dari Belanda hadir lima orang yaitu Van Mook, J.H. van Royen. J.H. Logeman, Willem Drees, dan Dr. Schermerhorn. Perundingan tersebut untuk menyelesaikan perundingan yang tidak tuntas saat di Jakarta.

Perundingan mengalami *deadlock* sejak hari pertama, karena masing-masing pihak sudah mempunyai harapan yang berbeda. Delegasi Indonesia berharap ada langkah nyata dalam upaya pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Sementara pihak Belanda menganggap pertemuan di Hooge Veluwe itu hanya untuk sekedar pendahuluan saja.

Pada akhir pertemuan dihasilkan, draf Jakarta yang sudah disiapkan. Sebagian dapat diterima dan sebagian lagi tidak dapat diterima. Usulan yang diterima antara lain adalah pengakuan kekuasaan RI atas Jawa, sementara Sumatra tidak diakui. Dari draf Jakarta, tidak ada satu pun yang disetuju secara resmi, sehingga tidak dilakukan penandatanganan. Alasan utama Belanda adalah Belanda tidak siap melakukan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menolak bentuk perundingan di Hooge Veluwe sebagai perjanjian internasional dua negara. Bagi Indonesia, menerima delegasi Republik Indonesia sebagai mitra sejajar berarti menganggap negeri bekas jajahannya sebagai mitra sejajar yang mempunyai kedudukan yang sama di dunia internasional. Sementara itu, Belanda masih belum mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Di sisi lain, kondisi Belanda yang saat itu sedang mempersiapkan pemilihan umum pertama pascaperang tidak siap untuk mengambil keputusan yang mengikat masalah Indonesia, karena masalah Indonesia tergantung pada peta politik yang ada di Belanda. Satu di antara partai politik yang menentang keras kebijakan perundingan adalah Partai Katolik, seperti halnya dengan kelompok PP di Indonesia. Pada awal dimulainya perundingan Hooge Valuwe, Romme pimpinan fraksi Partai Katholik di parlemen Belanda menulis di tajuk Harian *Volkskrant* dengan nada keras antinegosiasi yang berjudul *De week der Schande* (Minggu Yang Penuh Aib).

Kegagalan perundingan Hooge Veluwe bagi kedua negara membawanya untuk kembali mengadakan perundingan. Bagi Indonesia perundingan Hooge Veluwe memperkuat posisi Indonesia di depan Belanda. Perundingan itu juga menjadikan masalah Indonesia menjadi perhatian dunia internasional. Perundingan itu pula yang mengantarkan pada diplomasi internasional dalam Perjanjian Linggarjati pada kemudian hari.

c. Pelaksanaan Perundingan Linggarjati

Kegagalan dalam perundingan Hooge Veluwe, pada April 1946, menjadikan pemerintah Indonesia untuk beralih pada tindakan militer. Pemerintah Indonesia berpendapat perlu melakukan serangan umum di kedudukan Inggris dan Belanda yang berada di Jawa dan Sumatra. Namun genjatan senjata yang dilakukan dengan cara-cara lama dan gerilya tidak membawa perubahan yang berarti. Resiko yang dihadapi pemerintah semakin tinggi dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Untuk mencegah bertambahnya korban pada bulan Agustus hingga September 1946 direncanakan untuk menyusun konsep perang secara defensif. Bagi Sukarno, Hatta, dan Syahrir perlawanan dengan strategi perang defensif itu lebih beresiko dibandingkan dengan cara-cara lama, karena akan memakan korban lebih banyak lagi. Menurut mereka pengakuan kedaulatan Republik Indonesia lebih baik dilakukan dengan jalan diplomasi.

Pada awal November 1946, perundingan diadakan di Indonesia, bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 - 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir, anggotanya Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Sementara pihak Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn dengan beberapa anggota, yakni Van Mook, F de Boor, dan van Pool. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killearn, juga ada saksi-saksi yakni Amir Syarifudin, dr. Leimena, dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta juga hadir di dalam perundingan Linggarjati itu.

Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri atas 17 pasal. Isi pokok Perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut:

1) Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara *de facto* pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra. Daerah-daerah yang diduduki Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI;
2) Akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia) sebagai negara berdaulat;
3) Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh raja Belanda;
4) Pembentukan NIS dan Uni Indonesia- Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949;

5) Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing;
6) Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara; dan
7) Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase.

Naskah persetujuan kemudian diparaf oleh kedua delegasi di Istana *Rijswijk* Jakarta (sekarang Istana Merdeka). Isi perundingan itu harus disyahkan dahulu oleh parlemen masing-masing (Indonesia oleh KNIP). Untuk meratifikasi dan mensyahkan isi Perundingan Linggarjati, kedua parlemen masih enggan dan belum puas. Pada bulan Desember 1946, Presiden mengeluarkan Peraturan No. 6 tentang penambahan anggota KNIP. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar suara yang pro Perjanjian Linggarjati dalam KNIP. Tanggal 28 Februari 1947 Presiden melantik 232 anggota baru KNIP. Akhirnya isi Perundingan Linggarjati disahkan oleh KNIP pada tanggal 25 Maret 1947, yang lebih dikenal sebagai tanggal Persetujuan Linggarjati.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.13 Schermerhom dan Syahrir sedang memaraf naskah Persetujuan Linggarjati.

Setelah Persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan RI. Misalnya dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afganistan, Birma (Myanmar), Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Perjanjian Linggarjati itu mengandung prinsip-prinsip pokok yang harus

disetujui oleh kedua belah pihak melalui serangkaian perundingan lanjutan. Ketentuan dalam pasal (2) misalnya, menentukan bahwa RI dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk Negara Indonesia Serikat sebagai pengganti Hindia Belanda. Namun, perundingan lanjutan terhambat karena masing-masing pihak menuduh tentaranya melanggar ketentuan genjatan senjata. Dokumen perjanjian itu pun akhirnya tidak membantu untuk memecahkan masalah bagi kedua belah bangsa. Bahkan memperburuk keadaan.

Belanda kemudian mengadakan genjatan senjata operasi militer di Jawa dan Sumatra pada 21 Juli 1947. Belanda menyebut tindakan itu sebagai "*actie politionel*" (tindakan kepolisian). Istilah itu berarti "pengamanan dalam negeri" atau yang dimaksud di sini adalah Indonesia. Artinya, Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia, seperti yang sudah dinyatakan dalam dokumen Linggarjati. Belanda memberi sandi pada serangan umum itu dengan "Operasi Produk" yaitu operasi yang ditujukan untuk wilayah-wilayah yang dianggap penting secara ekonomi bagi Belanda.

Kondisi itu mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi. Ada dua resolusi yang disampaikan oleh PBB. Pertama, menghimbau agar RI dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk Negara Indonesia Serikat, seperti yang diamanatkan dalam perjanjian Linggarjati. Kedua, adalah usulan Amerika agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Usulan itu kemudian dikenal dengan istilah "Komisi Tiga Negara".

Komisi Tiga Negara (KTN) itu terdiri atas Australia, yang diwakili oleh Richard C Kirby yang dipilih oleh RI. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika diwakili oleh Frank P. Graham yang dipilih oleh Belgia dan Autralia. Hasil dari KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda mengusulkan agar diadakan perundingan di tempat yang netral. Atas jasa Amerika Serikat, maka digunakannya kapal yang mengangkut tentaranya, dengan nama USS Renville didatangkan ke Teluk Jakarta dari Jepang. Tentang perjanjian Renville ini akan dibahas lebih lanjut di bagian berikutnya.

d. Konferensi Malino

Dalam situasi politik yang tidak menentu di Indonesia, Belanda melakukan tekanan politik dan militer di Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Malino. Penyelenggaraan konferensi ini bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Di samping itu, di Pangkal Pinang, Bangka diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diselenggarakan pada 15-26 juli 1946, sedangkan Konferensi Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946. Diharapkan daerah-daerah ini akan mendukung Belanda dalam pembentukan negara federasi. Di samping itu, Belanda juga terus mengirim pasukannya memasuki Indonesia. Dengan demikian, kadar permusuhan antara kedua belah pihak semakin meningkat. Namun usaha-usaha diplomasi terus dilakukan. Sebagai contoh tanggal 14 Oktober 1946 tercapai persetujuan gencatan senjata. Usaha-usaha perundingan pun terus diupayakan.

Setelah perjanjian Linggarjati, Van Mook mengambil inisiatif untuk mendirikan pemerintahan federal sementara sebagai pengganti Hindia Belanda. Tindakan Van Mook itu menimbulkan kegelisahan di kalangan negara-negara bagian yang tidak terwakili dalam susunan pemerintahan. Pada kenyataannya pemerintah federal yang didirikan Van Mook itu tidak beda dengan pemerintah Hindia Belanda. Untuk itulah negara-negara federal mengadakan rapat di Bandung pada Mei – Juli 1948. Konferensi Bandung itu dihadiri oleh empat negara federal yang sudah terbentuk yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur, Negara Pasundan, dan Negara Madura. Juga dihadiri oleh daerah-daerah otonom seperti, Bangka, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, dan Jawa Tengah. Sebagai ketua adalah Mr. T. Bahriun dari Negara Sumatra Timur.

Rapat itu diberi nama *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO), yaitu suatu pertemuan untuk Musyawarah Federal. Pengambil inisiatif BFO itu adalah Ida Agung Gde Agung, seorang perdana menteri Negara Indonesia Timur. juga R.T. Adil Puradiredja, seorang perdana menteri Negara Pasundan. BFO itu dimaksudkan untuk mencari solusi dari situasi politik yang genting akibat dari perkembangan politik antara Belanda dan RI yang juga berpengaruh pada perkembangan negara-negara bagian. Pertemuan Bandung juga

dirancang untuk menjadikan pemerintahan peralihan yang lebih baik daripada pemerintahan Federal Sementara buatan Van Mook. (kamu dapat membaca lebih lanjut tentang peran BFO dalam perjuangan diplomasi pada buku Taufik Abdullah dan A.B.Lapian (ed) atau buku-buku yang lain).

2. Agresi Militer I

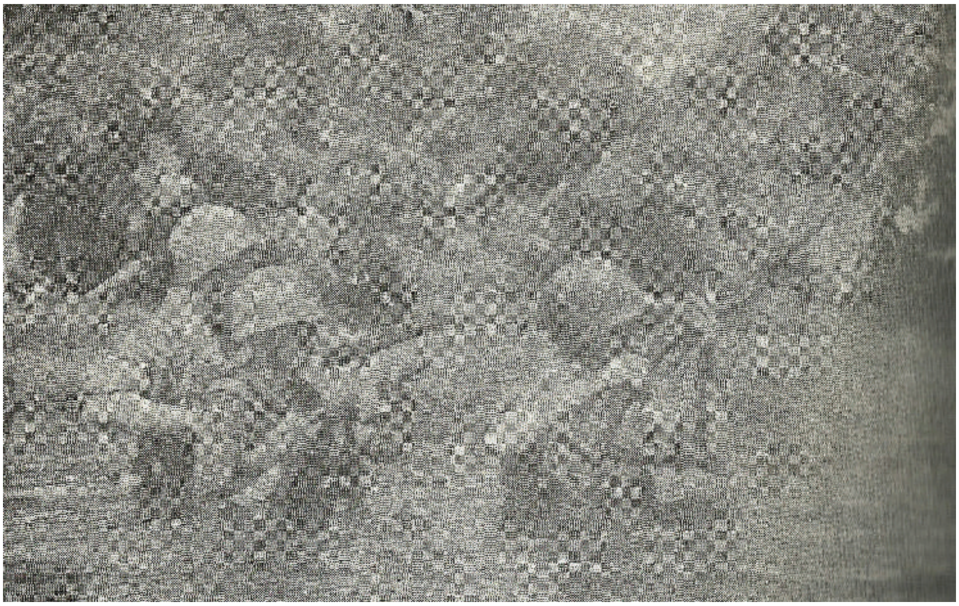
Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi Persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi Persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan boneka, Belanda juga terus memasukkan kekuatan tentaranya. Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang isinya antara lain sebagai berikut.

a. Pembentukan Pemerintahan Federal Sementara (Pemerintahan Darurat) secara bersama.
b. Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri.
c. Dewan Urusan Luar Negeri, bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa; dan
d. Pembentukan Pasukan Keamanan dan Ketertiban Bersama (*gendarmerie*), Pembentukan Pasukan Gabungan ini termasuk juga di wilayah RI.

Pada prinsipnya Syahrir (yang kabinetnya jatuh Juni 1947) dapat menerima beberapa usulan, tetapi menolak mengenai pembentukan Pasukan Keamanan Bersama di wilayah RI. Tanggal 3 Juli dibentuk kabinet baru di bawah Amir Syarifuddin yang juga tetap menolak pembentukan Pasukan Keamanan Bersama di wilayah RI.

Pada tanggal 21 Juli 1947 tengah malam, pihak Belanda melancarkan ‘aksi polisional’ mereka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan di Jawa. Di Sumatra, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batu bara di sekitar Palembang dan Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dalam kebingungan dan menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan.

Di beberapa daerah terjadi aksi-aksi pembalasan.Orang-orang Cina di Jawa Barat dan kaum bangsawan yang dipenjarakan di Sumatra Timur dibunuh. Beberapa orang Belanda, termasuk Van Mook ingin melanjutkan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang tidak menyukai 'aksi polisional' tersebut menggiring Belanda untuk segera menghentikan peperangan terhadap Republlik Indonesia.



Sumber: Pengabdian Selama Perang Kemerdekaan Bersama Brigade Ronggolawe, 1985.
Gambar 7.14 Gerak tentara Belanda di Jawa dan daerah yang dikuasai pada agresi militer Belanda.

Ibu kota RI dapat dikurung Belanda. Hubungan ke luar bagi Indonesia juga mengalami kesulitan, karena pelabuhan-pelabuhan telah dikuasai Belanda. Secara ekonomis, Belanda juga berhasil menciptakan kesulitan bagi RI. Daerah-daerah penghasil beras jatuh ke tangan Belanda. Hubungan ke luar juga terhambat karena blokade Belanda. Tetapi Belanda belum berhasil menghancurkan mental dan kekuatan Tentara Indonesia yang didukung oleh kekuatan rakyat.

Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia-Belanda dimasukan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Pemintaan itu diterima baik dan dimasukkan dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan

Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Konsuler dengan anggota-anggotanya yang terdiri atas para Konsul Jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi Konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Foote dengan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Perancis, Inggris dan Australia.

Komisi Konsuler itu diperkuat dengan personil militer Amerika Serikat dan Perancis sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus 1947 pasukan masih mengadakan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut oleh pihak Belanda berdasarkan kemajuan-kemajuan pasukannya setelah pemerintah melakukan gencatan senjata. Namun penghentian tembak-menembak tidak dimusyawarahkan dan belum ditemukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya agar jumlah korban bisa dikurangi.

Pada tanggal 3 Agustus 1947 Belanda menerima resolusi DK (Dewan Keamanan) PBB dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Pelaksanaannya dimulai pada malam hari tanggal 4 Agustus1947. Tanggal 14 Agustus 1947, dibuka sidang DK PBB. Dari Indonesia hadir, antara lain Sutan Syahrir. Dalam pidatonya, Syahrir menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran, perlu dibentuk Komisi Pengawas.

Pada tanggal 25 Agustus 1947, DK PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan suatu *Commitee of Good Offices* (Komisi Jasa-jasa Baik) atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Belanda menunjuk Belgia sebagai anggota, sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian Belanda dan Indonesia memilih negara pihak ketiga, yakni Amerika. Komisi resmi terbentuk tanggal 18 September 1947. Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia dipimpin oleh Paul Van Zeelland dan Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham.

Ternyata Belanda masih terus berulah, sebelum Komisi Tiga Negara datang di Indonesia. Belanda terus mendesak wilayah dan melakukan perluasan wilayah kedudukannya. Kemudian tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook, menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah RI pada saat gencatan senjata dilaksanakan. Garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik

terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah RI lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut.

3. Peran Komisi Tiga Negara

Masalah Indonesia-Belanda telah dibawa dalam sidang-sidang PBB. Hal ini menunjukkan bahwa masalah Indonesia telah menjadi perhatian bangsa-bangsa dunia. Kekuatan Indonesia di forum internasional pun semakin kuat dengan kecakapan para diplomator Indonesia yang meyakinkan negara-negara lain bahwa kedaulatan Indonesia sudah sepantasnya dimiliki bangsa Indonesia. Tentu saja bahwa kepercayaan bukan disebabkan oleh para diplomator saja. Perjuangan rakyat Indonesia adalah bukti bahwa kemerdekaan merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia. PBB sebagai organisasi internasional berperan aktif menyelesaikan konflik antara RI dengan Belanda. Berikut ini beberapa peran PBB dalam penyelesaian konflik Indonesia Belanda.

Atas usul Amerika Serikat DK PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. KTN berperan aktif dalam penyelenggaraan Perjanjian Renville Serangan Belanda pada Agresi Militer II dilancarkan di depan mata KTN sebagai wakil DK PBB di Indonesia. KTN membuat laporan yang disampaikan kepada DK PBB, bahwa Belanda banyak melakukan pelanggaran. Hal ini telah menempatkan Indonesia lebih banyak didukung negara-negara lain.

4. Perjanjian Renville

Komisi Tiga Negara tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia maupun Belanda. Indonesia dan Belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan pertemuan di geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat. Indonesia dan Belanda kemudian menerima tawaran Amerika Serikat.

Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yang sudah berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda

dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda.

Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi Perundingan Renville yang terdiri atas tiga hal sebagai berikut:

a) Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook (10 pasal).
b) Dasar-dasar politik Renville, yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai (12 pasal).
c) Enam pasal tambahan dari KTN yang berisi, antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan (6 pasal).

Sebagai konsekuensi ditandatanganinya Perjanjian Renville, wilayah RI semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook. Berdasarkan garis demarkasi Van Mook itu wilayah Republik Indonesia tinggal meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Dampak lainnya adalah Anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda, harus ditarik masuk ke wilayah RI di sekitar Yogyakarta. Sebagai contoh pasukan yang berasal dari kesatuan Divisi Siliwangi yang berjumlah sekitar 35 000 orang harus ditarik dan dipindahkan ke wilayah RI. Kemudian sejumlah sekitar 6000 pasukan dari Jawa Timur ditarik masuk ke wilayah RI. Peristiwa inilah yang dikenal dengan peristiwa “hijrah”. Peristiwa “hijrah” ini dimulai tanggal 1 Februari 1948.



Sumber: Atlas Sejarah Indonesia.
Gambar 7.15 Peta wilayah RI berdasar demarkasi Van Mook.

Pada mulanya para pejuang TNI pejuangan yang berada di pos atau kantong-kantong perjuangan itu tidak mau ditarik mundur ke wilayah RI atas dasar garis Van Mook itu. Mereka berpandangan bahwa mereka tidak kalah perang, tidak perlu dievakuasi. Mereka tidak mau ditarik mundur di belakang garis Van Mook. Sudah tentu ini menjadi problem tersendiri karena sudah menjadi keputusan dalam Perundingan Renville. Tampillah Sudirman dengan kepiawian dan kebapakannya mendekati mereka para anggota TNI itu dengan menegaskan bahwa kita TNI dan para pejuang Indonesia tidak kalah perang, para prajurit tidak dievakuasi, tetapi melakukan hijrah ke tempat yang kondusif untuk melakukan konsolidasi untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Kemudian Sudirman mengeluarkan amanatnya sebagai berikut.

"Anak-anakku anggota Angkatan Perang, tiap-tiap perjuangan mempunyai pasang surutnya, tetapi dengan iman kita yang tetap teguh dan jiwa yang tetap besar, kita masih sanggup untuk mengatasi percobaan ini dan percobaan-percobaan lainnya yang mungkin akan menyusul lagi."(Soekanto, SA., 1981).

Dengan pendekatan dan amanat dari panglima Besar Sudirman ini, dengan penuh semangat para TNI melakukan hijrah untuk memasuki wilayah RI yang diakui dalam Perjanjian Renville.

» *Coba diskusikan dengan anggota kelompokmu. Mengapa peristiwa penarikan pasukan TNI dari Jawa Barat dan Jawa Timur ke wilayah RI itu dinamakan hijrah? Siapa sebenarnya yang menamakan peristiwa itu sebagai hijrah?*

Isi Perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin dan pada tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Dengan demikian perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian Linggarjati.

5. Agresi Militer II dan Penangkapan Pimpinan Negara

Sebelum macetnya perundingan Renville sudah ada tanda-tanda bahwa Belanda akan melanggar persetujuan Renville. Oleh karena itu, pemerintah RI dan TNI sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu Belanda akan melakukan aksi militernya untuk menghancurkan RI dengan kekuatan senjata. Untuk menghadapi kekuatan Belanda, maka dibentuk Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan Hidayat.

Seperti yang telah diduga sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Sebelum pasukan Belanda bergerak lebih jauh, Van Langen (Wakil Jenderal Spoor) berbisik kepada Van Beek (komandan lapangan agresi II): *"overste tangkap Sukarno, Hatta, dan Sudirman, mereka bertiga masih ada di istana"*, demikian perintah pimpinan Belanda terhadap Van Beek untuk menangkap dan membunuh ketiga pimpinan nasional kita.

Agresi militer II itu telah menimbulkan bencana militer dan politik, baik bagi Belanda maupun Indonesia. Walaupun Belanda tampak memperoleh kemenangan dengan mudah, tetapi sebenarnya membayar cukup mahal. Serangan Belanda ini telah menuai kritik dari berbagai negara.



Sumber: Gelora Api Revolusi, 1986.
Gambar 7.16 Tentara Belanda pada saat Agresi Militer II.

Dengan taktik perang kilat, Belanda melancarkan serangan di semua front RI. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan-pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo dan dengan cepat berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibukota, meskipun mereka tahu akan ditawan musuh. Alasannya, agar mereka dengan mudah ditemui oleh TNI, sehingga kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Di samping itu, Belanda tidak mungkin melancarkan serangan secara terus-menerus, karena Presiden dan Wakil Presiden sudah ada di tangan musuh.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.17 Pasukan Belanda memasuki kota Yogyakarta.

Sebagai akibat dari keputusan untuk tetap tinggal di ibu kota, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta beserta sejumlah Menteri, Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Suryadarma dan lainnya juga ikut ditawan tentara Belanda. Namun, kelangsungan pemerintahan RI dapat dilanjutkan dengan baik, karena sebelum pihak Belanda sampai di Istana, Presiden Sukarno telah berhasil mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang sedang melakukan kunjungan ke Sumatra untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Perintah sejenis juga diberikan kepada Mr. A.A. Maramis yang sedang di India. Apabila Syafruddin Prawiranegara ternyata gagal melaksanakan kewajiban pemerintah pusat, maka Maramis diberi wewenang untuk membentuk pemerintah pelarian *(Exile Goverment)* di luar negeri.

Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang sakit harus dirawat oleh dr. Suwondo selaku dokter pribadinya di rumah di kampung Bintaran. Setelah mendengar Belanda melancarkan serangan, Jenderal Sudirman seperti timbul semangat baru. Ia mengingat janjinya saat menguncapkan sumpah saat dilantik sebagai panglima TNI akan memperjuangkan kedaulatan dan keutuhan NKRI sampai titik darah yang penghabisan. Maka ia bangkit dari tempat tidur dengan berucap: "komando kembali saya ambil alih". Semua pasukan siap sesuai strategi yang telah direncanakan. Sudirman segera menuju istana Presiden di Gedung Agung. Rencananya untuk mengajak Presiden dan pimpinan yang lain untuk meninggalkan kota untuk bergerilya. Tetapi Presiden Sukarno tidak bersedia dan akan tetap di istana, sehingga akhirnya ditangkap Belanda.

Ketika mengetahui Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa pemimpin lainnya ditangkap Belanda, maka Jenderal Sudirman dengan para pengawalnya pergi ke luar kota untuk mengadakan perang gerilya. Para ajudan yang menyertai Jenderal Sudirman, antara lain Suparjo Rustam dan Cokropranolo, dr. Suwondo. Sedangkan pasukan di bawah pimpinan Letkol Soeharto terus berusaha menghambat gerak maju pasukan Belanda. Sebelum berangkat ke luar kota Sudirman sempat memerintahkan Kapten Suparjo Rustam untuk menyampaikan sebuah perintah kilat dari panglima melalui RRI Yogyakarta yang ditujukan kepada semua anggota Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), yang konsepnya sudah ditulis tangan sendiri oleh Panglima Besar Sudirman. Isi perintah kilat itu sebagai berikut:

.

Perintah Kilat No.1/PB/D/48

1. *Kita telah diserang*
2. *Pada tanggal 19 Desember Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo.*
3. *Pemerintah Belanda telah membatalkan Persetujuan Gencatan Senjata*
4. *Semua angkatan Perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda.*

Dikeluarkan di tempat
Tanggal 19 Desember 1948,
Jam 08.00

Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia
Letnan Jenderal Sudirman

Aksi militer Belanda yang kedua ini ternyata menarik perhatian PBB, karena Belanda secara terang-terangan tidak mengikuti lagi Persetujuan Renville di depan Komisi Tiga Negara yang ditugaskan oleh PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi, agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan Presiden RI dan para pemimpin politik yang ditawan Belanda. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari AS yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan.

6. Peran PDRI : Penjaga Eksistensi RI

Pada saat terjadi agresi militer Belanda II, Presiden Sukarno telah membuat mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintah darurat. Sukarno mengirimkan mandat serupa kepada Mr. Maramis dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di New Delhi, India apabila pembentukan PDRI di Sumatra mengalami kegagalan. Namun, Syafruddin berhasil mendeklarasi berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 1948.

Susunan pemerintahannya antara lain sebagai berikut:
a) Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan;
b) Mr. T.M. Hassan sebagai wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama;
c) Ir. S.M. Rasyid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Pemuda;
d) Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman;
e) Ir. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan;
f) Maryono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI;
g) Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar;
h) Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa; dan
i) Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatra.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.18 Syafruddin Prawiranegara.

PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara ternyata berhasil memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintah RI. Peranan PDRI itu antara lain sebagai berikut.

PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah pusat. PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. PDRI juga berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara RI dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya.

Konflik antara Indonesia dengan Belanda masih terus berlanjut. Namun semakin terbukanya mata dunia terkait dengan konflik itu, menempatkan posisi Indonesia semakin menguntungkan. Untuk mempercepat penyelesaikan konflik ini maka oleh DK PBB dibentuklah UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*) atau Komisi PBB untuk Indonesia sebagai pengganti KTN. UNCI ini memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas.
UNCI memiliki tugas dan kekuasaan sebagai berikut:

a) memberi rekomendasi kepada DK PBB dan pihak-pihak yang bersengketa (Indonesia dan Belanda);
b) membantu mereka yang bersengketa untuk mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi DK PBB;
c) mengajukan saran kepada DK PBB mengenai cara-cara yang dianggap terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara aman dan tenteram;
d) membantu memulihkan kekuasaan pemerintah RI dengan segera;
e) mengajukan rekomendasi kepada DK PBB mengenai bantuan yang dapat diberikan untuk membantu keadaan ekonomi penduduk di daerah-daerah yang diserahkan kembali kepada RI;

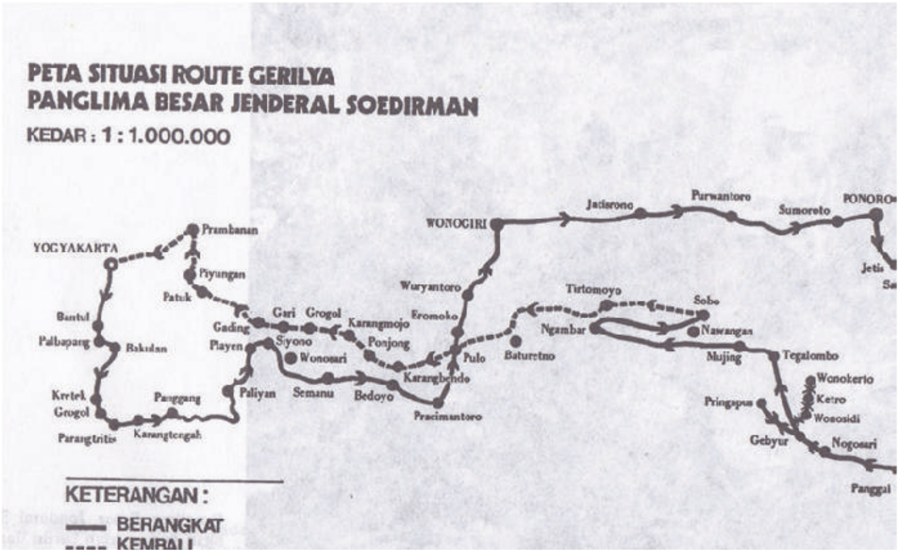
f) memberikan saran tentang pemakaian tentara Belanda di daerah-daerah yang dianggap perlu demi ketenteraman rakyat; dan
g) mengawasi pemilihan umum, bila di wilayah Indonesia diadakan pemilihan.

Ketika Presidan, Wakil presiden dan pembesar-pembesar Republik ditawan Belanda di Bangka, delegasi BFO (*Bijzonder Federaal Overleg*) mengunjungi mereka dan mengadakan perundingan, UNCI mengumumkan bahwa delegasi-delegasi Republik, Belanda dan BFO telah mencapai persetujuan pendapat mengenai akan diselenggarakannya KMB. UNCI juga berhasil menjadi mediator dalam KMB. Bahkan peranan itu juga tampak sampai penyerahan dan pemulihan kekuasaan Pemerintah RI di Indonesia.

7. Tetap Memimpin Gerilya

Kalau para pemimpin pemerintahan seperti Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta dan beberapa menteri ditangkap Belanda, Panglima Besar Sudirman yang dalam kondisi sakit hanya dengan satu paru-paru justru tetap teguh untuk memimpin perang gerilya. Ia dan rombongan melakukan perjalanan dan pergerakan dari Yogyakarta menuju Gunungkidul dengan melewati beberapa kecamatan, menuju Pracimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek dan Kediri. Dalam gerakan gerilya dengan satu paru-paru itu Sudirman kadang harus ditandu atau dipapah oleh pengawal masuk hutan, naik gunung, turun jurang harus memimpin pasukan, memberikan motivasi dan komando kepada TNI dan para pejuang untuk terus mempertahankan tegaknya panji-panji NKRI. Dari Kediri lalu memutar kembali melewati Trenggalek, terus melakukan perjalanan sampai akhirnya di Sobo. Di tempat ini telah dijadikan markas gerilya sampai saat Presiden dan Wakil Presiden dengan beberapa menteri kembali ke Yogyakarta.

Sungguh heroik perjalanan Sudirman. Ia telah menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km. Waktu gerilya mencapai enam bulan dengan penuh derita, lapar dan dahaga. Sudirman tidak lagi memikirkan harta, jiwa dan raganya semua dikorbankan demi tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Sekalipun dalam keadaan sakit, Sudirman terus memberi semangat anak buahnya untuk berjuang melawan kelicikan Belanda.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.19 Rute gerilya Pangsar Sudirman

8. Serangan Umum 1 Maret 1949

Pada saat para pemimpin ditangkap, Panglima TNI Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya. Beliau dan pasukannya segera meninggalkan kota dan mengatur siasat. Bagaimana peranan TNI setelah agresi militer Belanda II? Apakah mereka masih melakukan perlawanan terhadap Belanda?

Pihak Belanda ternyata tidak mau segera menerima resolusi DK PBB, tanggal 28 Januari 1949. Belanda masih mengakui bahwa RI sebenarnya tinggal nama. RI sudah tidak ada, yang ada hanyalah para pengacau. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwana IX lewat radio menangkap berita luar negeri tentang rencana DK PBB yang akan mengadakan sidang lagi pada bulan Maret 1949, untuk membahas perkembangan di Indonesia.

Sri Sultan berkirim surat kepada Jenderal Sudirman tentang perlunya tindakan penyerangan terhadap Belanda. Sudirman minta agar Sri Sultan membahasnya dengan komandan TNI setempat, yakni Letkol Soeharto. Segera penyerangan terhadap Belanda di Yogyakarta dijadwalkan tanggal 1 Maret 1949 dini hari.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.20 Letkol. Soeharto dan anak buahnya.

Pada tanggal 1 Maret 1949 dini hari sekitar pukul 06.00 sewaktu sirine berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru. Letkol Soeharto langsung memegang komando menyerang ke pusat kota. Serangan umum ini ternyata sukses. Selama enam jam (dari jam 06.00 - jam 12.00 siang) Yogyakarta dapat diduduki oleh TNI. Setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Gombong dan Magelang, dapat memukul mundur para pejuang kita.

Keberhasilan serangan umum itu, kemudian disebarluaskan melalui RRI gerilya yang ada di Gunung Kidul. Berita ini dapat ditangkap oleh RRI di Sumatra, yaitu Radio Rimba Raya di Aceh kemudian diteruskan ke luar negeri.

Walaupun hanya sekitar enam jam pasukan Indonesia berhasil menduduki kota Yogyakarta, namun serangan ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Terutama ke dunia internasional untuk membuktikan bahwa RI masih ada, tidak seperti yang diberikan oleh Belanda. Selain mengobarkan semangat rakyat kembali juga menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia masih mempunyai kekuatan. Pada waktu itu di Yogyakarta ada beberapa wartawan asing yang peranannya sangat besar dalam menginformasikan keadaan Indonesia kepada dunia.

9. Persetujuan Roem-Royen

Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dilancarkan oleh para pejuang Indonesia, telah membuka mata dunia bahwa propaganda Belanda itu tidak benar. RI dan TNI masih tetap ada. Namun Belanda tetap membandel dan tidak mau melaksanakan resolusi DK PBB 28 Januari. Perundingan pun menjadi macet.

Melihat kenyataan itu, Amerika Serikat bersikap tegas dan terus mendesak agar Belanda mau melaksanakan resolusi tanggal 28 Januari. Amerika Serikat berhasil mendesak Belanda, untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia.

Ketika terlihat titik terang bahwa RI dan Belanda bersedia maju ke meja perundingan, maka atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 14 April 1949 diselenggarakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota Komisi dari AS. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh H.J. Van Royen. Dalam perundingan itu, RI tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka perundingan-perundingan selanjutnya. Sebaliknya pihak Belanda menuntut agar lebih dulu dicapai persetujuan tentang perintah penghentian perang gerilya oleh pihak RI.

Merle Cochran, wakil dari AS di UNCI mendesak agar Indonesia mau melanjutkan perundingan. Waktu itu Amerika Serikat menekan Indonesia, kalau Indonesia menolak, Amerika tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk apa pun. Perundingan segera dilanjutkan pada tanggal 1 Mei 1949. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai Persetujuan Roem-Royen. Isi Persetujuan Roem-Royen antara lain sebagai berikut:

a) Pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. RI juga akan Ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, guna mempercepat penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS), tanpa syarat.
b) Pihak Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948, serta menyetujui RI sebagai bagian dari NIS.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatra memerintahkan Sri Sultan Hamengkubowono IX untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta dari pihak Belanda. Pihak tentara dengan penuh kecurigaan menyambut hasil persetujuan itu, namun Panglima Jenderal Sudirman memperingatkan seluruh komando kesatuan agar tidak memikirkan masalah-masalah perundingan.

Setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang Kabinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Moh. Hatta. Dalam sidang kabinet juga diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengkobuwono IX menjadi Menteri Pertahanan merangkap Ketua Koordinator Keamanan.

10. Yogya Kembali

Bagaimana setelah disetujuinya Perjanjian Roem Royen? Bagaimana proses kembalinya RI dan nasib pasukan gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman? Sebagai pelaksanaan dari kesepakatan itu, maka pada tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur ke luar Yogyakarta. Setelah itu TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan Peristiwa Yogya Kembali. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949.

Sejak awal 1949, ada tiga kelompok pimpinan RI yang ditunggu untuk kembali ke Yogyakarta. Kelompok pertama adalah Kelompok Bangka. Kedua adalah kelompok PDRI dibawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara. Kelompok ketiga adalah angkatan perang di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sultan Hamangkubuwono IX bertindak sebagai wakil Republik Indonesia, karena Keraton Yogyakarta bebas dari intervensi Belanda, maka mempermudah untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kembalinya Yogya ke Republik Indonesia. Kelompok Bangka yang terdiri atas Sukarno, Hatta, dan rombongan kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949, kecuali Mr. Roem yang harus menyelesaikan urusannya sebagai ketua delegasi di UNCI, masih tetap tinggal di Jakarta.

Rombongan PDRI mendarat di Maguwo pada 10 Juli 1949. Mereka disambut oleh Sultan Hamangkubuwono IX, Moh. Hatta, Mr.Roem, Ki Hajar Dewantara, Mr. Tadjuddin serta pembesar RI lainnya.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.21 Presiden, Wakil Presiden dan rombongan tiba di Yogyakarta

Pada tanggal itu pula rombongan Panglima Besar Jenderal Sudirman ditunggu kedatangannya di Yogyakarta. Sebelumnya berangkat menuju Yogyakarta, Sudirman berpamitan dengan masyarakat Sobo dan keluarga Pak Karso yang rumahnya digunakan Sudirman. Ia berpamitan dengan bahasa Jawa, kurang lebih demikian: "…*gandheng kulo badhe wangsul dateng Ngayojo malih, namung weling kulo dateng Pak Karso (lan keluargo ing mriki), mugo sampun ngantos nggadhahi alangan satunggal punopo* (berkenaan kami akan kembali ke Yogya, hanya pesan kami semoga Pak Karso (dan keluarga di sini) tidak mendapatkan halangan sesuatu apa" (Sardiman, 2008). Sudirman kemudian berangkat dan selanjutnya memasuki Desa Wonosari.

Sesampainya di kota Yogyakarta, Rombongan Jenderal Sudirman dijemput oleh Sultan Hamengkubuwono IX bersama pasukan di bawah pimpinan Letkol Soeharto sebagai Panglima Perang Yogyakarta, dengan disertai dua orang wartawan, yaitu Rosihan Anwar dari *Pedoman* dan Frans Sumardjo dari *Ipphos.* Saat menerima rombongan penjemput itu Panglima Besar Jenderal Sudirman berada di rumah lurah Wonosari. Saat itu beliau sedang mengenakan pakaian gerilya dengan ikat kepala hitam. Pada esok harinya rombongan Pangeran Besar Jenderal Sudirman dibawa kembali ke Yogyakarta. Saat itu beliau sedang menderita sakit dengan ditandu dan

diiringi oleh utusan dan pasukan beliau dibawa kembali ke Yogyakarta. Dalam kondisi letih dan sakit beliau mengikuti upacara penyambutan resmi dengan mengenakan baju khasnya yaitu pakaian gerilya.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.22 Jenderal Sudirman dengan ditandu memasuki kota Yogyakarta setelah melakukan perang gerilya.

Upacara penyambutan resmi para pemimpin RI di Ibukota dilaksanakan dengan penuh khidmat pada 10 Juli. Sebagai pimpinan inspektur upacara adalah Syafruddin Prawiranegara, didampingi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan para pimpinan RI yang baru saja kembali dari pengasingan Belanda. Pada 15 Juli 1949, untuk pertama kalinya diadakan sidang kabinet pertama yang dipimpin oleh Moh. Hatta. Pada kesempatan itu Syafruddin Prawiranegara menyampaikan kepada Presiden Sukarno tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PDRI selama delapan bulan di Sumatra Barat. Pada kesempatan itu pula Syafruddin Prawiranegara secara resmi menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden RI Sukarno. Dengan demikian maka berakhirlah PDRI yang selama delapan bulan memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi RI.

11. Konferensi Inter Indonesia

Belanda tidak berhasil membentuk negara-negara bagian dari suatu negara federal. BFO. Namun di antara para pemimpin BFO banyak yang sadar dan melakukan pendekatan untuk bersatu kembali dalam upaya pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini terutama didorong oleh sukses yang diperoleh para pejuang dan TNI kita dalam perang gerilya. Mereka sadar hanya akan dijadikan alat dan boneka bagi kekuasaan Belanda. Oleh karena itu perlu dibentuk semacam front untuk menghadapi Belanda.

Sementara itu, Kabinet Hatta meneruskan perjuangan diplomasi, yaitu menyelesaikan masalah intern terlebih dahulu. Beberapa kali diadakan Konferensi Inter-Indonesia untuk menghadapi usaha Van Mook dengan Negara bonekanya. Ternyata hasil Konferensi Inter-Indonesia itu berhasil dengan baik. Walaupun untuk sementara pihak RI menyetujui terbentuknya Negara RIS, tetapi bukan berarti pemerintah RIS tunduk kepada pemerintah Belanda.

Pada bulan Juli dan Agustus 1949 diadakan konferensi Inter-Indonesia. Dalam konferensi itu diperlihatkan bahwa politik *devide et impera* Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar wilayah RI mengalami kegagalan. Hasil Konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta antara lain:

a. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme;
b. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden;
c. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari RI maupun Belanda;
d. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional, dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang; dan
e. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri.

Dalam konferensi selanjutnya juga diputuskan untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil RI dan BFO. Tugasnya menyelenggarakan persiapan dan menciptakan suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. BFO juga mendukung tuntutan RI tentang penyerahan kedaulatan tanpa syarat, tanpa ikatan politik maupun ekonomi. Pihak RI juga menyepakati bahwa Konstitusi RIS akan dirancang pada saat KMB di Den Haag.

12. Konferensi Meja Bundar

Perjanjian Roem Royen belum menyelesaikan masalah Indonesia Belanda. Salah satu agenda yang disepakati Indonesia-Belanda adalah penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Bagaimana pelaksanaan KMB tersebut? Bagaimana kelanjutan perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah selesai KMB? Mari kita lacak peristiwa-peristiwa proses pengakuan kedaulatan RI dari Belanda!

Indonesia telah menetapkan delegasi yang mewakili KMB yakni Moh. Hatta, Moh. Roem, Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamijoyo, Dr. Sukiman, Ir. Juanda, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. AK. Pringgodigdo, TB. Simatupang, dan Mr. Sumardi. Sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen dan dari UNCI sebagai mediator adalah Chritchley. Tujuan diadakan KMB adalah untuk:

a. menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda; dan
b. mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada Negara Indonesia Serikat, sesuai dengan ketentuan Persetuiuan Renville.



Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Gambar 7.23 Suasana Pembukaan KMB.

Beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam KMB terutama sebagai berikut.

a. Soal Uni Indonesia-Belanda, pihak Indonesia menghendaki agar sifatnya hanya kerja sama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menghendaki kerja yang lebih luas dengan organisasi permanen (mengikat).
b. Soal utang, pihak Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sementara Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan, termasuk biaya perang kolonial melawan TNI.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949. 1995
Gambar 7.24 Hatta berpidato dalam Konferensi Meja Bundar.

Setelah melalui pembahasan dan perdebatan, tanggal 2 November 1949 KMB dapat diakhiri. Hasil-hasil keputusan dalam KNIB antara lain sebagai berikut:

a. Belanda mengakui keberadaan negara RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian/daerah yang pernah dibentuk Belanda.
b. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian, setelah pengakuan kedaulatan.
c. Corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh para delegasi RI dan BFO selama KMB berlangsung.

d. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar , berdasarkan kerja sama secara sukarela dan sederajat. Uni Indonesia Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda.
e. RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan.
f. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.

Ada sebagian keputusan yang merugikan Indonesia, yakni beban utang Hindia Belanda yang harus ditanggung RIS sebesar 4,3 miliar gulden. Juga penundaan soal penyelesaian Irian Barat yang merupakan masalah yang menjadi pekerjaan panjang bangsa Indonesia. Tetapi yang jelas bahwa hasil KMB telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk membangun negeri sendiri.

Setelah KMB selesai dan menghasilkan berbagai keputusan dengan segala cara pelaksanaannya, kemudian Moh. Hatta dan rombongan pada tanggal 7 November 1949 meninggalkan negeri Belanda. Rombongan kemudian singgah ke Kairo dan Rangoon. Tanggal 14 November 1949 Moh. Hatta tiba di Maguwo, Yogyakarta disambut oleh Presiden.

13. Pembentukan Republik Indonesia Serikat

Isi KMB diterima oleh KNIP melalui sidangnya pada tanggal 6 Desember 1949. Tanggal 14 Desember 1949 diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil Pemerintah RI, pemerintah negara-negara bagian, dan daerah untuk membahas Konstitusi RIS. Pertemuan ini menyetujui naskah Undang-Undang Dasar yang akan menjadi Konstitusi RIS.

Negara RIS berbentuk federasi meliputi seluruh Indonesia dan RI menjadi salah satu bagiannya. Bagi RI keputusan ini sangat merugikan, tetapi merupakan strategi agar Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia sekalipun dalam bentuk federasi RIS. Dalam konstitusi itu juga dijelaskan bahwa Presiden dan para menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, secara bersama-sama merupakan pemerintah. Lembaga perwakilannya terdiri atas dua

kamar, yakni Senat dan DPR. Senat merupakan perwakilan negara/daerah bagian yang masing-masing diwakili dua orang. Kemudian, DPR beranggota 150 orang yang merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 16 Desember1949, Ir. Sukarno terpilih sebagai Presiden RIS. Secara resmi Ir. Sukarno dilantik sebagai Presiden RIS tanggal 17 Agustus 1949, bertempat di Bangsal Siti Hinggil Keraton Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung, Mr. Kusumah Atmaja, dan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Tanggal 20 Desember 1949 Kabinet Moh. Hatta dilantik. Dengan demikian terbentuk Pemerintahan RIS.

Dengan diangkatnya Sukarno sebagai Presiden RIS, maka presiden RI menjadi kosong. Untuk itu, ketua KNIP, Mr. Assaat ditunjuk sebagai pejabat Presiden RI. Tanggal 27 Desember 1949 Mr. Assaat dilantik sebagai pemangku jabatan Presiden RI sekaligus dilakukan acara serah terima jabatan dari Sukarno kepada Mr. Assaat. Langkah ini diambil untuk mempertahankan kelangsungan negara RI. Apabila sewaktu-waktu RIS bubar, maka RI akan tetap bertahan, karena memiliki kepala negara.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 7.25 Upacara serah terima jabatan Presiden RI dari Ir. Sukarno kepada Mr. Assaat.

14. Pengakuan Kedaulatan

Pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di Negeri Belanda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Hatta sedangkan pihak Belanda hadir Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Sasseu bersama-sama menandatangani akte penyerahan kedaulatan di Ruang Tahta Amsterdam. Di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.S. Lovink.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.

Gambar 7.26 Upacara serah terima penandatanganan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949.

Dengan berakhirnya KMB itu, berakhir pula perselisihan Indonesia Belanda. Indonesia kemudian mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan pertama datang dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, yaitu Mesir, Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, Afganistan, India, dan lain-lain. Untuk perkataan "penyerahan kedaulatan" itu oleh pihak Indonesia diartikan sebagai "pengakuan kedaulatan", walaupun pihak Belanda tidak menyetujui dengan perkataan tersebut. Namun, dalam kenyataan oleh masyarakat internasional diakuinya keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Walaupun Belanda sendiri tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan hanya mengakui tanggal 27 Desember 1949, namun keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap terhitung sejak Proklamasi Kemerdekaan oleh bangsa Indonesia. Pada saat itu bangsa Indonesia tidak menghadapi Belanda, melainkan menghadapi Jepang, karena sebelumnya Belanda sudah kalah dan menyerah pada Jepang. Oleh karena itu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mutlak atas usaha bangsa Indonesia sendiri.

15. Kembali ke Negara Kesatuan

Setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan, segera muncul rasa tidak puas di kalangan rakyat terutama negara-negara bagian di luar RI. Sejumlah 15 negara bagian/daerah yang merupakan ciptaan Belanda, terasa berbau kolonial, sehingga belum merdeka sepenuhnya. Negara-negara bagian ciptaan Belanda adalah sebagai berikut.

a. Negara Indonesia Timur (NIT) merupakan negara bagian pertama ciptaan Belanda yang terbentuk pada tahun 1946.
b. Negara Sumatra Timur, terbentuk pada 25 Desember 1947 dan diresmikan pada tanggal 16 Februari 1948. Negara Sumatra Selatan, terbentuk atas persetujuan Van Mook pada tanggal 30 Agustus 1948. Daerahnya meliputi Palembang dan sekitarnya. Presidennya adalah Abdul Malik.
d. Negara Pasundan (Jawa Barat).
e. Negara Jawa Timur, terbentuk pada tanggal 26 November 1948 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda.
f. Negara Madura, terbentuk melalui suatu plebesit dan disahkan oleh Van Mook pada tanggal 21 Januari 1948.

Di samping enam negara bagian tersebut, Belanda masih menciptakan daerah-daerah yang berstatus daerah otonom. Daerah-daerah otonom yang dimaksud adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar (daerah Kalimantan Tengah), Daerah Banjar (Kalimantan Selatan), Kalimantan Tenggara, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, dan Riau Kepulauan.

Setelah pengakuan kedaulatan tuntutan bergabung dengan negara RI semakin luas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Penggabungan antara negara/daerah yang satu

dengan daerah yang lain dimungkinkan karena dikehendaki rakyatnva. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang, Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Karena semakin banyaknya negara-negara bagian/daerah yang bergabung dengan RI maka sejak tanggal 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal tiga yakni RI sendiri, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur.

Perdana Menteri RIS, Moh. Hatta mengadakan pertemuan dengan Sukawati (NIT) dan Mansur (Sumatra Timur). Mereka sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan usul dari DPR Sumatra Timur, proses pembentukan NKRI tidak melalui penggabungan dengan RI tetapi penggabungan dengan RIS. Setelah itu diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS, termasuk dari Sumatra Timur dan NIT. Melalui konferensi itu akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Isi pentingnya adalah :

a. Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RI yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945; dan
b. Penyempurnaan Konstitusi RIS, dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun Rencana UUD Negara Kesatuan.

Panitia bersama juga ditugaskan untuk melaksanakan isi Piagam Persetujuan 19 Mei 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyetujui Rancangan UUD itu menjadi UUD Sementara. Kemudian, tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan Rancangan UUD Sementara KNIP, menjadi UUD yang terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan parlemen (DPR) dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini Presiden Sukarno membacakan Piagam Persetujuan terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Sukarno terus ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden RI, Mr. Asaat. Dengan demikian, berakhirlah riwayat hidup negara RIS, dan secara resmi tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan RI. Sukarno kembali sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI.

Kamu telah mempelajari bagaimana perjuangan bangsa Indonesia memperjuangkan kedaulatan. Berbagai cara dilakukan, baik damai maupun konfrontasi senjata dilayani demi mencapai kedaulatan penuh. Menurut pendapatmu, bagaimana keuntungan dan kerugian bangsa Indonesia melakukan perjuangan diplomasi dan bersenjata dalam memperjuangkan kemerdekaan?

KESIMPULAN

1. *Belanda tidak rela begitu saja melepaskan Indonesia sebagai negara merdeka.*
2. *Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.*
3. *Untuk memecahkan masalah hubungan Indonesia Belanda, bangsa Indonesia menggunakan dua cara yakni diplomasi dan konfrontasi.*
4. *Kesabaran dan kegigihan bangsa Indonesia akhirnya memperoleh hasil dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda.*

LATIH UJI KOMPETENSI

1. Terjadinya Perundingan Renville menimbulkan perbedaan pendapat para tokoh bangsa Indonesia. Jelaskan alasan para tokoh yang menentang hasil perundingan Renville!

2. Menurut pendapatmu, bagaimana peranan bangsa asing yang ikut serta memecahkan masalah Indonesia Belanda?

3. Pada tanggal 1 Juli 1947 Belanda melakukan Agresi Militer I. Jelaskan latar belakang dan dampak terjadinya Agresi Militer Belanda I!

4. Panglima Besar Jendral Sudirman beserta tentaranya melakukan perang gerilya sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Apakah kamu sepakat dengan tindakan yang dilakukan Sudirman? Jelaskan alasanmu!

5. Perjuangan bangsa Indonesia mencapai kedaulatan penuh mengajarkan kepada kehidupan sekarang bagaimana pentingnya kemerdekaan penuh. Menurut pendapat kamu, apakah saat ini Indonesia sudah merdeka 100%? Apakah ada sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang belum merdeka? Apabila ada, coba kamu tuliskan contoh dan analisislah penyebabnya!

C. Nilai-nilai Kejuangan Masa Revolusi

Mengamati Lingkungan



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960, 1995.
Gambar 6.27 Jendral Sudirman di atas tandu.

»

Coba amati gambar di atas!

1. *Berdasarkan gambar tersebut, coba buatlah beberapa pertanyaan!*
2. *Kamu mungkin sudah tahu gambar di atas. Gambar itu adalah Jenderal Sudirman yang sedang ditandu saat memimpin perang gerilya*
3. *Siapakan Sudirman itu?*
4. *Bagaimana peranannya dalam sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia?*
5. *Nilai-nilai apa yang dapat kita kembangkan dalam kehidupan sekarang ?*

Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh revolusi kemerdekaan Indonesia. Sosok tentara, pemimpin, guru, dan bapak bangsa yang berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sosok yang dilahirkan untuk revolusi kemerdekaan. Sosok yang selalu taat kepada pemimpin bangsa. Sosok religius dan tidak pernah takut dan gentar sedikitpun akan kekuatan asing.

» *Untuk memahami karakter Sudirman lebih jauh, coba kamu cari buku tentang biografi Sudirman. Ceritakan kembali kisah Sudirman yang kamu anggap paling berkesan. Tuliskan keteladanan yang pantas ditiru dari kisah tersebut untuk kehidupan pada masa sekarang!*

Mengamati Teks

Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dalam perang kemerdekaan, banyak mengandung nilai-nilai positif sebagai nilai-nilai perjuangan yang penting untuk kamu ketahui. Beberapa nilai perjuangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

1. Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting di dalam setiap bentuk perjuangan. Semua organisasi atau kekuatan yang ada, sekalipun dengan paham/ideologi atau organisasi yang berbeda, namun tetap bersatu dalam menghadapi kaum penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Pada masa perlucutan senjata terhadap Jepang, perang melawan Sekutu maupun Belanda, semua anggota TNI, berbagai anggota kelaskaran dan rakyat bersatu padu.

Persatuan dan kesatuan senantiasa menjadi jiwa dan kekuatan perjuangan. Hal yang cukup menonjol misalnya pada waktu Belanda menciptakan negara-negara bagian dan daerah otonom dalam negara federal. Hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, timbul berbagai kesulitan di lingkungan rakyat Indonesia baik secara politis maupun ekonomis. Hal ini disadari benar oleh rakyat Indonesia, sehingga banyak yang menuntut untuk kembali ke negara kesatuan. Akhirnya tercapai pada tanggal 17 Desember 1950. Negara kesatuan dan nilai persatuan cocok dengan jiwa bangsa Indonesia.

2. Rela Berkorban dan Tanpa Pamrih

Nilai kejuangan bangsa yang sangat menonjol di masa perang kemerdekaan adalah rela berkorban. Para pemimpin, rakyat, dan para pejuang pada umumnya benar-benar rela berkorban tanpa pamrih. Sebagai contoh Jenderal Sudirman yang dalam keadaan sakit, hanya dengan satu paru-paru tetap memimpin perang gerilya. Ia telah menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km dalam waktu sekitar enam bulan dengan penuh derita, lapar dan dahaga, tetapi semangatnya tak pernah padam. Ia tidak hanya mempertaruhkan jiwa dan raganya tetapi juga mengorbankan harta benda untuk tegaknya cita-cita Proklamasi, Negara Indonesia yang bersatu, sejahtera, aman dan tenteram. Begitu juga tokoh-tokoh pejuang yang lain.

Mereka telah mempertaruhkan jiwa dan raganya, mengorbankan waktu dan harta bendanya, demi perjuangan kemerdekaan. Kita tidak dapat menghitung berapa para pejuang kita yang gugur di medan juang, berapa orang yang harus menanggung cacat dan menderita, akibat perjuangannya. Juga berapa jumlah harta benda yang dikorbankan demi tegaknya kemerdekaan, semua tidak dapat kita perhitungkan.

3. Cinta pada Tanah Air

Rasa cinta pada tanah air merupakan faktor pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang kita untuk berjuang di medan laga. Timbullah semangat patriotisme di kalangan para pejuang kita untuk melawan penjajah. Sebagai perwujudan dari rasa cinta tanah air, cinta pada tumpah darahnya maka munculah berbagai perlawanan di daerah untuk melawan kekuatan kaum penjajah. Di Sumatra, di Jawa, Bali, Sulawesi dan tempat-tempat lain, muncul pergolakan dan perlawanan menentang kekuatan asing, demi kemerdekaan tanah airnya.

4. Saling Pengertian dan Harga Menghargai

Di dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, diperlukan saling pengertian dan sikap saling menghargai di antara para pejuang. Sebagai contoh perbedaan pandangan antara pemuda (Syahrir

dkk.) dengan Bung Karno-Bung Hatta dari golongan tua, tetapi karena saling pengertian dan saling menghargai, maka kesepakatan dapat tercapai. Teks proklamasi dapat diselesaikan dan kemerdekaan dapat diproklamasikan, adalah bukti nyata sebuah kekompakan dan saling pengertian di antara para tokoh nasional.

Berangkat dari sikap saling pengertian dan saling menghargai juga dapat memupuk rasa persatuan dan menghindarkan perpecahan. Timbullah rasa kebersamaan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh Islam yang pernah menjadi Panitia Sembilan dan PPKI, memahami dan menghargai kelompok-kelompok lain, sehingga tidak keberatan untuk menghilangkan kata-kata dalam Piagam Jakarta, ”Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” dan diganti dengan ”Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kelompok sipil lebih menekankan cara diplomasi atau perundingan damai, sedangkan kaum militer menekankan strategi perjuangan bersenjata. Ternyata berkat saling menghargai, baik perjuangan diplomasi maupun perjuangan bersenjata dapat saling mendukung. Begitu juga ketika terjadi Agresi Belanda II, para pemimpin sipil ingin bertahan di pusat ibu kota (sehingga akhirnya ditawan Belanda) sedangkan kaum militer ingin ke luar kota untuk melancarkan gerilya. Kaum militer tidak memaksakan kehendaknya agar kaum sipil ikut ke luar kota untuk bergerilya, dan begitu sebaliknya. Semua ini ada hikmahnya, bahwa perjuangan diplomasi maupun perjuangan bersenjata saling mengisi dan sama-sama pentingnya.

Nilai-nilai perjuangan seperti persatuan dan kesatuan, rela berkorban dan tanpa pamrih, cinta tanah air, saling pengertian atau tenggang rasa dan harga menghargai, merupakan nilai-nilai yang penting untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu tidak hanya penting di masa perjuangan menentang penjajahan, tetapi juga dalam kegiatan pembangunan sekarang. Apabila kita memahami dan kemudian mengamalkan nilai-nilai tersebut, menunjukkan adanya kesadaran sejarah yang tinggi. Setiap orang yang memiliki kesadaran sejarah semacam itu tentunya tidak akan korupsi, tidak akan memperkaya diri dengan mengorbankan orang lain, tidak akan sewenang-wenang dan tidak akan menyebarkan isu-isu perpecahan yang hanya untuk kepentingan golongan sendiri. Dengan ini, maka pembangunan demi kemaslahatan umum akan dapat tercapai.

Sungguh kemerdekaan ini telah ditegakkan dengan seluruh pengorbanan, baik jiwa, raga, dan harta, penuh dengan tetesan darah dan derai air mata, beratus-ratus ribu jiwa melayang sebagai tumbal demi tegaknya panji-panji NKRI. Mengapa tega dinodai dengan berbagai tindak amoral, korupsi, penyalahgunaan wewenang, teror dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa."Sungguh rendah kesadaran sejarah bangsaku".

KESIMPULAN

1. *Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia masih harus menghadapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mencapai kedaulatan penuh.*

2. *Bangsa Indonesia tidak patah semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dilakukan dengan cara damai maupun bersenjata.*

3. *Perjuangan bangsa Indonesia memperoleh kedaulatan berhasil dengan diperolehnya pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada akhir tahun 1949.*

4. *Banyak tokoh terlibat dalam proses perjuangan memperoleh kedaulatan negara Indonesia. Dengan cara yang berbeda-beda, para tokoh menunjukkan suri tauladan yang patut ditiru generasi sekarang dan yang akan datang.*

5. *Kemerdekaan bukan berarti perjuangan telah selesai. Perjuangan tidak lebih ringan, tetapi justru semakin berat. Walaupun musuh yang dihadapi berbeda dengan masa penjajahan, tetapi membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar. Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus berhadapan dengan situasi politik dan ekonomi yang sangat kacau balau. Sistem pemerintahan belum mantap, dan kondisi keuangan negara sangat minim.*

LATIH UJI KOMPETENSI

1. Sebutkan tiga tokoh yang sangat berkesan dalam pikiranmu, kemudian tuliskan peranan tokoh tersebut dalam perjuangan revolusi kemerdekaan. Nilai-nilai apa yang pantas ditiru dari tokoh tersebut? Jelaskan alasanmu!

2. Nilai-nilai kejuangan para tokoh revolusi kemerdekaan masih relevan diterapkan pada kehidupan sekarang dan yang akan datang? Pilihlah tiga nilai yang dapat diamalkan pada kehidupan siswa dan pemuda pada masa sekarang!

3. Buatlah suatu rencana kegiatan berkelompok yang mungkin kamu lakukan untuk mengamalkan nilai-nilai perjuangan revolusi kemerdekaan!

LATIH ULANGAN AKHIR BAB

1. Bagaimana kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan?

2. Mengapa terjadi pertempuran 10 November 1945, dan bagaimana peristiwa itu berlangsung?

3. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang Bandung Lautan Api!

4. Keputusan Perundingan Renville merupakan bencana nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba telaah secara kritis dan mendalam!

5. Lakukan telaah kritis mengapa Belanda sangat mendukung dilaksanakan Perjanjian Linggarjati!

6. Apa makna Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia?

7. Mengapa RIS berlangsung tidak terlalu lama?

8. Pelajaran apa yang dapat kamu peroleh dengan belajar bab tentang Revolusi Menegakkan Panji-panji NKRI?

LATIH UJI SEMESTER

A. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat

1. Tentara Jepang datang ke Indonesia begitu cepat dan tidak banyak mengadapi kendala, sebab ….
   a. kekuatan tentara Jepang sudah sangat terlatih
   b. Belanda di Indonesia memang sudah tidak berdaya dalam PD II
   c. Jepang sudah mengirim spionase-spionase ke Indonesia sebelum tentara masuk ke Indonesia
   d. Jepang memiliki keahlian berpropaganda dengan semboyan Jepang sebagai saudara tua
   e. Jalur-jalur kekuatan pemerintah Belanda yang sudah lemah sudah diketahui Jepang

2. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi, antara lain …
   a. Pertanian semakin maju dan perkebunan menjadi mundur
   b. Perkebunan dan pertanian menjadi mundur
   c. Pertanian mundur dan perkebunan maju
   d. Tanaman kopi dimusnahkan dan diganti dengan tanaman jarak.
   e. Industri bidang persenjataan semakin maju

3. Beberapa tokoh yang memiliki peran signifikan dalam perumusan Teks Proklamasi, antara lain….
   a. Sukarno, Moh. Hatta, B.M. Diah, Sukarni.
   b. Sukarni, B.M. Diah, Sudiro, Ahmad Subarjo
   c. Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, Sudiro, Sukarno
   d. Sukarno, Ahmad Subarjo, Moh. Hatta, Sukarni
   e. Sukarni, Moh. Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik

4. Makna penolakan Nishimura memberi izin Sukarno untuk rapat PPKI, ditunjukkan oleh pernyataan...
   a. Sukarno masih memperhitungkan kekuatan tentara Jepang
   b. Kemerdekaan Indonesia sangat tergantung dari kemauan dan kemampuan bangsa Indonesia

c. Indonesia memang perlu dibicarakan dengan anggota PPKI
d. Kemerdekaan Indonesia yang tidak diizinkan Jepang/PPKI berarti tidak legal
e. Kemerdekaan Indonesia harus didukung oleh semua kekuatan, baik para tokoh senior, para pemuda maupun yang selama ini bekerja sama dengan Jepang

5. Makna perang gerilya yang dipimpin Sudirman di masa revolusi adalah….
a. sebagai penyeimbang politik Belanda yang licik
b. untuk menunjukkan bahwa TNI masih eksis
c. bentuk protes dari kebijakan pimpinan pemerintahan yang mau begitu mudah ditangkap Belanda
d. sebagai daya penekan para perunding di meja perundingan untuk segera memutuskan menuju kedaulatan penuh Indonesia
e. menunjukkan kepada dunia luar dan PBB bahwa apa yang dilakukan Belanda di Indonesia tidak sesuai dengan realitas dan kehendak seluruh rakyat Indonesia

B. Jawablah beberapa pertanyaan dan tugas berikut!

1. Jelaskan bagaimana strategi Jepang sehingga begitu cepat dapat masuk ke Indonesia dan dengan cepat dapat mengusir sisa-sisa kekuatan Belanda?

2. Dengan memahami uraian tentang pendudukan Jepang di Indonesia lewat bab "Tirani Matahari Terbit", coba simpulkan sifat-sifat penjajahan Jepang di Indonesia!

3. Sumpah Pemuda memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mendapatkan kemerdekaan.

4. Mengapa pihak keamanan Jepang melalui Jenderal Nishimura tidak mengizinkan Sukarno untuk mengadakan rapat PPKI, dan makna di balik penolakan apa bagi bangsa Indonesia, jelaskan secara kritis!

5. Jelaskan bagaimana keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan,

mengapa menghadapi masalah ekonomi dan politik?

6. Jelaskan yang kamu ketahui tentang Peristiwa Medan Area!

7. Apa yang saudara ketahui tentang peristiwa hijrah tahun 1948. Apa makna peristiwa itu bagi perjuangan para pejuang bangsa!

8. Pada waktu Belanda melakukan Agresi Militer pertama banyak mendapat kritik dan protes, karena Belanda telah ingkar janji seperti telah disepakati dalam Perjanjian Linggarjati. Tetapi mengapa Belanda masih juga melakukan Agresi Militer kedua? Bagaimana pendapat anda?

9. Bagaimana pandangan kamu tentang tokoh Sudirman yang memilih meninggalkan istana untuk kemudian memimpin perang gerilya, tetapi Sukarno tidak mau keluar kota untuk memimpin perjuangan dengan TNI dan ditangkap oleh Belanda? Coba jelaskan secara kritis!

10. Nilai-nilai kejuangan para tokoh revolusi kemerdekaan masih relevan diterapkan pada kehidupan sekarang dan yang akan datang. Pilihlah tiga nilai yang dapat diamalkan pada kehidupan siswa dan pemuda pada masa sekarang!

Tugas

Tuliskan biografi singkat tokoh yang paling berkesan di masa kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan nilai-nilai apa yang dapat kita teladani!

GLOSARIUM

ABDACOM: *(American British Dutch Australian Command)*, tentara gabungan dari Amerika, Inggris, Belanda dan Australia pada Perang Dunia II untuk menghadapi Jepang yang bermarkas di Lembang.

AFNEI: (*Allied Forces Netherlands East Indiers*) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison yang tugasnya antara lain: menerima penyerahan kekuasaan Jepang dan melucutinya untuk dikembalikan ke negeri Jepang.

Aneksasi: pengambilan dengan paksa tanah (wilayah) negara lain untuk disatukan dengan tanah (negara) sendiri; penyerobotan; pencaplokan

Asamu Shudan: pemerintahan Tentara Keenambelas dari Angkatan Darat Jepang yang berkuasa di Jawa-Madura.

Bangsa *Moor*: Sebutan untuk kaum Muslim

Bushido: Jiwa ksatria yang diajarkan oleh Jepang

Chuo Sangi-in: Dewan Pertimbangan Pusat pada masa Jepang

Cultuurstelsel: Sistem Tanam Paksa yang digagas oleh Van den Bosch

de Heeren XVII* (Dewan Tujuh Belas)*: Dewan pimpinan VOC yang beranggotakan 17 orang wakil dari enam kamar dagang di Belanda

devide et impera: Politik adu domba

***East India Company* (EIC)**: Kongsi dagang Inggris berkantor pusat di India

Dai Ni Nankenkantai: Pemerinatahan Angkatan Laut Jepang di Jawa-Madura

Dokuritsu Junbi Inkai: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Dokuritsu Junbi Cosakai: Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Ekonomi Perang: Kebijakan Jepang yang menegaskan bahwa semua usaha ekonomi yang utama untuk membantu peperangan

Ekspansif: Bersifat meluas

Eksploitasi: Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri

Exile government: Pemerintahan pelarian

Fasisme: Gerakan radikal ideologis nasionalis yang cenderung otoriter

Feodalisme: Sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan besar kepada bangsawan.

Fujinkai: Organisasi atau perkumpulan wanita yang juga diberi latihan militer sederhana (semi militer)

Gerakan bawah tanah: Organisasi para tokoh pribumi yang tidak formal, bersifat rahasia di masa Jepang dan bersifat non-kooperatif

Giyugun: Prajurit sukarela di Sumatera

glory: Memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya.

gold: Memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Waktu itu yang dituju terutama Guinea dan rempah-rempah dari Timur

gospel: Menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John yang mereka yakini sebagai Raja Kristen yang berkuasa di Timur

Gun: Kawedanan

Gunseibu: koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur pada masa Jepang

Gunseikan: Kepala pemerintahan militer

Gunshirekan: (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan *Seiko Shikikan* (panglima tertinggi)

Grote Postweg: Jalan raya pos antara Anyer–Panarukan sejauh 1.000 km.

gugur gunung: Bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan (bersama)

Hakko ichiu: Yang bermakna "Delapan Penjuru Dunia di Bawah Satu Atap" yang dijadikan slogan tentara Jepang untuk mempersatukan berbagai negara di bawah Jepang, membentuk kesatuan keluarga umat manusia dengan memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia

Heiho: Organisasi militer yang dibentuk Jepang, bertugas pembantu militer, ditempatkan di medan perang menyatu dengan tentara Jepang.

Hinomaru: Bendera kebangsaan Jepang

Imperialisme: Sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar.

Interaksi: Saling berhubungan.

Intervensi: Campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak.

Jawa Hokai: Himpunan Kebaktian (Rakyat) Jawa yang dibentuk Jepang.

Kapitulasi: Penyerahan kekuasaan sebagai akibat kekalahan dalam peperangan kepada pihak pemenang.

Kapitulasi Tuntang: Perjanjian pengalihan kekuasaan di Hindia dari Belanda kepada Inggris di Tuntang pada 18 September 1811

Keibodan: Organisasi pemuda semi militer, sebagai korps kewaspadaan usia 25-35 tahun

***Kempetei*:** Polisi militer Jepang

Ken: Kabupaten

Kimigayo: Lagu Kebangsaan Jepang

KNIL (*Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger*) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang anggotanya ada juga orang pribumi di Hindia Belanda dan juga orang Indo

***Kochi**:* Daerah khusus, semacam daerah istimewa karena kedudukannya nyang masih diakui sebagai kerajaan

Kolonialisme: Paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu

Komisaris Jenderal: Badan pemerintah baru yang dibentuk oleh Pangeran Willem VI setelah Inggris mengembalikan kekuasaan kepada Belanda. Terdiri atas tiga orang, yakni: Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota)

Komoditas: Barang dagangan utama

Kongsi: Persekutuan dagang

Konvensi London: Perjanjian yang mengharuskan Inggris mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda tahun 1814

Kotsubu: Departemen Lalu Lintas zaman Jepang

Ku: Kelurahan/desa

***Landrente*:** Pajak tanah

Legiun Mangkunegara: Legiun Mangkunegaran adalah organisasi militer ala Eropa tepatnya Militer Perancis yang merupakan institusi modern di Asia pada awal abad ke-19

Liberalisme: Aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi

***liberte, egalite* dan *fraternite*:** Kebebasan, persamaan, dan persaudaraan; prinsip-prinsip baru yang menggulingkan tradisi, hierarki monarki, aristokrat, dan kekuasaan Gereja Katolik

Mobilisasi: Pergerakan tenaga manusia untuk dijadikan tentara

Moderat: Menghindari perilaku yang bersifat ekstrem

"Mutiara dari Timur": Untuk mengibaratkan daerah timur (Indonesia) yang kaya rempah-rempah dan tambang

Nederlansche Handel Matschappij (NHM): Perusahaan Perdagangan Belanda

NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*): Tentara Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu

Onderkoopman: Pedagang Muda

Ordonansi: Peraturan pemerintah

Osamu Seirei: Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16.

***Padrao*:** Patok batu sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan itu milik Portugis

Pasar Monopoli: Hak tunggal untuk berusaha

Pasukan kavaleri: Pasukan berkuda

Pelayaran *Hongi:* Pelayaran hongi adalah pelayaran yang diadakan oleh VOC dengan menggunakan senjata lengkap untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan.

Peta (Pembela Tanah Air): Organisasi militer dari kaum pribumi, tugas utamanya menjaga pertahanan di Indonesia

Pendekatan saintifik: Pembelajaran atas dasar langkah-langkah: mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi/data, mengasosiasi atau menganalisis dan sintesis, kemudian mengomunikasikan

Prefektur: wilayah yang memiliki otoritas

Propaganda: Penjelasan yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan seseorang agar menganut aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu

***Raad van Indie* (Dewan Hindia**): Dewan yang bertugas memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan gubernur jenderal

Radikal: Kemajuan dalam berpikir dan bertindak untuk menuntut perubahan

Rasionalisme: Paham yang mengatakan bahwa sumber dari segala kebenaran adalah pikiran manusia

Republik *Bataaf:* Pemerintahan baru Belanda sebagai bagian dari Perancis yang dipimpin oleh Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte

Revolusi Perancis: Suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Perancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Perancis, dan lebih luas lagi, terhadap Eropa secara keseluruhan

***Romusa*:** Pekerja paksa pada zaman Jepang

***Sambatan*:** Arti membantu untuk mengurangi beban keluhan karena pekerjaan yang banyak

Sangyobu: Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan) atau urusan Perekonomian

"Saudara tua": Sebutan orang Jepang yang mengaku (mempropagandakan) sebagai saudara lebih tua dari orang-orang Indonesia, agar orang-orang Indonesia dapat menerima kedatangan Jepang itu dengan baik

***Staatsblad*:** Lembaran Negara

Seikerei: Tradisi penghormatan kepada dewa Matahari dengan cara membungkukkan badan (seperti gerakan rukuk bagi orang Islam) ke arah matahari terbit setiap pagi (tradisi ini sangat ditentang oleh orang Islam, karena menyembah pada matahari)

Seinendan: Organisasi pemuda semi militer pada usia 14-22 tahun

Shi (Syi): Kota praja

Shu (Syu): Daerah karesidenan

Shihobu*:* Departemen Kehakiman zaman Jepang

Shintoisme*:* Keyakinan atau agama kuno di Jepang

Sinkronis: Konsep berpikir sejarah yang memandang peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu terbatas tetapi memanjang dan meluas dalam konteks ruang dan aspek

Somobu*:* Departemen Dalam Negeri masa Jepang

Son: Kecamatan

***Sumera*:** Tarikh Jepang

Staten Generaal: Parlemen Belanda

Tirani: Bentuk tindakan atau kekuasaan yang sewenang-wenang

Tomi Shudan*:* Tentara Kedua puluh Lima dari Angkatan Darat Jepang yang memerintah di Sumatera

Tonarigumi: Setingkat rukun tetangga (RT)

Traktat London: Perjanjian antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara, tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh tahun 1824.

Traktat Sumatera: Perjanjian yang memberikan Belanda kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh tahun 1871.

***Vadem*:** Satuan ukur. satu *vadem* sama dengan 182 cm.

***Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC)**: Kongsi dagang Belanda berkantor pusat di Batavia

***Volksraad*:** Dewan Perwakilan Rakyat pada masa penjajahan Belanda.

Zaimubu*:* Departemen Keuangan pada masa Jepang

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik dkk. 1978. *Manusia dalam Kemelut Sejarah.* Jakarta: LP3ES.

--------, dan A.B. Lapian. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 5 (Masa Pergerakan Kebangsaan).* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

--------, dan A.B. Lapian. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 6 (Perang dan Revolusi)*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Adam, Ahmat. 2003. *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*. Jakarta: Hasta Mitra.

Adam, Cindy. 1984. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.* (alih bahasa: *Abdul Bar Salim*). Jakarta: Gunung Agung.

Alfarizi, Salman. 2009. *Mohammad Hatta: Biografi Singkat (1902 – 1980)*, Yogyakarta: Garasi.

Anderson, Benedict R.O'G. 1972. *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946.* Ithaca: Cornell University Press.

Anshari, Endang Saifuddin. 1997. *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949).* Jakarta: Gema Insani Press.

Badan Musyawarah Musea. 1984. *Sejarah Perjuangan: Yogya Benteng Proklamasi*, Jakarta: Badan Musyawarah Musea.

Benda, Harry J., 1983. *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under The Japanese Occupation 1942 – 1945,* Holland/USA: Faris Publications.

Boomgaard, Peter dan Janneke van Dijk. 2001. *Het Indie Boek.* Zwolle: Waanders Drukkers

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2007. *Wisata Sejarah*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Direktorat Permuseuman. 1992/1993. *Sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi.* Jakarta: Direktorat Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Elson, R. E. 2009. *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Ensiklopedi Indonesia. 1987. Jakarta: Ichtiar Baru – van Hoeve

Hering, Bob. 2003. *Mohammad Hoesni Thamrin.* Jakarta: Hasta Mitra.

Herkusumo, Arniati Prasedyawati. 1982. *Chuo Sangi In,* Jakarta: Rosda Jayaputra.

Ingleson, John, 1983. *Jalan Pengasingan.* (alih bahasa: Zamakhsyari Dhofier), Jakarta: LP3ES.

Isnaeni, Hendri F. (2015). *Seputar Proklamasi Kemerdekaan: Kesaksian, Penyiaran dan Keterlibatan Jepang.* Jakarta: Kompas.

Kahin, George Mc.Turnan. 2013. *Nasionalisme & Revolusi Indonesia,* (alih bahasa Tim Komunitas Bambu), Depok: Komunitas Bambu.

Kartasasmita, Ginandjar. A. Prabowo. Bambang Kesowo et.al. 1995. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1960*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kompas. 16 Agustus 1975.

Lembaga Soekarno-Hatta. 1986. *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila,* Jakarta: Idayu Press.

Margana, Sri dan Widya Fitrianingsih (ed.). 2010. *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global,* Yogyakarta: Ombak.

Miert, Hans van. 2003. *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia 1918-1930.* Jakarta: Hasta Mitra.

Museum Sejarah Jakarta. 2012. *Petunjuk Museum Sejarah Jakarta.* Jakarta: Museum Sejarah Jakarta.

Nasution, A.H. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia I*., Bandung: Angkasa.

Noer, Deliar. 1985. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942,* Jakarta: LP3ES.

Nordholt, Henk Schulte (ed). 1997. *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan.* Yogyakarta: LKIS.

Notosusanto, Nugroho. 1979. *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia,* Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Panitia Penyusun Sejarah Brigade Ronggolawe. 1985. *Pengabdian Selama Perang Kemerdekaan Bersama Brigade Ronggolawe.* Aries Lima.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia VI ,* Jakarta: Balai Pustaka.

--------,, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia VI,* Jakarta: Balai Pustaka.

Pour, Julius, 2010, *Doorstoot Naar Djokja: Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer*, Jakarta: Kompas.

PT. Mutiara Sumber Widya. 2004. *Album Pahlawan Bangsa.* Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Reid, Anthony, J.S., 1974, *The Indonesian National Revolution 1945 – 1950*, Hawthorn-Victoria: Longman Australia Pty Limited.

Ricklefs, M.C., (2008), *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008,* (alih bahasa Tim Penerjemah Serambi), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Sardiman A.M. 2008, *Guru Bangsa: Sebuah Biografi Jenderal Sudirman*, Yogyakarta: Ombak.

--------,. dan Kusriyantinah, (1996), *Sejarah Nasional dan Sejarah Umum*, Surabaya: Kendang Sari.

--------, 2014. *"Pangsar Soedirman Sokoguru Revolusi"*, Kedaulatan Rakyat,

19 Desember 2014.

Sudarmanto, Y.B. 1992. *Jejak-Jejak Pahlawan: Dari Sultan Agung hingga Hamengku Buwono IX.* Jakarta: Grasindo.

Suganda, Her. 2009. *Rengasdengklok*: *Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945.* Jakarta: Kompas.

Suhartono, 1994, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 – 1945),* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suwondo, Purbo S. 1996. *PETA: Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa dan Sumatera 1942-1945.* Jakarta: Sinar Harapan.

Swantoro, P. 2002. *Dari Buku ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu.* Jakarta: KPG.

Tashadi, dkk., 1986/1987, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945 – 1949,* Jakarta; Dep.Dik.Bud.

Tobing KML., 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Linggarjati,* Jakarta: Gunung Agung.

--------, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: K.M.B.,* Jakarta: Haji Masagung.

Wild, Colin dan Peter Carey. 1986. *Gelora Api Revolusi.* Jakarta: Gramedia.

Zuhdi, Susanto (ed.), 2003: *Tempat Pengasingan dan Makam Pejuang Bangsa,* Jakarta: Proyek Pelestarian dan Pengembangan Sejarah, Asdep Urusan Sejarah Nasional, Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Pemanfaatan internet untuk ilustrasi/gambar

https://www.google.co.id./search=rumah +Djiau Kie Siong

https://www.google.co.id/search=batas +wilayah, 5-1-2016

https://www.google.co.id/search=jenderal +sudirman, 4-1-2016

Profil Penulis



Nama Lengkap : Amurwani Dwi Lestariningsih, S.Sos., M.Hum
Telp Kantor/HP : 08121098998
E-mail : amurwani1@yahoo.com
Alamat Kantor : Kompleks Kemdikbud, Gedung E lantai 9, JL. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Bidang Keahlian : Sejarah Lisan

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Kepala Sub. Direktorat Pemahaman Sejarah (2007-2012)
2. Kepala Sub. Direktorat Sejarah (2012-2015)
3. Kepala Sub. Direktorat Nasional (2015- sekarang)

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Jurusan Sejarah, Universitas Indonesia (2004-2006)
2. S1: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Universitas Sebelas Maret (1988 – 1994)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pancasila : Nilai Budaya, Ideologi Bangsa, dan Harapan Kita, (Penerbit Kemenbudpar-2010)
2. Panglima Soedirman Pejuang Tanpa Pamrih (Tim), (Penerbit Kemenbudpar-2010)
3. Gerwani : Kisah Tahanan Politik Wanita di Kamp Plantungan, (Penerbit Kompas-2011)
4. Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional Buku I, (Penerbit Yayasan Obor-2013)
5. MPR hingga Reformasi, (Penerbit MPR-2012)
6. Indonesia Across Orders: Arus Bawah Sejarah Bangsa (1930-1960), (Penerbit Yayasan Obor-2012)
7. Buku Pelajaran Sejarah Kelas X; Kurikulum 2013, (Penerbit Kemdikbud-2012)
8. Buku Pegangan Guru Sejarah Kelas X, Kurikulum 2013, (Penerbit Kemdikbud-2012)
9. Buku Pelajaran Sejarah Kelas XI; Kurikulum 2013, (Penerbit Kemdikbud-2013)
10. Buku Pegangan Guru Sejarah Kelas XI, Kurikulum 2013, (Penerbit Kemdikbud-2013)

Profil Penulis

Nama Lengkap : Sardiman AM. M.Pd.
Telp Kantor/HP : 0274 548202/0811255660
E-mail : sardiman@uny.ac.id
Alamat Kantor : Jl. Colombo No.1, Yogyakarta
Bidang Keahlian : Sejarah Pemikiran

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Dosen Pendidikan Sejarah, FIS-UNY, (1980-sekarang)

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3: Ilmu Pendidikan Kons. IPS, Pascasarjana UNY, (2013- sedang menyusun disertasi)
2. S2: Pendidikan Sejarah UNS (1986-1990)
3. S1: Pendidikan Sejarah FKIS-IKIP Yogyakarta (1970-1976).

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Memahami Sejarah, Yogyakarta: Bigraaf, (2004)
2. Guru Bangsa: Sebuah Biografi Jenderal Sudirman, Yogyakarta: Ombak (2008)
3. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2014: cetakan ke-22)
4. Demokratisasi dan Defeodalisasi Masa Umar bin Abdul Aziz, Yogyakarta: UnyPress, (2015)
5. IPS Terpadu; Buku teks Pelajaran IPS, Surakarta: Tiga Serangkai (2007)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Sejarah dan Profil Bangsa Yahudi dalam Al-Qur'an: Kajian terhadap Surat Al Baqarah, (2008)
2. Dinamika Kebijakan Pendidikan pada Masa Orde Baru (Kebijakan Menteri Daoed Joesoef dan Nugroho Notosusanto), (2012)
3. Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara: Kajian terhadap Taman Indria dan Konsep Paguron Tamansiswa, (2013)

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Baha` Uddin, S.S., M.Hum
Telp Kantor/HP : 0274-513096/081226563523
E-mail : bahauddin@ugm.ac.id
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu Budaya UGM, Jl. Sosio-Humaniora No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta
Bidang Keahlian : Sejarah Indonesia

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Staf Pengajar, Jurusan Sejarah, FIB-UGM (1999- sekarang)
2. Staf Peneliti, Pusat Studi Korea UGM (1998-sekarang)
3. Staf Peneliti Pusat Manajemen Kesehatan Pelayanan Kesehatan FK-UGM (2000-2001)
4. Staf Dewan Kebudayaan Prop. DIY (2005)
5. Anggota Revisi Kurikulum IPS Sejarah SMA, BSNP,Depdiknas (2005-2006)
6. Anggota Unit Laboratorium Terpadu FIB UGM (2006-sekarang)
7. Dosen Pembimbing Lapangan KKN PPM Pembrantasan Buta Aksara LPPM UGM di Jember, Jatim (2006)
8. Dosen Pembimbing Lapangan KKN PPM Pembrantasan Buta Aksara LPPM UGM di Jember dan Banyuwangi, Jatim (2007)
9. Dosen Pembimbing Lapangan KKN PPM Pembrantasan Buta Aksara, LPPM UGM di Wonosobo, Jawa Tengah (2008)
10. Dosen Pembimbing Tutor Program Layanan Masyarakat Pembrantasan Buta Aksara, LPPM UGM di Wonosobo, Jawa Tengah (2008)
11. Reviewer Buku Pelajaran IPS Sejarah SMU, BNSP Depdiknas (2007)
12. Bendahara Jurusan Sejarah FIB UGM (2007 - 2012)
13. Sekretaris Jurusan Sejarah FIB-UGM (2007-2015)
14. Reviewer Buku Pelajaran IPS Sejarah SD & SMP, BNSP Depdiknas (2008)
15. Tim Teknis Program Layanan Masyarakat Pembrantasan Buta Aksara LPPM UGM (2008)
16. Reviewer Buku Pelajaran Sejarah Kurikulum 2013 (2013-2015)

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2: Program Pascasarjana/Program Studi Humaniora/Universitas Gadjah Mada (2000 – 2005)
2. S1: Fakultas Sastra/Jurusan Sejarah/Prodi Ilmu Sejarah/Universitas Gadjah Mada (1993 – 1998)

Judul Buku Yang Telah Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Penelaah Buku Mata Pelajaran Sejarah untuk Sekolah Menengah Umum dan Sederajat-Depdiknas (2007)
2. Penelaah Buku Mata Pelajaran IPS Terpadu untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama-Depdiknas (2008)

3. Penelaah Buku Pelajaran IPS Sejarah SD & SMP-Depdiknas (2008)
4. Penelaah Buku Pelajaran IPS Sejarah SMA-Depdiknas (2011)
5. Penelaah Buku Pengayaan IPS dan Sejarah Kurikulum 2013-Kemendikbud (2013)
5. Penelaah Buku Palajaran Sejarah Kelas XI Kurikulum 2013-Kemendikbud (2013)
7. Penelaah Buku Palajaran Sejarah Kelas XII Kurikulum 2013-Kemendikbud (2013)
8. Penelaah Buku Non-Teks IPS dan Sejarah Kurikulum 2013-Kemendikbud (2014)
9. Penelaah Buku Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X SMALB Kurikulum 2013-Ke mendikbud (2015)
10. Penelaah Buku Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XI SMALB Kurikulum 2013-Ke mendikbud (2015)

- **Judul Penelitian (10 Tahun Terakhir):**

1. Pemahaman Antarbudaya dan Budaya Kerja pada Karyawan PT LG Electronics Indonesia, Legok, Tangerang, Banten (2005)
2. Dari Mantri Hingga Dokter Jawa: Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Kolonial dalam Penanganan Penyakit Cacar dan Pengaruhnya terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa pada Abad XIX sampai Awal Abad XX (2006)
3. Studi Teknis Tamansari Pasca Gempa Bidang Sejarah (2007)
4. Sejarah Perkembangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2008)
5. Dinamika Pergerakan Perempuan di Indonesia (2009)
6. Lebaran dan Kontestasi Gaya Hidup: Perubahan sensibilitas Masyarakat Gunung Kidul Tahun 1990-an (2009)
7. Dari Gropyokan hingga Sayembara: Studi Kebijakan Pemerintah Lokal Kadipaten Pakualaman dalam Pengendalian Penyakit Pes Tahun 1916 - 1932 (2009)
8. Sejarah dan Silsilah Kesultanan Kotawaringin (2009)
9. Hari Jadi Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta (2010)
10. Kebijakan Propaganda Kesehatan pada Masa Kolonial di Jawa (2010)
11. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas dalam Bidang Kesehatan dan Pembangunan Pedesaan di Banjarnegara 1972-1989 (2011)
12. Antara Tradisi dan Mentalitas: Dinamika Kehidupan Komunitas Pengemis di Dusun Wanteyan, Grabag, Magelang (2011)
13. Penyakit Sosial Masyarakat di Kadipaten Pakualaman pada masa Pakualam VIII (1906-1937) (2012)
14. Warisan Sejarah, Preservasi dan Konflik Sosial Di Ujung Timur Jawa: Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dan Penyelamatan Warisan Sejarah Dan Budaya Situs Kerajaan Macan Putih Di Kabupaten Banyuwangi (2012)
15. Kretek Indonesia: Dari Nasionalisme Hingga Warisan Budaya (2013)
16. Sejarah Nasionalisasi Aset-aset BUMN: Dari Perusahaan Kolonial Menjadi Perusahaan Nasional (2013)
17. Westernisasi dan Paradoks Kebudayaan: Elit Istana Jawa Pada Masa Paku Alam V (1878-1900) (2013)
18. Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial di DIY (2013)
19. Bangsawan Terbuang: Studi Tentang Transformasi Identitas Bangsawan Jawa di Ambon 1718-1980an (2014)
20. Kajian Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta (2015)
21. Ensiklopedi Budaya Kabupaten Kulonprogo (2015)

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
Telp Kantor/HP : 0341-562778 / 0818380812
E-mail : hariyonosejunm@yahoo.com
Alamat Kantor : Jl. Semarang 5 Malang
Bidang Keahlian : Sejarah Indonesia

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Dosen Sejarah di Universitas Negeri Malang (1988 – sekarang)

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3: Fakultas Ilmu Budaya / Ilmu Sejarah / Universitas Indonesia (1999 – 2004)
2. S2: PPs / Pendidikan Sejarah / IKIP Jakarta (1990 – 1995)
3. S1: Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial/Pendidikan Sejarah/IKIP Malang (1982 – 1986)

Judul Buku Yang Telah Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Nasionalisme Indonesia, Kewarganegaraan dan Pancasila. Malang. UM Press (2010)
2. Kedaulatan Indonesia Dalam Perjalanan Sejarah Politik. Malang. UM Press (2011)
3. Nasionalisme dan Generasi Muda Indonesia. Surabaya. Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur (2012)
4. Arsitektur Demokrasi Indonesia; Gagasan Awal Demokrasi Para Pendiri Bangsa. Malang. Setara Press (2013)
5. Dinamika Revolusi Nasional. Malang. Aditya Media (2013)
6. Ideologi Pancasila, Roh Progresif Nasionalisme Indonesia. Malang. Intrans Publishing (2014)

Judul Penelitian (10 Tahun Terakhir):

1. Pemikiran Demokrasi menurut Pendiri Bangsa
2. Sistem Among : Pemikiran Ki Hajar Dewantara
3. Kekuasaan Raffles di Indonesia

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Mumuh Muhsin Z., M.Hum.
Telp Kantor/HP : 022-7796482/08112322511
E-mail : mumuh.muhsin@unpad.ac.id
Alamat Kantor : Jl. Raya Bandung-Sumedang km. 21 Jatinangor, Sumedang
Bidang Keahlian : Ilmu Sejarah

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya (2016-2021)
2. Ketua MSI Cabang Jawa Barat sejak (2010-sekarang)
3. Sekretaris Prodi S2 Kajian Budaya FIB Unpad (2011-2013).

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3: Fakultas Sastra/Jurusan Ilmu Sejarah/Program Studi Ilmu Sejarah/ Universitas Padjadjaran (2010)
2. S2: Fakultas Pascasarjana/Jurusan Ilmu Humaniora/Program Studi Sejarah/ Universitas Gadjah Mada (1993)
3. S1: Fakultas Sastra/Jurusan Sejarah Universitas Padjadjaran (1986)

Judul Penelitian (10 Tahun Terakhir):

1. Priangan Abad ke-19; Kondisi Geografi, Ekonomi, dan Sosial (2008)
2. Jatigede dalam Tinjauan Sejarah dan Budaya (2008)
3. Kondisi Sosial-Ekonomi Cianjur Abad ke-19. (2009)
4. Identifikasi Masalah Kebudayaan Sunda Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Yang Akan Datang (2011)
5. Bunga Rampai; Mozaik Budaya dan Sejarah dari Kampung Naga hingga Partai Rakyat Pasundan (editor) (2012)
6. Bunga Rampai; Pelangi Tradisi dan Sejarah dari Kampung Adat Kuta hingga Peran Ulama Banten (editor) (2012)
7. Bunga Rampai; Pelestarian Budaya dan Sejarah Lokal (editor) (2012)
8. Inventarisasi dan Dokumentasi Sistem Mata Pencaharian yang Ada dan Berkembang di Jawa Barat (2012)
9. Kearifan Budaya Masyarakat Nelayan Jawa Barat dalam Menghadapi Perubahan Ekosistem (2013)

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Mohammad Iskandar
Telp Kantor/HP : 08129689391
E-mail : abahsepuh@yahoo.com
Alamat Kantor : Komplek UI, Jl. Margonda Raya, Depok, Jabar
Bidang Keahlian : Sejarah

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. Dosen Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia, Depok (2010 – 2016)

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya/Program Studi Sejarah – Universitas Indonesia
2. S2: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya/Program Studi Sejarah – Universitas Indonesia
3. S1: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya/Program Studi Sejarah – Universitas Indonesia

Judul Buku Yang Telah Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas XI (Erlangga -2013)
2. Buku Sejarag Indonesia untuk SMA/MA Kelas XII (Erlangga – 2014)
3. Sejarah Para Pemikir Indonesia (Depbudpar – 2004)
4. Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Ilmu Pengetahuan (Raja Grafindo Persada/Rajawali Pers – 2009)

Judul Penelitian (10 Tahun Terakhir):

1. *De Javasche Bank* 1828 – 1953. (Bank Indonesia – 2014)
2. Perjuangan bangsa mendirikan Bank Sentral (Bank Indonesia – 2015)

Profil Editor

Nama Lengkap : Drs. Heni Waluyo Siswanto, M.Pd.
Telp Kantor/HP : 021-3804248 / 081310813308
E-mail : hewalsi@yahoo.com
Akun Facebook : hewalsisutaryo
Alamat Kantor : Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
Jalan Gunung Sahari No.4 Jakarta Pusat
Bidang Keahlian : Sejarah

Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 1994 – 2016: Staf bidang Kurikulum di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2 Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Tahun masuk 1999. Tahun Lulus 2004.
2. S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada. Tahun masuk 1985. Tahun Lulus 1990.

Judul Buku Yang Telah Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Sejarah Indonesia Kelas X, Tahun 2014.
2. Buku Sejarah Indonesia Kelas XI, Tahun 2015.

Judul Penelitian (10 Tahun Terakhir):

1. Penelitian tentang Penerapan Pendidikan Karakter di LPTK belum terbit.
2. Penelitian tetang Implementasi Penilaian Hasil Belajar Siswa belum terbit.

Sekali Anda mencoba narkoba.
Tak akan pernah lepas diri Anda darinya